



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
RISALAH**

RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Hari, Tanggal	: Selasa, 19 November 2019
Pukul	: 13.00 s.d. Selesai WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Ketua Rapat	: SUDIN, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V DPR RI (KK. IV) Gedung Nusantara Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: 1. Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019; 2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Per-Oktober Tahun 2019; 3. Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Tahun 2020; dan 4. Isu-Isu Aktual.
Anggota yang Hadir	: 45 Anggota dari 52 Anggota FRAKSI PDI PERJUANGAN 1. SUDIN, S.E. 2. SUNARNA, S.E., M.Hum. 3. Drs. I MADE URIP, M.Si.

4. ONO SURONO, S.T.
5. Ir. MINDO SIANIPAR
6. YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.
7. VITA ERVINA, S.E.
8. Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.
9. KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.
10. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.H.
2. FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.
3. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.
4. Ir. ICHSAN FIRDAUS
5. BUDHY SETIAWAN
6. Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.
7. ALIEN MUS

FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M.
2. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.
3. Ir. SUMAIL ABDULLAH
4. Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWAI THOHARI, DESS., M.Sc.
5. Ir. H. T. A. KHALID, M.M.

FRAKSI PARTAI NASDEM

1. Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.
2. H. SULAEMAN L. HAMZAH
3. Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.
4. YESSY MELANIA, S.E.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. DANIEL JOHAN, S.E.
2. H. MUHTAROM, S.Sos.
3. LULUK NURHAMIDAH, M.Si.
4. FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.
5. EDWARD TANNUR, S.H.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1. Dr. SUHARDI DUKA, M.M.
2. Drs. GUNTUR SASONO, M.Si.
3. Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.

4. MUSLIM, S.HI., M.M.
5. Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.
6. BAMBANG PURWANTO, S.ST, M.H.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

1. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.
2. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
3. drh. SLAMET
4. H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

FRAKSI PARTAI Amanat Nasional

1. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.
2. HAERUDIN, S.Ag., M.H.
3. FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E.

FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan

1. K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY,
S.Sy.
2. EMA UMIYYATUL CHUSNAH

Anggota Yang Izin :

1. Ir. EFFENDI SIANIPAR
2. H. YADI SRIMULYADI
3. H. DEDI MULYADI, S.H., M.H.
4. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
5. Hj. SRI WULAN, S.E.
6. Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.
7. SLAMET ARIYADI, S.Psi.

Undangan :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.) BESERTA JAJARAN.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta jajaran,

Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut RI beserta jajaran,

**Yang terhormat Direktur Utama Perum Perhutani beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama PT Inhutani 1 – 5, dan hadirin yang saya hormati.**

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya kita dapat mengadakan rapat kerja dalam keadaan sehat wal afiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam rapat Konsultasi pengganti Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2018. Pada hari ini Selasa tanggal 19 November 2019 Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dalam rangka membahas evaluasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester 1 tahun 2019. Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019, serta rencana kerja dan kegiatan tahun 2020, serta isu-isu aktual lainnya.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Menurut laporan Sekretariat Komisi IV saat ini rapat kerja Komisi IV telah dihadiri dan ditandatangani oleh 28 anggota dari 54 dan dihadiri dari 9 fraksi. Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 Ayat 1 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETOK/RAPAT TELAH DIBUKA)

Rapat kerja hari ini dimulai pukul 13:30 dan diakhiri pada pukul 17. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat 1 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut.

1. Pengantar Ketua Rapat.
2. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas Evaluasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester I tahun 2019, Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019, Rencana kerja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020, serta isu-isu aktual lainnya.
3. Jawaban Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pertanyaan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 6 November 2019.
4. Tanggapan anggota Komisi IV.
5. Jawaban Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
6. Kesimpulan
7. Penutup.

Apakah susunan acara ini dapat disetujui?

(KETOK/SUSUNAN ACARA DAPAT DISETUJUI)

Bapak Ibu yang saya hormati.

Berdasarkan laporan istisial hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengenai Sistem Pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana terdapat beberapa temuan terkait penerimaan negara bukan pajak, PNPB, aset tetap, serta belanja barang dan jasa. Untuk itu Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ingin mendapatkan penjelasan dari Pemerintah mengenai tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam istisial hasil pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2019 dimaksud. Dalam kesempatan ini Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai kinerja penyerapan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap realisasi per tanggal 14 November Tahun Anggaran 2019 sebesar 62,2% atau 6 triliun 103 miliar. Dari Pagu anggaran tahun 2019 9 triliun 216 miliar.

Selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta penjelasan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020, serta Pagu anggaran tahun 2020 sebesar 9,319 miliar.

Hadirin yang berbahagia.

Komisi IV juga meminta penjelasan mengenai isu-isu strategis antara lain yang pertama program tanah objek reformasi atau Tora, kedua program perhutanan social, ketiga pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama tahun 2019, serta langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan pada tahun-tahun yang akan datang. Sebagai tindak lanjut rapat dengar pendapat LDP yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019, serta rencana pemindahan ibukota negara Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur. Terkait alih fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk rencana pengembangan Wilayah Ibu Kota Negara.

Saudari Menteri dan Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Demikian pengantar ini kami antarkan, selanjutnya kami persilakan saudari Menteri menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut diatas, dan dilanjutkan dengan jawaban para pejabat Eselon I atas pertanyaan anggota Komisi IV pada rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 6 November yang lalu.

Saudari Menteri kami persilahkan.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih.

Ketua yang terhormat.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salom - Om Swastiastu

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,

Yang kami hormati Ibu dan Bapak anggota Komisi IV DPR RI.

Pertama kami juga bersyukur pada Tuhan hari ini bisa melaksanakan rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, dan terima kasih atas undangan Pimpinan DPR RI tanggal 11 November untuk rapat kerja hari ini, dan terima kasih atas pengantar sebagai gaidens untuk rapat kerja hari ini, dan sesuai dengan rapat, dan sebagaimana disampaikan oleh yang terhormat Ketua bahwa mohon izin kami akan melaporkan hal-hal berkenaan dengan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan 2018, dan pemeriksaan tahun 2019, kemudian tentang penyerapan anggaran 2019, serta rencana kerja tahun ajaran 2020, dan beberapa isu aktual terkait dengan tora hutan social, kebakaran hutan, rencana Ibu Kota Negara.

Bapak Pimpinan dan Ibu Anggota yang kami hormati.

Kami telah menyiapkan dokumen tertulis dan mohon izin kami menyampaikan dalam bentuk beberapa highlight.

Pertama izinkan kami melaporkan hal-hal berkaitan dengan pemeriksaan BPK RI pada halaman 6. Pemeriksaan untuk tahun 2018 di halaman discreen 6 ya terhadap 332 satker dengan sampel pemeriksaan yaitu di Sumut, Jambi, Kalbar, Kalteng, dan Papua Barat. Dan atas pemeriksaan laporan keuangan 2018 tersebut BPK telah menyampaikan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan opini yaitu wajar tanpa pengecualian. Pada pemeriksaan juga telah menemukan 14 temuan pemeriksaan, beserta rekomendasi yang harus dilakukan oleh KLHK untuk berbagai perbaikan, dan izinkan kami melaporkan hal hal-hal berkenaan dengan tindak lanjut.

Pertama dalam hal kelemahan sistem pengendalian intern pada screen 7, terkait dengan keterlambatan penyetoran PNBPN maka kami telah melakukan tindak lanjut dan meminta kepada Sekjen dan para Dirjen, terutama tujuan konservasi untuk melakukan koordinasi dengan bank serta penyetoran dan dalam hal ini kami kalau malah kami meminta untuk bisa dilakukan autodebit, jadi otomatis sehingga dengan demikian penerimaan atau penyetoran bisa langsung disetorkan. Selain itu juga kami berupaya untuk melakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara berjenjang, terkait dengan penerimaan PNBPN ini dari unit-unit di daerah. Berkaitan

dengan identifikasi atas realisasi PNBP Sumber Daya Alam, maka kami juga telah meminta kepada Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi untuk melakukan penyempurnaan dan mengintegrasikan Sistem Pengelolaan, dan Penerimaan PNBP dengan yang ada pada Dirjen PHPL dan Biro Keuangan yang meliputi sistem penata usahaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dengan sistem informasi PNBP dan Simponi.

Berkenaan pada screen 8, berkenaan dengan pengelolaan PNBP pada Ditjen Planologi yang belum didasarkan hasil verifikasi lapangan dan sistem pengelolaan yang belum terintegrasi, kami sudah meminta kepada Dirjen untuk memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran kewajiban pembayaran secara berkala oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, dan meminta serta memerintahkan untuk kegiatan verifikasi penggunaan kawasan hutan oleh unit-unit Planologi dalam pengelolaan PNBP kawasan hutan. Kemudian terkenal dengan kesalahan penganggaran belanja barang untuk diserahkan pada masyarakat kami sudah melakukan teguran kepada Dirjen PAPL untuk juga menegur dan menegaskan kepada kuasa pengguna anggaran yang menggunakan anggaran belanja barang untuk masyarakat tetapi dipakai untuk peralatan mesin dalam rangka tugas operasional kantor.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak yang kami hormari.

Berkenaan dengan pelaksanaan belanja barang pada 3 satuan kerja yang belum mengacu pada juknis, kami telah meminta kepada Dirjen PHPL untuk menegaskan kepada unit-unit upt, bpdas, remu ransiki, batanghari dan untuk menegur atas ketidak cermatan dan kelalaian dalam melaksanakan berbagai ketentuan tersebut, dan untuk membuat pedoman tentang paket pekerjaan sebagaimana tercatat pada halaman 9.

Terhadap pengendalian atas pencatatan belum tertib maka kami telah meminta kepada Sekjen untuk terus memperkuat kekuatan di Kementerian LHK, karena penanganan piutang ini sudah sejak sangat lama dan sedang terus kita coba selesaikan, kita di screen 10. Untuk penetapan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelusuran keberadaan perusahaan yang menunggak seperti Dinas Kehutanan, Kumham, KPP dan lain-lain. Jadi persoalan piutangnya kehutanan ini sudah sangat lama dari tahun sembilan puluhan Pak Sekjen dan sedang kita rapihkan.

Kemudian berkenaan dengan peralatan dan mesin yang diketahui keberadaannya, kami telah memerintahkan kepada Pak Sekjen untuk memerintahkan kepada para pelaksana penata usahaan BMN untuk perlengkapan pengolahan data dan penataan administrasi, dan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Jadi pengawasan terhadap penataan penata usahaan BMN juga kami telah meminta kepada Pak Sekjen secara berjenjang ke bawah untuk terus diperbaiki.

Terkait dengan ketidak jelasan aset pengganti atas dugaan perkara asset tanah dimana Pertamina pada saat ini telah semakin dirapikan dan koordinasi terus dilakukan terutama dengan Menteri Keuangan dan telah dilakukan penetapan penyepakatan aset pengganti dengan nilai yang wajar setara, dan dituangkan dalam perjanjian reiswa. Jadi

gaidens dari Kementerian Keuangan kami, kami pegang untuk kegiatan ini. Berkaitan dengan penatausahaan aset lain-lain yang tidak tertib Kami laporkan bahwa kami telah meminta Sekretaris Jenderal yang untuk memerintahkan kepada para pelaksana penatausahaan barang milik negara yaitu, para penganalisis data perlengkapan, pengolah data, administrasi dan termasuk operator simak BMN untuk mempedomani ketentuan yang berlaku, dan meminta agar penatausahaan ini dapat semakin ditingkatkan.

Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV yang hormati.

Terkait dengan hal-hal ketidak patuhan pada peraturan termasuk persoalan ada tiga hal yaitu, kekurangan volume pekerjaan atas belanja barang dan jasa sebagai tindak lanjut telah disetorkan seluruhnya nilai kekurangan itu kepada kas negara. Terkait dengan penyusunan harga penetapan sendiri atau hps yang dinilai tidak cermat dan mengakibatkan pemborosan atas belanja barang pada satker, ada 6 satker kami telah menginstruksikan kepada Dirjen-Dirjen yaitu, PHPL, PDASAL, KSDHE, PSKL, dan PPKL untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada kuasa pengguna anggaran dan PPK satker yang kurang melakukan pengawasan maupun tidak cermat di dalam menyusun hps menurut ketentuan. Terhadap perhitungan pemotongan PPH 21 atas penghasilan pegawai tahun 2018 yang dinilai tidak sesuai ketentuan, kami telah menginstruksikan kepada Sekjen dan Dirjen, serta Kepala Balai untuk memberikan pelatihan pemahaman perpajakan menurut ketentuan yang berlaku kepada bendahara dan juga meminta kepada Sekjen untuk menyusun panduan tata cara perhitungan PPH tunjangan kinerja dengan berpedoman pada aturan, terkait dengan perhitungan pajak penghasilan yang berlaku.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Demikian hal-hal yang merupakan tindak lanjut dari temuan BPK RI yang telah kami lakukan dan kami juga telah meminta Ibu Irjen dan Pak Sekjen untuk mengantisipasi persoalan pengawasan ini dengan langkah-langkah rapat-rapat koordinasi pengawasan setidaknya-tidaknya 2 bulan sekali.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Saya mohon izin untuk melaporkan hal-hal berkaitan dengan penyerapan anggaran lingkup KLHK untuk tahun 2019. Pada halaman 15 dan 16, serta 17 data ini menunjukkan daya serap anggaran untuk 2019 bagi program-program dan unitnya. Pada unit Sekretariat Jenderal di kolom kedua dan Inspektorat Jenderal dan seterusnya untuk semua unit KLHK, kita lihat pada kolom 3, 4, 5, 6, 7 persentasenya secara umum adalah 66,4%. Tetapi, ada tetapi ini yang sudah tercatat di dalam online sistem penyerapan anggaran, dan kalau kita lihat outstanding kontrak, artinya yang sudah siap dipertanggungjawabkan adalah sebetulnya angkanya 82,7%, sudah bukan 66 lagi, jadi sebetulnya kalau yang sudah dikeluarkan itu diserap sebagai laporan maka sebetulnya angkanya 82,7, tetapi kelengkapan administrasinya masih disempurnakan sehingga belum bisa masuk semuanya ke system, sehingga yang disistem 66,4 tetapi

outstanding nya sebetulnya adalah 82,2%. Kalau kita lihat komposisinya di halaman 17 tetapi, outstanding nya sebetulnya sudah lebih tinggi. Kami terus mengawasi dan saya meminta Pak Sekjen, termasuk besok untuk rapat pengawasan kita akan lihat disetiap Eselon II, jadi nanti kelihatan daya serapnya dan pada bagian mana paling lemah dan itu yang akan kita lihat. Karena rencana kami untuk diakhir Desember seharusnya tidak kurang dari 95% penyerapan.

Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak yang kami hormati.

Izin kami melaporkan sekarang berkaitan dengan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2020, pada screen 19 seperti telah kami laporkan pada raker pertama terdahulu. Arah pembangunan LHK untuk tahun 2020 yaitu berkenaan dengan upaya mendukung secara nasional untuk memperkuat ekonomi nasional, juga mendukung, ataupun ikut terlibat, ataupun mendapatkan mandat untuk penyelesaian pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan beberapa kegiatan, lalu pembangunan infrastruktur lingkungan, dan kelima penguatan pendidikan dan program yang menyerap tenaga kerja. Jadi kalau kita lihat bagaimana tema RKP 2020 ini yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia untuk pertumbuhan berkualitas, kita mohon periksa pada screen 20 yaitu, pada bagian atas ditengah mulai dari pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, maka Kementerian LHK mendapatkan mandate prioritas nasional yaitu untuk pengentasan kemiskinan dengan beberapa kegiatannya.

Kemudian di prioritas nasional yang ketiga yaitu berkaitan dengan nilai tambah sektoril industrialisasi dan kesempatan kerja, maka Kementerian LHK mendapatkan mandat nasional yaitu, untuk peningkatan nilai tambah dan investasi sektoriil dan industrialisasi, serta peningkatan produktivitas Tenaga Kerja dan penciptaan lapangan kerja di PN3.

Selanjutnya pada PN4, Kementerian LHK mendapatkan mandat prioritas nasional ketahanan pangan air energi dan lingkungan hidup yaitu, pada prioritas peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Jadi pada bagian ini kita Kementerian LHK mendapatkan mandat tugas yang disebarkan di dalam program-program Kementerian LHK.

Mohon izin kami melanjutkan berkaitan dengan prioritas pada prioritas nasional pertama yaitu, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Kegiatan prioritasnya yaitu, berkaitan dengan reforma agrarian, tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial yaitu pada halaman 21. Yang bisa kita lihat kurang lebih kegiatannya pada halaman 22 yaitu, berkenaan dengan penataan penguasaan dan pemilikan Tora termasuk pelepasan kawasan hutan. Jadi kawasan hutan yang dilepaskan untuk tora, peta-peta mutakhirnya juga data areal perhutanan sosial termasuk di Pulau Jawa. Nanti pada bagian isu strategis kami akan melaporkan progresnya.

Kemudian berkenaan dengan penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan, jadi kawasan hutan yang berkenaan dengan kawasan hutan yang telah

selesai ditetapkan, jadi sudah mendapatkan data, luas kawasan hutan yang memperoleh izin hutan sosial nanti akan kami laporkan, kira-kira kawasan hutan yang diproyeksikan 12,7 juta hektar, luas yang sudah memperoleh izin hingga saat ini 3,43 juta hektar. Kemudian diproyeksikan 4 tahun kedepan bisa tambah 4 juta hektar lagi. Dengan proses-proses ini maka sebetulnya ada luas areal konflik tenurial yang bisa dimitigasi, bisa dikurangi selama 5 tahun kemarin kira-kira 3,4 – 3,5 juta hektar yang bisa dimitigasi dari konflik untuk kasus kurang lebih 378 - 376 kasus.

Selanjutnya berkenaan dengan pengelolaan kolaboratif bersama masyarakat desa dan pengembangan usaha. Jadi dalam kaitan ini maka melalui program-program pengembangan ekonomi masyarakat kepada kelompok usaha perhutanan sosial juga diberikan pembinaan seperti, alat-alat ekonomi produktif, kemudian pengembangan usaha dan fasilitasi untuk jasa lingkungan dan lain-lain, serta pendampingan yaitu pendampingan kepada kelompok tani hutan Mandiri, kelompok usaha juga pendamping aparat.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Selanjutnya berkaitan dengan prioritas nasional ketiga yaitu nilai tambah sektoril industrialisasi dan kesempatan kerja. izinkan kami melaporkan pada screen 23 yaitu, peningkatan nilai tambah ekonomi dan investasi di sektor riil dengan kegiatan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir. Dalam kaitan ini maka pada tahun-tahun ke depan untuk industri kehutanan kita mengambil kebijakan bahwa yang namanya misalnya, HTI tidak hanya menunggu kayu saja untuk menjadi produk hasil produksinya, tapi dia dibenarkan untuk juga mengusahakan jasa lingkungan lainnya. Misalnya di wilayah konversinya ada pemandangan yang baik, aksesibilitas yang baik maka sebetulnya juga bisa berkembang jasa lingkungan, juga misalnya pengambilan getah rotan dan lain-lain. Kemudian peningkatan daya saing destinasi dan industri wisata termasuk wisata alam yang didukung oleh rantai pasok, ini juga Kementerian LHK mendukung untuk kawasan wisata baru seperti Danau Toba, Mandalika, kemudian Labuan Bajo, Likupang dan Jawa Tengah, Borobudur dan juga kawasan-kawasan wisata lainnya. Kalau lihat perkembangan sekarang dari daerah para Gubernur, para Bupati juga banyak mengusulkan kawasan-kawasan untuk kawasan wisata alam, jadi memang kelihatannya semakin berkembang baik dan kayu laka melakukan fasilitasi untuk itu.

KETUA RAPAT:

Saya minta penjelasan, tadi kan banyak kepala daerah yang meminta untuk kawasan wisata hutan. Persoalannya memintanya gampang, tetapi mengurusnya bagaimana?

Contoh, ya mungkin kalau Bu Menteri datang ke kawasan Taman Nasional Way Kambas pasti mungkin disiapkan adat oleh berjalan. Tetapi kalau biasanya kita lihat aja sendiri, toiletnya pun tidak jelas. Ini taman nasional, apalagi yang dikelola oleh mohon maaf, Pemerintah Kabupaten. Jadi dibuatlah semacam batasan waktu. Kalau 5 tahun anda tidak mengelola dengan baik, haknya akan dicabut. Kalau kita pasti kebebasan, makin tidak jelas retribusinya kemana, uang parkirnya kemana, kebersihannya gimana, lingkungan hidupnya gimana, ya Bu Menteri. Saya hanya mengingatkan, karena beberapa tempat yang saya lihat ujung-ujungnya cuman mengambil uang retribusi.

Dilanjutkan Ibu Menteri.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Ketua.

Terima kasih masukan yang sangat berharga.

Karena memang ini ada perubahan paradigm, kalau dulu kawasan konservasi itu istilahnya ranting tidak boleh patah, nyamuk tidak boleh mati, itu sama sekali tidak boleh ada yang masuk ke dalam. Pada perkembangan berikutnya memang ada kebutuhan untuk Sumber Daya Alam ini dimanfaatkan, tetapi dengan tetap menjaga fungsi hutannya. Jadi Pak Ketua kami sedang menyiapkan revisi Peraturan Menteri-nya untuk menjaga hal-hal tersebut. Jadi dia bisa produktif, dia menunjang pertumbuhan daerah, tapi fungsi lingkungannya tetap dikuatkan. Misalnya, itu tadi harus bekerjasama dengan siapa, apa faktor-faktor kerjasamanya, syaratnya dan lain-lain. Jadi ini kami catat sebagai substansi untuk kami mempersiapkan peningkatan Peraturan Menteri berikutnya.

Izin-izinnnya juga kami Evaluasi, karena ada izin perusahaan izin wisata alam, ada izin penyediaan sarana wisata alam dan sebagainya. Jadi kalau kita meminta ini untuk bisa mendukung pusat pertumbuhan ekonomi daerah, membangun pusat-pusat pertumbuhan di wilayah, maka sebetulnya beberapa juga kita sesuaikan. Misalnya, sarana seperti apa yang boleh misalnya. Kalau dulu hanya boleh misalnya rumah dari bamboo, nah mungkin juga harus disesuaikan asalkan ada teknologinya konservasi nya tetap terjaga. Juga tadi catatan yang termasuk Ketua kasih batas waktu, kalau dia tidak baik ya harusnya diganti saja kepada orang lain yang memang mau berusaha dengan baik.

Jadi Terima kasih Pak Ketua.

Terima kasih, selanjutnya izinkan kami melaporkan berkenaan dengan prioritas nasional masih yang ketiga yaitu dalam hal industrialisasi dan kesempatan kerja. Kementerian LHK mendapat tugas pada peningkatan nilai tambah dan investasi disektoril dan industri yaitu, berkenaan dengan peningkatan industry berbasis pertanian yang terintegrasi hulu Hilir. Jadi ini terkait dengan HPHH, HTT, hasil hutan kayu, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. HPH yang ada di Indonesia saat ini kira-kira

jumlahnya 257 dengan luas 18,7 juta hektar. Sedangkan HTI luasnya 11,3 juta jumlahnya 292 unit. Sedangkan pada perkembangan kedepan kelihatan bahwa pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, itu sangat promising, jadi sangat perlu. Di waktu yang lalu Nilai ekspornya ini yang disebut oleh Bapak Presiden bioprospecting, jadi misalnya apa karang hias, buaya kecil yang semua yang dari lembaga konservasi, amfibi dan getah-getahan, kemudian rotan dan lain-lain. Itu sebetulnya nilainya masih bisa didongkrak dari 13 triliun kira-kira masih bisa sampai 30-an triliun, jadi bioprospecting dalam 5 tahun kedepan akan kita akan kita tingkatkan karena produknya sangat baik untuk keperluan produk obat dan kosmetik. Termasuk dengan ini yaitu kaitan dengan jumlah ekspor Produksi Industri kehutanan, termasuk hasil hutan bukan kayu. Jadi kalau sekarang masih 282.300 ton ini akan kita dongkrak lebih tinggi lagi, apalagi dengan perubahan sosial kelihatan sekali hasil hutan bukan kayu itu dia meningkat.

Kemudian sejalan dengan itu terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri saya tanyakan sedikit.

Ini menjadi polemik yang cukup lumayan, karena masalah terumbu karang yang dibudidayakan, kemudian diekspor, distip oleh KKP diperiode yang lalu. Kami ingin minta kejelasan, karena setahu kami terumbu Karang budidaya dan lain-lain itu domentnya dan nomor platnya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi kok tiba-tiba dari KKP bisa mengklaim bahwa mereka tidak memberikan karantina untuk izin eksportnya. Saya minta penjelasannya, karena kasihan saya pernah melihat di Bali, saya pernah lihat juga di NTB orang yang budidaya itu melibatkan sekian puluh ribu tenaga kerja mengakibatkan pengangguran. Saya minta penjelasannya dulu, karena besok kami akan rapat kerja juga dengan KKP, hal tersebut juga akan kami pertanyakan.

Terima kasih.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih,

Ketua yang terhormat.

Ini sebetulnya terkait dengan Undang-Undang. Kementerian LHK itu tidak bisa masuk di dalam sistem karantina, tapi hanya bisa memberikan rekomendasi. Kita kalau di pelabuhan, di Pelabuhan Udara atau di pelabuhan kita nggak bisa masuk kedalam bagian yang ikut periksa, tapi sebagai tim iya. Nah dalam kaitan ini Pak Ketua,

sebetulnya tentang Karang hias kalau dari KLHK itu ada ketentuan-ketentuannya, ada kuota alam, ada yang dari lembaga konservasi dan untuk yang kasus di Bali lebih dari 1 tahun yang lalu, kami sudah memberikan rekomendasinya dan kami termasuk juga yang mendukung karena itu barang ekspor, dan juga ada tenaga kerja lebih dari 1500 yang di Bali yang kami sangat didukung dengan catatan bahwa itu dari lembaga konservasi, dan di Bali sangat bagus dan sangat terkenal di Eropa, di Amerika dan lain-lain. Tapi ada tapinya, karena yang ngetop waktu itu adalah Balai karantina, Balai karantina itu bukan UPT KLHK, jadi UPT-nya di KKP. Jadi memang otoritas untuk terlepasnya dari pelabuhan itu adanya di balai karantina, jadi posisinya seperti itu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi gini Ibu Menteri, kan kita sudah membuat Undang-Undang Badan Karantina Nasional, tapi sampai saat ini Pemerintah belum mengeluarkan PP nya. Sudah, Badan Karantina Nasional karena di dunia ini yang banyak Badan Karantina-nya cuma di Indonesia. Jadi kalau masalah Pertanian punya sendiri, Kehutanan sendiri, KKP sendiri, belum Perindustrian, belum obat-obatan, belum yang lain. Maka semangat kami itu membuat Badan Karantina Nasional, itu pun mendapat pertentangan. Kalau dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada masalah. Tetapi masalah ini di Kementerian Pertanian dan ke KKP. Sebelumnya cukup tarik-menarik itu, termasuk juga dengan Menpan RB-nya. Karena waktu itu Menpan RB-nya mengatakan perintah Presiden Republik Indonesia tidak boleh ada penambahan badan baru, sedangkan itu bukan penambahan badan baru, tapi menyatukan tiga badan menjadi satu. Ini yang agak tergelitik karena di Indonesia ini yang paling susah adalah kordinasi dan ego sektoral.

Iya Bu Menteri yah, iya lanjutkan Bu.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih.

**Pak Ketua yang terhormat,
Pimpinan dan Ibu, dan Bapak Anggota yang kami hormati.**

Selanjutnya pada screen 25 berkaitan dengan tugas-tugas KLHK dalam kegiatan prioritas pada prioritas kegiatan yang keempat berkenaan pada ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Jadi pada program prioritas yang kedua yaitu, peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air berupa kegiatan penataan kawasan hutan, pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi Sumber Daya Air dan

Ekosistem, serta dukungan kepada program Citarum Harum. Dalam hal ini KLHK berperan dalam Citarum Harum berkaitan dengan penanaman pohon, pengendalian instalasi, pengolahan air limbah, dan sarana pusat daur ulang. Kemudian dalam kaitan kualitas lingkungan hidup ini seluruh kegiatannya ada di Kementerian LHK yaitu, berkaitan dengan pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan pencemaran, dan penguatan kelembagaan.

Dalam kaitan ini **Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati**, mohon periksa pada halaman berikutnya, yaitu sebagai uraian dalam penataan kawasan hutan dikaitkan dengan verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa ekosistem tertinggi secara partisipatif. Maka kalau kita lihat sekarang ini ada 68 juta hektar hutan yang merupakan hutan primer dan gambut yang tidak boleh diapa-apain. Jadi sebetulnya kita punya tak punya cadangan menjaga melindungi hutan primer dan gambut seluas 68.000.000 hektar. Dalam kaitan itu maka unit kerja forest management unit di tingkat tapak atau kesatuan pengelolaan hutan di tingkat tapak yang kita sering sebut KPH itu sudah kita hadirkan sejak 2015-2016.

Pak Ketua dan Bapak Ibu yang kami hormati,

Yaitu sudah ditetapkan 375 KPH di 34 Provinsi. Tetapi memang penguatan kelembagaannya harus terus dilakukan dan dibimbing, pada saat ini baru 220 dari 375 kesatuan pengelolaan hutan atau forest management unit yang memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang. Jadi kelembagaannya harus diperkuat karena lama-lama memang urusan hutan sebetulnya bukan di Jakarta, tetapi lebih banyak di tingkat tapak masing-masing. Oleh karena itu yang kita sebut KPH ini kita perkuat.

Selanjutnya dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, rencana pengendalian kerusakan perairan dan pemulihan kawasan konservasi, dan juga untuk Citarum harum tadi seperti telah kami laporkan. Dan berkenaan dengan ketahanan pangan, air energi dan lingkungan yaitu, dalam hal pencegahan pencemaran kerusakan Sumber Daya Alam dan lingkungan, pengembangan laboratorium merkuri dan Metrologi ini kita coba bangun. Indonesia termasuk negara pertama yang melakukan ratifikasi di Asia Tenggara untuk Konvensi minamata, jadi tahun 2017 sudah ditetapkan Undang-Undang ratifikasinya dan kita termasuk dinilai lebih maju. Tahun 2021 Indonesia diminta untuk menjadi Tuan Rumah untuk Konvensi minamata mengenai merkuri sedunia, jadi kira-kira nanti pesertanya 3000 orang. Jadi Kami nanti mohon arahan dan bimbingan dari yang **terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI** untuk kegiatan ini yang kita harus persiapkan sejak sekarang. Untuk ini juga sudah ada Peraturan Presiden tentang rencana aksi dan mungkin dalam kesempatan-kesempatan FGD bisa kita lakukan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan lingkungan dan hal-hal seperti ini.

Kementerian LHK juga melakukan pemantauan kualitas udara dan perhitungan indeks kualitas udara ini yang kita pakai di dalam mengontrol karhutla dan juga penelitian kualitas udara ini sudah dilakukan atau pemantauannya, di mungkin hampir 100 kota di Indonesia. Iya Pak Ditjen ya, nanti ditegaskan lagi. Dan juga tentang

monitoring air, jadi dalam catatan kita memang 80% lebih itu sungai-sungai kita tercemar sedang sampai berat jadi ini terus-terusan dilakukan, kemudian juga tentang karhutla nanti kami laporkan. Selain itu berkenaan dengan penanggulangan pencemaran seperti fasilitas pengolahan emas, apa namanya skala kecil-peta skala kecil dan kadang-kadang tanpa izin, maka ini juga Kementerian berusaha untuk memberikan contoh-contoh metode yang tanpa merkuri. Misalnya, di Banyumas juga di Palu dan di beberapa tempat. Selanjutnya berkenaan dengan pemulihan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam, seperti peningkatan luasan lahan terlantar akibat pertambangan rakyat. Jadi Kementerian LHK telah mencatat kira-kira 1300-an lubang dan 305 areal yang bekas tambang yang rusak, 352 Spot sudah diverifikasi sudah dideteksi dan secara bertahap kita selesaikan, kita sudah mulai di Jogja, di Dharmasraya, Sumatera Barat, di NTB dan di beberapa Provinsi. Tapi memang sebetulnya nggak yang di Jogja, kalau di Kulon Progo kalau engga salah ya, di Kulon Progo itu 7500 M2 bekas galian sangat rusak, kemudian bisa diatasi lalu ditata, kemudian jadi pasar, sore nya, malam nya dijadiin cafe, jadi yang yang mengerjakan itu anak-anak Karantarna, disitu juga ada daur ulangnya kalau pagi jadi pasar, kalau sore mereka sulap jadi cafe buat malam hari sampai jam berapa. Jadi sebetulnya pola-pola seperti ini sangat baik, tapi memang dananya terlalu kecil sebetulnya di sektor lingkungan. Jadi nanti kami mohon apa dukungan dari **yang terhormat Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota** terhadap hal-hal seperti ini yang sebetulnya bisa langsung direcover. Jadi ada pola lain yaitu ekoriparian, tepi-tepi sungai yang menjadi tempat sampah dan lain-lain sebetulnya oleh remaja-remaja ini oleh Karantarna ini bisa dikelola begitu rupa akhirnya jadi tempat wisata lokal yang cukup menarik juga. Jadi sebetulnya stimulant-stimulan ini kami lihat sangat baik, tetapi memang membutuhkan betul-betul dukungan dari dana untuk alokasi bagi sektor lingkungan hidup.

Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati, serta Bapak Pimpinan Komisi IV yang kami hormati.

Untuk seluruh Program Prioritas Nasional, mohon periksa pada halaman 28. Jadi disitu 4,9 triliun dari program yang non operasional artinya yang bukan untuk dana pegawai, kira-kira 6,5 triliun dari 9 itu adalah program nasional dan program sector itu 4,9-nya adalah program mandate nasional, jadi kita 75% program KLHK itu mendukung Prioritas Nasional. Dan Pagu Alokasi Anggarannya mohon periksa pada halaman 30. Karena mungkin saya tidak usah sebutkan angkanya satu per satu, karena bukan rapat anggaran, kalau rapat anggaran angka-angkanya mesti disebutkan.

Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati, dan Bapak Pimpinan.

Mohon periksa pada halaman 30, konfigurasi programnya, serta dukungan anggarannya yaitu 9 triliun untuk KLHL dan 312 miliar untuk BRG.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak yang kami hormati.

Selanjutnya izinkan kami melaporkan tentang perkembangan Tora, Tora itu artinya (Tanah Objek Reforma Agraria) yang berasal dari Hutan. Kalau lihat datanya,

maka mohon periksa pada halaman 34 yaitu, ada yang istilahnya non inver, inver itu artinya inventarisasi dan verifikasi. Mengapa harus ada inventarisasi dan verifikasi, karena ini adalah kelompok tanah di dalam hutan yang masih fresh, masih fresh artinya bisa dikeluarkan dari hutan dan boleh diberikan kepada masyarakat, nantinya bisa diolah menjadi sertifikat, itu namanya non inver. Iya jadi, kenapa yang satu namanya inver, yaitu dibagian bawahnya dikategorikan 4, 5, 6, dan 7 yaitu harus di inventarisasi dulu dalam bentuk penyelesaian, permasalahan, penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Jadi rata-rata yang inver ini sudah daerahnya, tapi masih di dalam hutan, sehingga harus kita selesaikan, sehingga dia bisa mendapatkan itu menjadi hak miliknya dan menjadi sertifikat itu yang disebut inver. Seperti yang misalnya daerah tramigrasi, kemudian yang sudah ada pemukiman yang fasum dan fasos, kemudian yang merupakan lahan garapan sawah dan tambah rakyat dan pertanian lahan kering. Jadi kalau lihat datanya maka 1,2 ini sudah ada progresnya, dan 1,4 juta yang di non inver atau ver.

Saya mohon izin nanti mohon diperiksa karena sangat banyak penjelasannya dihalaman 41. Ini yang inver itu sudah kita selesaikan sebagian dan akan dibagikan nanti misalnya yang untuk Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Provinsi Maluku, dan sudah selesai pembagain untuk tahap pertama seluruh Kalimantan, kecuali Kalimantan Utara pada saat itu pertama kali dilakukan di Pontianak Kalimantan Barat.

Bapak, Ibu yang kami hormati.

Apa yang bisa kita lakukan, kita mohon periksa pada screen 45.

Yang bisa kita dorong adalah mengajak daerah untuk mengabil kesempatan dari lahan hutan yang bisa dilepaskan, jadi yang belum ada orangnya itu bisa dilakukan dengan cara pengusulan dari Pemerintah Daerah, Bupati kah, Gubernur, itu kalau area pencadangannya dari KLHK itu sudah ada. Gitargetin sebetulnya 4,1 tetapi ketika kita cari dengan kriteria itu ada kira-kira 4,8 sampai 4,9 itu sudah ada petanya. Jadi kalau Pemerintah Daerah di dorong untuk ini, pada saat ini yang inver sudah selesai 330 ribu hektar sudah siap untuk diberikan, dan yang non inver artinya freshline sudah siap 980 ribu hektar, tinggal lagi Pemerintah Daerah memberi usulan, untuk apa, kegiatannya apa, apa saja kegiatannya bisa untuk pertanian terpadu, bisa untuk usaha kawasan perternakan terpadu, bisa untuk kegiatan pengembangan lainnya misalnya ketahanan pangan atau apa pun oleh Pemerintah Daerah yang kekurangan. Jadi ini sebetulnya bisa berkombinasi kerja dengan kebutuhan untuk pangan atau Menteri Pertanian.

Ibu dan Bapak yang terhormat.

Selanjutnya berkaitan dengan hutan social, ini juga banyak penjelasannya izinkan kami melaporkan pada screen 52.

Pada saat ini sudah dicapai akses kelolah untuk Perhutanan Sosial yaitu 3,4.21 juta hektar bagi 6081 kelompok dan mencakup 763.853 kepala keluarga. Jadi dari Hutan Sosial ini yang paling banyak adalah Hutan Desa. Dan selain itu juga yang di Jawa yaitu 25.977 hektar yang kita sebut izin pemanfaatann Perhutanan Sosial. Apa

targetnya dari Hutan Sosial ini yaitu, penguatan kapasitas SDM. Jadi Hutan Sosial dan Tora itu konsepnya adalah pertama untuk pemerataan ekonomi, maka sebetulnya masyarakat diberi akses lahan, tapi lahan saja engga cukup, harus diberi kesempatan peluang untuk berusaha. Usaha itu saja engga cukup, harus diberikan fasilitasi, apakah finansial, bibit, pembinaan dan lain-lain. Oleh karena itu memang kita mendorong untuk diberikan pembinaan baik oleh Bank-Bank BUMN, maupun oleh Menteri Pertanian sebagai pembina untuk agroforestry misalnya, dan sebagainya.

Bapak, Ibu yang kami hormati.

Dalam laporan kami itu cukup banyak sampai halaman 75, termasuk bagaimana cara mengukur keberhasilannya, memonitoring dan sebagainya.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, mungkin yang dipaparkan hal-hal yang sangat penting saja, nanti untuk baca bahan yang tebal itu biar suruh Anggota Komisi IV saja Bu.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Ketua yang terhormat.

Pimpinan, Ibu dan Bapak yang kami hormati.

Sekarang terkait dengan kahutla, saya kira kami berterima kasih, **yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI** sudah melakukan kunjungan lapangan, saya percaya banyak hal yang ditemukan di lapangan, tapi saya kira saya juga mohon periksa semua dokumen berkaitan dengan karhutla ini. Tapi intinya bahwa selama lima tahun kemarin ini karhutlanya sampai dari halaman 78 sampai dengan halaman 120, sampai dengan halaman 128, jadi banyak sekali 50 halaman.

Tapi intinya begini karhutla terbesar sebetulnya tahun 1997 - 1998 yaitu 11 juta hektar, tetapi kita memang punya problem berat terasa sangat berat ketika 2015 kita kebakaran sampai 2,6 juta hektar. Apa yang terjadi, kemudian Bapak Presiden mengambil langkah untuk menyesuaikan. Jadi kalau zaman dulu itu penanganan karhutla itu udah kebakaran dulu, udah darurat dulu baru ditangani. Tapi sejak Presiden Jokowi diperintahkan untuk kita bersiaga sejak bulan Januari, Februari. Kenapa Februari, kenapa Januari, karena Februari akhir itu Riau udah panas banget, Riau itu punya pola hotspot yang berbeda dari daerah lain, daerah lain biasanya mainnya awal Juli itu mulai panas, tapi kalau Riau di Februari udah panas, kemudian Maret kenceng banget nanti turun di akhir April, udah itu turun baru naik lagi di bulan Juli sama seperti daerah lain.

Oleh karena itu kebaruannya di 5 tahun yang lalu, selama 5 tahun adalah pertama kita menetapkan siaga darurat, jadi sejak Januari sebetulnya udah harus disiapkan siaga. Yang kedua, itu perbaikan tata kelola gambut karena pada 2015 itu

kebakaran besarnya ada di gambut, jadi dari 2,6 juta hektar itu kira-kira Rp800.000 gambut. Kemudian kita memperbaiki juga sistem monitoringnya, jadi perintah Bapak Presiden perbaiki sistem monitoring hotspot, pakai sistem satelit, kemudian BMKG dikerahkan, 8 digerakkan instansinya sangat banyak. Ada Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang ini, dimana koordinator untuk penanggulangan adalah Menko Polhukam dan koordinator untuk pencegahan adalah Menko Perekonomian.

Saya kemarin rapat dengan Menko Maritim menjelaskan karena KLHK sekarang dibawah Kemenko Maritim, saya minta izin bahwa atas arahan Perpres, Perpres ini banyak Perpres yang menyebutkan bahwa KLHK juga harus dibawah Menko Perekonomian itu kami juga sudah minta izin dan buat KLHK saya kira bukan masalah dan Mekan juga tidak masalah.

WAKIL KETUA/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Tapi Bu Menteri,

Pimpinan,

Engga, menyambung saja Bu Menteri.

Apa yang disampaikan Bu Menteri sangat penting, tapi kok nggak nyambung banget dengan besarnya anggaran ya, karena anggaran alokasi di pencegahannya hanya 182 miliar. Sementara kalau sudah kejadian kebakaran itu minimal 200 triliun Bu ruginya. Jadi ke depan agar pencegahan lebih kuat, kita bisa juga melibatkan masyarakat ya, masyarakat tidak terlibat, mudah-mudahan bisa ada perubahan dibesarkan mungkin minimal bisa 500, kalau nggak dari 182 miliar kayaknya agak sulit Bu melakukan pencegahan secara apa yang kita harapkan.

Terima kasih Bu Menteri.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Iya sebetulnya si kalau bicara anggarannya KLHK itu yang ideal sebetulnya 18-an triliun, 14-lah harusnya minimal tapi kami juga udah berusaha. Jadi kekuatan pencegahannya kalau di KLHK yang lebih banyak di Linefitmen, jadi karena pencegahannya itu kan kebanyakan kalau di gambut itu mungkin 6 jutaan hektar di konsesi ya jadi kita tinggal control, perintah, marah, sanksi misalnya gitu. Tapi kan yang di luar hutan harusnya Menteri lain. Yang perkebunan misalnya, mungkin harusnya Menteri Pertanian Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota.

Kemudian yang di masyarakat umum misalnya juga mungkin dalam negeri misalnya begitu. Jadi memang ini betul-betul apa namanya banyak instansi sebetulnya yang terlibat, tapi selalu memang orang kalau udah lihat kebakaran hutan yang ditembak sasarannya langsung LHK begitu, padahal sebetulnya dimensinya luas sekali Ketua. Oleh karena itu saya kira kami bersyukur bahwa Komisi IV memberikan atensi yang besar. Jadi pencegahan Law enforcement, jadi yang ketiga adalah law enforcement, tadi termasuk patroli dan lain-lain.

Kemudian yang keempat saya lihat memang pengembangan teknologi, ini mungkin harus ada pengembangan lain lagi, yaitu kalau kita lihat peristiwa yang 2019 itu memang ada yang aneh juga, tapi saya lihat bisa diatasi dengan teknologi. Misalnya begini, waktu di Riau itu hampir seminggu itu asapnya berputar-putar aja, nggak bisa naik ke atas karena ternyata ada-ada angin besar di sepanjang Selat Malaka sehingga mengalami pergerakan asap yang di Pekanbaru, oleh karena itu jadi pengap penduduknya. Nah dalam hal ini Bapak Presiden perintahkan turunkan apa namanya modifikasi cuaca, hujan buatan. Tapi ternyata hujan buatan membutuhkan awan yang mengandung uap air paling tidak 70%. Apa yang terjadi, lalu Panglima TNI kita kan rupanya memang ahli juga dihal itu, beliau akhirnya menabur garam kemudian menjadi terbuka awannya sehingga dari bawah uap air naik masuk, ke awan jadi akhirnya hujan buaatannya bisa dilakukan.

Oleh karena itu mungkin kedepan dalam hal ini teknologi BMKG, BPPT dan lain-lain itu lebih kita perlukan untuk merekayasa ritme kerjanya Awan Dan hujan buatan. Jadi hujan buatan bukan hanya untuk mematikan atau membuat dingin, tetapi juga termasuk untuk mengontrol apa namanya kebasahan di bumi. Tahun ini kita melakukan water bombing hampir 440.000.000 liter air, tahun lalu 315 juta, tahun 2015 juga 200 juta lebih, jadi sekarang kita lebih kenceng begitu berusaha untuk tidak terjadi kebakaran. Maka untuk 2020 Saya kira selain rekayasa ritme awan dan cuaca juga Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, serta Kementerian PU dan lain-lain.

Jadi terima kasih dukungan **yang terhormat Pimpinan dan Anggota** atas atensi terhadap persoalan kebakaran hutan ini dan kami akan terus berupaya untuk apa namanya kita bisa mengatasi ini sebaik-baiknya.

Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Terakhir berkaitan dengan Ibukota negara. Saya mohon izin melaporkan bahwa tentang ibu kota negara Bapak Presiden, Pemerintah telah menetapkan untuk dilakukan di Kaltim.

Ada engga ya screennya yang halaman 8 dulu coba.

Bukan yang ini yang halaman 8-nya.

Jadi di Kalimantan Timur kira-kira lokasinya disekitar Teluk Balikpapan ada Penajam Paser Utara di bagian Selatannya dan Kota Balikpapan, serta Kutai Kartanegara di bagian Utaranya. Jadi lokasi yang garisnya merah sampai bawah itu yang 180.000 hektar, yang lokasi sebelah bawah itu 42.000, yang kawasan intinya ada di dalamnya.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri coba ditampilkan yang sebelum ini tadi yang ada Hutan Lindung, data kawasannya supaya lebih gampang teman-teman mencermatinya.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Data kawasannya ini kelihatan ada tahura, tabelnya ini tabelnya, tadi yang ini yang analisi kawasan.

Yang tadi itulah,

Apa kenapa-kenapa?

Bukan, yang sebelumnya, yang tadi itu loh.

Iya jadi 180 ribu hektar itu kawasannya seperti, kawasan tahura, kawasan hutan lindung, prose batas.

Nah Bapak Presiden menyampaikan kepada saya meletakkan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, sekaligus untuk kita memperbaiki Lingkungan, menjaga konservasinya, menyiapkan Kota sebagai Kota yang baik, Kota berdimensi Lingkungan, Ramah Lingkungan.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Pimpinan Interupsi.

KETUA RAPAT:

Pak Ono baru datang mau interupsi?

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Iya, bolehkan?

KETUA RAPAT:

Iya boleh.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Sedikit saja Bu Menteri,

Mohon minta bahan tanyangan ini, karena di depan ini belum ada.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Bisa.

KETUA RAPAT:

Nanti tambahan Pak Ono segera diprint oleh staf Kementerian.

Tadi sudah dikasih, Pak Ono belum datang maka diambil lagi sama Ibu Menteri.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Pimpinan.

Saya mohon ini mengusulkan Pimpinan, mungkin dalam rapat kerja ini tidak terlalu dalam yang bisa terungkap, dan mungkin FGD sampai sedetail-detailnya, seperti apa, arahnya bagaimana, termasuk kami bisa menerima secara langsung dari **yang terhormat para Anggota**. Jadi ini saya tetap akan menjelaskan yang dalam lingkup KLHK saja, sebabkan ini yang menangani sebetulnya ada BAPPENAS, ada Menteri HTR, ada Menteri PU, dan lain-lain.

Jadi yang diproyeksikan adalah Ibukota, terus yang gambar ini sekarang, bukan yang depan tadi sesionnya. Yang diharapkan adalah Ibukota yang konsepnya adalah konsep Forest City, atau Bus Kapital, jadi Ibukota di tengah hutan. Oleh karena itu perintah.

KETUA RAPAT:

Hidup tanpa listrik, tanpa air.
Engga, tetap ada.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Makanya kami sudah berinteraksi dengan beberapa Menteri dari Negara lain, saya sudah minta ke Norwe. Jadi Bus Kapital atau Forest City kita mesti belajar juga dari Kambara, Kambara itu Bus Kapital. Kita juga mungkin perlu belajar dari Asia-nya dari Jepang, kita juga mau belajar yang dari Norwe. Jadi sudah ada janji dukungan, terutama dukungan expertise dulu nanti sambil kita lihat. Karena pesan konservasi itu dari Bapak Presiden maka saya terus berpikir ini harusnya di dukung.

Jadi kalau dilihat stayingnya, terus halaman berikutnya. Kalau dilihat stayingnya, apa pentahapannya, maka 2017 sampai 2019 itu penyusunan dan penyelesaian, 2020 penyiapan regulasi kelembagaan dan lain-lain, kemudian detail engineering design, pembangunan kawasan inti dan awal pemindahan Ibukota Negera-nya.

Saya tidak bisa menjeleskan banyak yang diluar KLHK, tapi yang terkait dengan KLHK maka kita melakukan kajian lingkungan hidup strategis. Jadi FGD Pimpinan, mungkin minggu depan secepatnya kami bisa langsung kita memasukan dikajian lingkungan hidup strategis, apa hal-hal penting. Karena yang disebut KLHS itu adalah dokumen kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk harus masuk ke dalam dokumen perencanaan dalam bentuk kebijakan rencana dan program, jadi itu kunci-kuncinya. Disitu harus dilihat seluruh dimensi mulai biogeofisik, sampai planning diminamis, sampai ke sosiokulturalnya. Jadi kalau lihat lokasinya, lihat gambarnya lagi yang ini. Nah ini kira-kira nanti arahnya kawasan inti Pemerintahannya, kemudian kawasan

Ibukota, kemudian kawasan perluasannya mulai dari 180 ribu, 42 ribu, sampai yang 5644.

Pimpinan itu yang sementara yang bisa kami laporkan, nanti kita bisa ekspor diminggu depan dalam hal pembahasan sangat rinci.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Menteri.

Kami rencananya Komisi IV ada kunjungan spesifik ke Kalimantan Timur yakni salah satu objeknya melihat calon lokasi Ibukota Negara. Rencananya tanggal 28, Jum'at depan ke Kalimantan Timur. Iya Kamis tanggal 28.

Satu lagi Bu Menteri, kalau Ibu Menteri tidak mau disalah masalah kebakaran hutan namanya diganti Bu judulnya. Jadi jangan kahutlah, kebakaran lahan. Jadi hutannya engga ada, jadi Ibu Menteri engga selalu disalahin. Karena kalau karhutla, pasti hutan, hutan menyangkut wewenangnya LHK. Jadi nanti kalau dalam rapat kerja masukan saja moment klaturnya kebakaran lahan, begitu.

Iya Bu Menteri iya. Nanti masalah FGD tadi saya juga banyak pertanyaan dari 180.965 hektar adakah milik swasta, atau pihak-pihak yang lain, jadi nanti kita bedah secara khusus.

Kami persilakan kemarin ada pertanyaan dari Anggota masing-masing Eselon I menjawab, walaupun jawaban tertulis sudah diberikan tapi, Anggota Komisi IV-nya minta jawaban langsung, karena bisa langsung interaktif biar lebih jelas.

Silahkan, terima kasih.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Ketua mohon izin.

Jadi saya boleh meminta Eselon I yang menjelaskan?

KETUA RAPAT:

Iya,

Apa juga boleh Bu.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Siap, terima kasih Ketua.

Kalau begitu saya mau urut PPI kelihatannya paling banyak (Pengendalian Perubahan Iklim), kemudian setelah ini Planologi.

DIRJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM (RUANDA AGUNG SUGARDIMAN):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Siang Pimpinan dan Anggota yang terhormat.

Dari pertanyaan para anggota dan Pimpinan pada tanggal 6 November yang lalu yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim terkait dengan Karhutla ada 9 pertanyaan yang kami catat dari Dokter Andi Akmal, Dr. Guntur Sasono, Yesi Melenia, dari Bapak Ismail Abdullah, Kristanto Kritiawan, Bapak Darori, Doktor Endang Setiawati, Bu Risky Aprilia, kemudian Bapak Budisatrio.

Jawaban yang kami tulis misalnya untuk Bapak Andi Akmal ada di halaman 7. Pertanyaannya, bagaimana konsep dari KLHK terkait penanggulangan Karhutla sehingga menjadi LHK sebagai Lit Sektor dan bagaimana langkah-langkah antisipasinya?

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen, diusahakan jangan karhutla, kebakaran lahan. Kalau karhutla menjadi beban terus nantinya.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Yang keren, yang keren landscape fire.

DIRJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM (RUANDA AGUNG SUGARDIMAN):

Siap-siap Pimpinan kami catat.

Karla ya.

Ini apakah kami bacakan semua dari jawaban ini, karena ada 3-4-5 halaman dari permasing-masing anggota.

KETUA RAPAT:

Saya yakin pertanyaan hampir sama, iya toh?

Hampir sama pertanyaannya dijadikan satu saja.

DIRJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM (RUANDA AGUNG SUGARDIMAN):

Siap Pimpinan.

Iya dari pertanyaan Dokter Andi ini ada pertanyaan mirip dan ini mungkin jawabannya mungkin bisa kami sampai dengan jawabannya lainnya.

Jadi konsep KLHK dalam penanggulangan kebakaran lahan pada saat ini adalah mengedepankan pada kegiatan-kegiatan pencegahan, lebih focus pada pencegahan artinya, tanpa mengesampingkan upaya pemadaman. Penanggulangan kebakaran lahan diinteruksikan oleh Presiden dalam interuksi Presiden Republik Indonesia tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian kebakaran lahan yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan.

- a. Meningkatkan kordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan,
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pengendalian kebakaran hutan Manggala Agni,
- c. Mewajibkan kepada pemilik usaha di bidang Kehutanan untuk memiliki Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, pengendalian kebakaran hutan, serta melaksanakan pengendalian kebakaran hutan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai mandate yang ditentukan.
- d. Memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha dibidang kehutanan yang tidak memiliki Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, pengendalian kebakaran hutan, serta tidak melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan diareal kerjanya.
- e. Meningkatkan kordinasi dalam upaya pemulihan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan.
- f. Meningkatkan kordinasi dan memberikan bantuan teknis untuk kerja sama regional dan internasional yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan.
- g. Kemudian meningkatkan kinerja pejabat, penyidik, pegawai negeri sipil, lingkungan hidup, kehutanan, polisi kehutanan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Kemudian langkah-langkah antisipasi yang dilakukan antara lain.

- a. Mengembangkan sistim early warning dan early detection untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pemadaman yang dapat diakses oleh Publik melalui sipungi.menlhk.co.id.
- b. Mengembangkan fire danger rating system atau sistim peringkat bahaya kebakaran bersama-sama dengan BMKG 8, BPPT sejak tahun 2002.
- c. Patrol pencegahan terpadu yang dilaksanakan di 8 Provinsi karhutla sejak tahun 2016.
- d. Patrol Mandiri yang dilaksanakan oleh UPT KLHK diluar lokasi patroli pencegahan terpadu.
- e. Penyusuna NSPK terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai get line dan dasar pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari level nasional sampai dengan tingkat tapak.
- f. Kampanye penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat dan siswa sekolah sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan karhutla.

- g. Pengembangan pembukaan lahan tanpa bakar dengan memberikan pelatihan pembuatan kompos, berikan arang, dan juga kayu kepada kelompok masyarakat peduli api.
- h. Pembentukan dan peningkatan kapasitas masyarakat peduli api sampai dengan saat ini telah terbentuk sebanyak 704 regu masyarakat peduli dengan jumlah anggota 1569 orang di 28 Provinsi.
- i. Pembentukan dan peningkatan kapasitas manggala agni sampai dengan saat ini telah terbentuk 34 daerah operasi manggala agni di Indonesia.
- j. Dukungan pembentukan brigade pengendalian karhutla KPH dan Balai Besar, Balai KSDAE dan Balai Besar Ratotan, Balai Taman Nasional.
- k. Revitalisasi sarana dan prasarana pengendalian karhutla, baik di dat Manggala agni maupun kelompok masyarakat pedulu api.
- l. Pemadaman Mandiri yang dilakukan oleh manggala agni.
- m. Kemudian pemadaman gabungan yang dilakukan oleh Manggala Agni bersama-sama dengan TNI, Polri, BPPD, Polhut, dan masyarakat peduli api.
- n. Kemudian kegiatan water bombing bersama-sama dengan BNPB untuk memadamkan karhutla terutama dilahan bergambut, maupun daerah dengan topo grafi yang sulit dijangkau.
- o. Kemudian melakukan technology modifikasi cuaca bersama-sama dengan BPPT untuk mencegah meluasnya arealnya yang terbakar.
- p. Penanganan paska karhutla seperti monitoring area bekas kebakaran hutan dan lahan, serta penghitungan luas karhutla.

Mungkin dari beberapa pertanyaan bisa kami rangkum dengan jawaban itu Pimpinan.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen Bu Menteri.

Hampir semua perusahaan HTI maupun Kebon Sawit, kan ada dana CSA-nya.

Kenapa engga sebagaimana dana CSA itu dibikin embung diperbatasan dengan wilayah diluar konsesi mereka?

Karena minimal kalau ada embung, untuk pencegahaannya kan lebih gampang. Tinggal pakai pompanisasi mengurangi resiko atau sekalian saja dibikin galihan saja sekalian parit, radius satu kilo meter menjadi tanggung jawab pemegang izin. Karena saya yakin dana CSA dari mereka pun kadang engga jelas, hanya gaya-gayaan bantu sekolah cuman sekian puluh juta, ratus juta, tetapi dana CSA-nya harusnya ratusan miliar.

Tolong itu nanti dikaji supaya segera kalau bisa diwujudkan agar nanti 2020 September elnino itu minimal sebagai sudah bisa diatasi.

Iya Ibu Menteri iya.

Silahkan selanjutnya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Interupsi apa nanya?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi.

Bapak Dirjen, saya sekedar usul ya mengingat pertama ada perbedaan data, kemarin terkait ini karla dan juga respon Permerintah Provinsi terkait yang terkadang, ya dalam persepsi saya, saya mohon maaf apabila salah, itu kurang serius dalam menanggapi karla ini. Kalau memang memungkinkan untuk dipertemukan pihak-pihak terkait yang memang untuk merumuskan data permasalahan solusinya seperti apa, jadi kita linier kerjanya gituloh, memang ada yang dikerjakan untuk mengantisipasi kedepan.

Demikian, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mbak Riezky kemarin sudah kita infokan. Kalau waktunya cukup dibulan Desember kita panggil para pihak, kalau tidak cukup waktunya bulan Desember, Januari kita panggil itu Gubernur maupun Bupati Walikota yang terdampak atau akan kena dampaknya.

Sudah jelas?

Iya lanjutkan Bu Menteri.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Selanjutnya silahkan Planologi.

Setelah ini PDASHL ya.

DIRJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN (SIGIT HARDWINARTO):

Terima kasih Ibu Menteri.

Mohon izin Bapak Pimpinan.

Baiklah, terkait dengan daftar pertanyaan khususnya yang terkait dengan permasalahan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang pertama dari Bapak Sudin ya. Bapak Sudin menanyakan, bagaimana caranya memastikan lahan Tora yang clear and clean itu seperti apa?

Tentu saja dalam pelaksanaannya itu dilandasi oleh Perpres 88 tahun 2017 tentang PPTKH yaitu, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ini. Ada tadi Ibu Menteri sudah menyampaikan ada mekanisme infrared (inventarisasi verifikasi) itu direct and inverse namanya, juga ada mekanisme non inverter artinya, yang dilaksanakan oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah tentu saja semuanya ini akan terjamin karena tim tersebut terdiri dari tim dari BPN, ATR BPN, tim dari KLHK, tim dari Daerah Gubernur, dan seterusnya. Nah dari hasilnya ini semua dimulai dari usulan sampai di verifikasi oleh tim kemudian dikembalikan lagi oleh Gubernur, jadi prosesnya saling check and balance terhadap lahan-lahan tersebut. Tapi yang paling terpenting adalah lahan-lahan yang hasil dari Tora ini diharapkan dapat sampai pada penerimanya yaitu daftar penduduk atau masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut yang sesuai dengan hasil inventarisasi dan verifikasi.

Berikutnya pertanyaan dari Pak Muhtarom yang terkait dengan penyederhanaan membuat regulasi, terutama dalam rangka membangun Waduk, embung dan bendungan dan prasarana fisik lainnya, terutama yang berada di wilayah atau kawasan hutan yang ditujukan untuk irigasi Pertanian. Nah di KLHK ini untuk melaksanakan kegiatan ini tentu menggunakan mekanisme IPPKH lagi yaitu, izin pinjam pakai kawasan hutan, namun dari tahun ke tahun saat ini sudah mulai disederhanakan ya dengan munculnya USS juga terutama yang pertama adalah penghapusan persetujuan prinsip, jadi tahun-tahun sebelumnya dulu itu kalau izin IPPKH untuk bendungan, waduk dan lain-lainnya itu menggunakan persetujuan prinsip sekarang sudah tidak ada lagi sehingga dapat mengurangi waktu atau proses perizinan tersebut. Yang kedua juga sudah ditetapkan bahwa waktu pengurusan IPPKH sekarang ini adalah 34 hari, 34 hari hingga akhirnya bisa keluar. Juga ada contoh bendungan yang besar yang dibangun oleh Pemerintah itu juga dibebaskan dari kewajiban lahan kompensasi seperti itu, sebenarnya pada hakekatnya semuanya tujuannya untuk mempercepat terjadinya terbangunnya bendungan dan waduk dan seterusnya untuk kebutuhan mendukung irigasi petani.

Yang ketiga pertanyaan dari Bapak Sutrisno, terutama terkait dengan siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pembukaan kawasan hutan untuk areal Tambang, serta siapa yang harus kita si dan reboisasi. Tentu saja yang terkait dengan Kehutanan terutama masalah pertambangan itu kembali lagi menggunakan mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan iya, dan lokasinya untuk kegiatan pertama ini dibatasi pada kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Kalau yang kawasan hutan lindung ini agak spesifik mekanismenya dengan penambangan tertutup ya, tapi kalau yang mereduksi seperti biasanya bisa dilakukan dengan open beat atau penambangan terbuka. Nah kegiatan pertambangan yang telah mendapat IPPKH dikenakan beberapa kewajiban, salah satunya adalah melakukan kewajiban reklamasi tadi, maupun reboisasi sehingga sudah satu paket dalam pelaksanaan rehabilitasi kawasan tambang itu dilakukan oleh pemerakasa atau pemohon izin pinjam pakai kawasan hutan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., MH.):

Interuksi Pimpinan.

Mumpung masih berkaitan saya ingin tanya kepada Bapak,
Ibu Menteri izin.

Kalau pemberian izin dengan skema yang tadi perjanjian bahwa mereka melakukan reklamasi apa mereka hanya perjanjian atau menyimpan dulu anggarannya?

Pertanyaan kedua, setelah mereka diberikan izin uangnya disimpan duluan atau nanti belakangan, apakah mereka dalam proses nanti menjalankan usahanya sesuai dengan skema yang awal, karena justru banyak pelanggaran yaitu adalah karena ipph yang dilanggar, diberi 100, diberi 200 jadinya 200. Nah saya ingin tahu yang pasti, berapa perusahaan yang melakukan pelanggaran disitu dan berapa perusahaan yang tidak melakukan reklamasi? Karena ini terjadi dan ini sudah orang banyak tau.

Terima kasih Pimpinan.

DIRJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN (SIGIT HARDWINARTO):

Terima kasih Pak Pimpinan atas pertanyaan tadi iya.

Tentu saja apa yang disampaikan benar bahwa ada perusahaan yang artinya tidak patuh terhadap kegiatan pembayaran tadi ya, baik itu kegiatan untuk biaya reklamasi maupun kegiatan reboisasi dan seterusnya. Tentu saja kami di Planologi selalu mencatat yang patuh berapa ya, yang nggak patuh berapa. Karena kalau kegiatan ini enggak dipenuhi ya ini untuk izin eksploitasinya itu juga bisa kita stop, kita bisa memberikan izin investasi kalau itu belum dilengkapi komitmennya itu, juga ada tadi juga benar yang disampaikan perusahaan besar yang nakal misalkan, ada kewajiban membayar PNPB terkait itu ya pemasukan pajak yang BNPB itu, itu juga di KLHK cukup banyak hampir satu setengah itu Pak, tapi itu anu apa diperoleh dari pemungutan dari pajak-pajak tersebut. Namun demikian kami hanya pelaksana saja uangnya itu ngumpulnya di Departemen Keuangan Dirjen Pajak, juga ada sebagian dana Reklamasi itu justru masuknya di Kementerian ESDM. Jadi kami menegurnya atau apapun itu sifatnya administratif seperti itu.

Nah mengenai data-data yang melanggar lah tadi lengkap Pak, namun demikian kebetulan ini kami tidak membawa, nanti kami akan sampaikan secara tertulis lengkapnya laporan yang data-data jam berapa yang melanggar, berapa yang ini semua sudah ada.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Izin Pimpinan,

Melalui Pimpinan saya sampaikan bahwa illegal logging itu kan tertinggi deforestasi kita itu. Dan yang kedua alih fungsi lahan juga ada tambahan dari deforestasi kita baik itu untuk perumahan, baik itu untuk pertanian, perkebunan.

Nah saya ingin sampaikan kepada Bapak sebagai RT, RW ini adalah benteng kira-kira yang tahu betul harus di mana perusahaan ada di mana tidak ada Planologi. Nah dan kita saksikan dengan mata telanjang bahwa banyak hutan alam yang inilah pemberian rusak, baik itu perusahaan yang diberikan izin dengan segala pelanggarannya, baik perusahaan yang memberikan izin. Tentu kami dari DPR dalam proses pengawasan butuh data, mana pengusaha yang penunggak pajak PNBP-nya, mana pengusaha yang melakukan proses pengembangan secara illegal, mana pengusaha perusahaan yang diberikan izin melanggar IPPKH-nya. Dan itu jelas kalau publik tahu. Problemnya di kita itu tertutup semua, dan selesainya tertutup semua, akhirnya yang rusak alam kita. Dari mana memulai, kitalah pemangku kebijakan yang salah.

Ingin kami sampaikan, kalau kedepan pemberian izin itu harus dengan jaminannya, pada saat mereka melakukan proses pelanggaran kita sudah punya jaminan, karena sebagai proses hukum nanti kedepan penagihan itu begitu lama, begitu panjang dan alam kita sudah rusak, tapi kalau ada jaminannya boleh kamu nanti kalau ada IPPKH-nya, tapi izin untuk reklamasi, untuk reboisasi ada jaminannya, apa sejumlah uang atau berapa dan itu harus masuk kepada jaminan. Kalau memang itu belum ada kita harus ada pengajuan Pimpinan, pengusulan karena ini penting di internal para pengembang kawasan hutan ini.

Ada perubahan Undang-Undang tentang PNBP, jadi bagaimana perusahaan-perusahaan itu memberikan jaminan dulu, baru diberikan izin.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Haerudin, biar dilanjutkan dulu, nanti kana da tanggapan anggota.
Silakan Pak Dirjen.

DIRJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN (SIGIT HARDWINARTO):

Terima kasih Bapak atas saran dan masukannya.

Saya kira bagus Pak masukannya karena, kami juga kadang-kadang memikirkan untuk dikepentingan di KLHK saja Pak, kita itu bisa menghasilkan misalkan 2 triliun dari nagih-nagih itu, tapi kita sendiri untuk mengefisienkan, mengoptimalkan staf karena kan juga butuh dana meminta disitu saja juga agak sedikit masalah masih kesulitan, oleh karena itu seperti menagih keperusahaan dan seterusnya, mungkin akan kita siapkan nanti draft-draft yang bisa menjadi masukan dalam perbaikan regulasi itu.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Sampaikan secara, izin Pimpinan.
Nanti dibahas kan lama, kita sampaikan dulu.

KETUA RAPAT:

Coba nanti lah, setelah Dirjen selesai, gimana Bapak Ibu?
Dirjen selesai baru, gituloh tanggapan anggota.
Silahkan, biar tertiblah ini jalannya rapat.
Silahkan Pak Dirjen.

Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang terhormat, nanti jam 5 insyaallah aka nada Paripurna sehingga rapat hari ini kita maksimalkan sampai dengan 16:30 berakhir, biar ada kesempatan sholat Ashar, lanjut Paripurna.

Bagaimana setuju?
Iya silahkan lanjut Pak Dirjen.

DIRJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN (SIGIT HARDWINARTO):

Terima kasih Bapak Ketua.

Pertanyaan berikutnya atau saran dari Bapak Dokter Suwardi iya dari pertanyaannya adalah, regulasi terkait pemanfaatann fasilitas umum, Fasum dan Fasos) di kawasan hutan itu seperti apa, nah disini sudah ada dalam pembangunan fasilitas umum, maupun fasilitas social yang ada di dalam kawasan hutan itu dilakukan dengan mekanisme perubahan peruntukan kawasan ya, atau yang dikenal dengan tukar menukar kawasan hutan. Jadi kalau di Jawa misalkan satu dibanding dua, kalau di luar Jawa satu banding satu Pak karena arealnya masih luas, lahan penggantinya jadi lebih kecil, kalau di Jawa satu banding dua. Juga ada kalau di luar Jawa namanya mekanisme pelepasan kawasan hutan, tentu saja pelepasahan ini dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, memang itu ditujukan untuk pembangunan.

Berikutnya yang ke enam ya dari pertanyaan Pak Muslim yaitu terkait mekanisme perizinan amdal ya yang minta dipercepat ya Pak ya, nah ini juga waktunya beriringan dengan hajar Pemerintah terkait dengan omdibuslo itu, itu juga amdal juga diminta lebih disederhanakan, lebih dicepat, dan kita ini sedang berupaya ini dengan KL terkait yang dikordinir Kementerian Perekonomian, tentu saja KLHK sudah upaya sebelum istilahnya antar Kementerian bekerja ini kita sebenarnya sudah melakukan penyederhanaan-penyederhanaan dan pengurangan waktu, seperti waktu penyusunan amdal sekarang juga sudah bisa lebih cepat ya. Juga proses terkait dengan studi kelayakan, ini juga sudah mulai dikurangi waktu-waktunya. Yang intinya adalah dari sisi waktu disederhanakan, jugag dari sisi konsep perencananya, misalnya KLHS. Kalau

sudah KLHS di daerah Kota maupun di daerah Kabupaten itu bisa ada pengecualiannya. Yang kemarin ribet di media masa ya amdal engga perlu, itu sebenarnya bukan engga perlu tapi dikecualikan pada usaha kegiatan tertentu gitu, itu yang terkait dengan amdal.

Yang terakhir pertanyaan Pak Yohanis Fransiskus Lema ya, ini terkait dengan kebijakan dan aksi implementasi, upaya antisipasi deforestasi yang sudah merambat ke wilayah Timur, iya artinya ke wilayah Papua ya barang kali sudah, karena hutan itu yang bagus ke arah Timur ya dibanding dari Barat. Tentu saja Pemerintah sudah melaksanakan aksi ya, terkait upaya-upaya antisipasi deforestasi, yang pertama kita melakukan optimalisasi pelaksanaan (PP) Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan, itu sudah kita atur dan kita sesuaikan juga dengan mohon maaf, Inpres Nomor 8 tahun 2017 itu sudah ada itu juga sudah menyesuaikan dengan PP ini, sehingga pengaturan tukar menukar kawasan hutan maupun pelepasan kawasan hutan dan seterusnya, itu kita tetap komit misalkan untuk perkebunan sekarang harus mempertahankan kawasan HCVR (high conversion value forest) dimana kawasan yang hutannya bagus walaupun arealnya untuk izin kebun sawit misalnya tempatnya ditengah-tengah itu harus disisakan, itu kita wajibkan seperti itu ya supaya hutan itu tidak benar-benar rusak, bisa menambah dan seterusnya. Juga tentang Inpres 8 2018 tentang penundaan evaluasi perizinan kebun sawit itu juga seperti itu Pak semua kita bebani untuk, artinya areal-areal yang bisa dimanfaatkan bisa diolah itu benar-benar areal-areal yang tidak produktif, yang masih hutannya agak bagus kita sisakan, kita pelihara, karena internasional pun juga mempersyaratkan misalnya untuk sawit itu yang bagus-bagus itu berapa jumlah dan seterusnya, itu juga kita sesuaikan juga. Juga dalam pelaksanaannya itu yang Inpres nomor 5 tahun 2019 ini yang baru ya tentang penghentian pemberian baru atau PP Pak yang terbaru. Itu sekarang Bu Menteri sudah dulu mengajukan Inpres ini ya, ini terkait dengan dulunya itu penundaan-penundaan-penundaan gitu mulai tahun 2011 nama Inpresnya, nah yang terakhir 2019 ini sudah penghentian artinya, kondisinya sudah relative stabil, jadi sudah engga ada lagi izin lagi ini memang kita pertahankan sebagai kawasan hutan alam primer, maupun tanah gambut apa istilahnya gambut yang benar-benar dilindungi dan seterusnya. Inilah semuanya ini dapat mendukung untuk mengurangi terjadinya deforestasi, juga tadi dari awal sudah disampaikan kita akan melakukan pemantauan cepat terhadap terjadinya kebakaran hutan, itu juga sudah diarahkan untuk mengurangi deforestasi.

Demikian Bapak Pimpinan yang secara ringkas bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Dirjen PDASAL, selanjutnya Dirjen KSDAE.

DIRJEN KSDAE (WIRATNO):

Bissmillahirrohmaanirrohiem

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapak Ketua dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI, Ibu Menteri dan Pak Wamen,

Izinkan kami menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Sidang terdahulu dari PDASAL kami mendapat 6 (enam) pertanyaan Bapak Ibu. Jadi yang pertama dari Pak Dedi Mulyadi pada saat itu, jadi konsep rehabilitasi hutan dan lahan kami adalah prinsipnya memperbaiki daerah tangkapan air di daerah hulu Pak terutama di hutan lindung, jadi kegiatan RHL kami memang kami fokuskan di hutan-hutan lindung yang ada di daerah atas, selain itu kami juga membagi bibit secara gratis kepada masyarakat sebagaimana kami telah viralkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan bibit, itu yang pertama.

Kemudian pertanyaan kedua Pak dari Bapak H. Sutirno, SE., M.Si sebagaimana tertera di halaman 19, jadi kami di PDAS AL itu setiap pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan itu terdapat kewajiban untuk merehabilitasi DAS kritis, jadi selain reklamasi selain rehabilitasi, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan kami juga mendapat kewajiban rehabilitasi DAS kritis seluas 1:1 Pak minimal, jadi ini telah kami lakukan sehingga upaya-upaya untuk merehabilitasi hutan itu selain oleh APBN juga dilakukan oleh swasta dan ini dilakukan untuk daerah-daerah yang terdapat izin pinjam pakai kawasan hutan dan ini sudah berlangsung terus Pak dan alhamdulillah karena kalau dari pemegang izin pinjam pakai insyaallah berhasil Pak karena itu akan mengurangi kewajiban sebagaimana pembayaran BNPB.

Pertanyaan ketiga dari Pak Doktor Suhardi Duka, MM sebagaimana tertera di halaman 34 Pak, jadi untuk Provinsi Sulawesi Barat kami telah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan DAS Lariang Mamasa seluas 2000 hektar tahun ini dan tahun depan insyaallah akan pemeliharaan dan penambahan target penanaman baru.

Kemudian dari Bapak H. Yadi Mulyadi itu sebagaimana tertera di halaman 43 Pak, jadi Bapak Ibu, kami untuk Citarum terutama dalam program Citarum Harum Kementerian LHK Bu Menteri telah menyampaikan beberapa quik weens yang harus kita lakukan yaitu yang pertama rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetative seluar 6275 hektar Pak, untuk perbaikannya kami juga melakukan pembangunan konservasi dalam rangka konservasi tanah dan air yaitu berupa pembangunan dan pengendali dua unit dan penahan 150 unit, gali plak 4500 unit, dan sumur resapan 1500 unit, sampai saat ini kegiatan itu terus berlangsung dan akan kita lakukan terus menerus karena Citarum merupakan prioritas nasional untuk pemulihan DAS.

Kemudian yang terakhir Bapak Ibu kami juga mendapat pertanyaan dari KH.Asep Afandi bagaimana tertera di halaman 44 dan 45, kami tentu harus secara intensive untuk mensosialisasikan program-program DAS AL kepada masyarakat, terakhir sosialisasi yang kami lakukan kami menggunakan medsos Pak supaya ini sekarang mudah diterima masyarakat menggunakan influencer yang mempunyai followers paling banyak, sehingga dengan itu maka kaum-kaum milenial bisa bergerak

untuk menanam dan mengikuti program-program yang kami lakukan. Dan tentu program pemberdayaan masyarakat Pak kami juga sebagaimana tertera dihalaman 45, kami pemberdayaan masyarakat kami, kami berusaha salah satu yang paling baru yaitu mengenalkan tanaman maka damia sebagai pengganti tanaman untuk sayur-sayuran yang sangat besar erosinya, jadi merubah petani dari pola tanaman dari petani sayur menjadi petani maka damia yang hasilnya pasti lebih besar dari pada tanaman sayur itu sendiri.

Demikian **Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu yang terhormat**, mohon maaf.

Billahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Sebelum merintah Bu Menteri saya tawarkan kepada Bapak dan Ibu, karena jawaban para Eselon I ini sudah tertulis, apakah masih harus dilanjutkan atau masuk sesi tanggapan?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Ketua intrupsi Ketua,

Kalau saya pribadi melihat bahwa jawaban dari KLHK sudah cukup lengkap ya, lengkap sekali, malahan kalau teman-teman ada yang mungkin mau pendalaman ok tidak terlalu jauh lah ya, karena toh nanti kita akan adakan juga FGD nantinya Ketua. Jadi kalau saya pribadi sudah menerima ini dan memang ada beberapa yang perlu kita diskusikan ya, tapi nanti ya Bu Menteri ya dan para Dirjen masih banyak waktu yang lain.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bagaimana setuju ya sepakat ya?

Langsung tanggapan, tanggapan anggota?

Sebentar, set kanan dulu,

Silahkan.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Begini Ketua, kalau saya tidak salah ada pertanyaan saya dulu kok tidak ada jawaban Pak Ketua, ini aneh saya rasa. Apakah ada diskriminasi karena saya orang Aceh makanya saya bingung ini Ketua bagaimana meneruskannya, Pak Andi bilang sudah lengkap.

KETUA RAPAT:

Iya biar Bu Menteri nanti yang menyampaikan, yang belum terjawab secara tertulis.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Dan tidak ada jawaban disini Pak Ketua, apakah saya salah engga bertanya dulu ini saya juga bingung Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak.

ANGGOTA KOMISI IV:

Iya terima kasih Pak Ketua.

Kalau saya ini ada pertanyaan saya ditertulisnya ini tidak sesuai dengan pertanyaan saya ini, sehingga jawabannya tentu saja diluar apa yang kami inginkan.

Nah ini bagaimana ini?

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ada dua pertanyaan,

ANGGOTA KOMISI IV:

Tiga Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh tiga.

ANGGOTA KOMISI IV:

Jadi saya juga sama Pak Salim, waktu itu saya minta data-data juga dan itu sebenarnya dan ga ada jawabannya, gitu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sudah hanya tiga.

Oh iya silahkan Bu Menteri ada tiga yang belum terjawab dan satu, ada dua yang belum terjawab dan satu perlu diluruskan, kan gitukan, setelah itu tanggapan karena ada 30 yang ingin memberikan saran, 21 ini yang terdaftar saya akan mengefektifkan waktu bagaimana taktik 3 menit menjadi 1 menit, 1 anggota 1 menit, nanti Ibu Menteri tanggapannya 1 menit sehingga 1 jam selesai tidak ada tambahan waktu, setelah selesai Paripurna bisa istirahat di rumah masing-masing, nah biar engga jenuh inikan.

Iya diluruskan satu, nanti yang dua langsung dijawab.

Pertanyaan dua anggota yang terhormat ini.

Silahkan, satu menit Pak.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu Menteri.

Pertanyaan kami itu sebenarnya disini tertulis di Temanggung dan Wonosobo ada industry bencok untuk dimasukkan dalam skema Perhutanan Sosial, maksud kami itu bukan industry bencok, ini adalah industry berkori, berkori ya. Industry berkori ini adalah industry kayu ringan ya untuk bahan isian dari panel-panel kayu. Ini industry ini dulu ada di Kementerian Perindustrian berdasarkan PP 1785, dilimpahkan ke Kementerian Kehutanan, nah lebih lanjut industry ini masuk ke Undang-Undang Kehutanan, sehingga clear industry ini masuk dalam pembinaan Kementerian Kehutanan. Ini industry sangat melibatkan masyarakat banyak ini, ini tumbuh kebetulan di Jawa dan khususnya di Dapil saya, itu di Temanggung aja ada 37 perusahaan, di Wonosobo itu ada 7 perusahaan, di Magelang itu ada 17 perusahaan, di Purworejo ada 6 Perusahaan, dengan total yang ada di industry saja tidak kurang dari 25.000 tenaga kerja, belum terlibat petani-petani atau penanam bahan baku dari abasia atau kayu sengon ini Bu Menteri, jadi menggerakkan ekonomi pedesaan betul-betul itu. Jadi mohon ini bisa lebih dibina, karena ini seperti tidak ada yang membina selama ini, jadi diserahkan ke Pemda Kabupaten akhirnya izin-izin dikeluarkan semanya saja, terjadi over suplay dan harga dipermainkan, harga inikan keseluruhannya di ekspor ini ke China dan dengan over suplay itu harga kemudian menjadi jatuh dan banyak yang tutup saat ini. Nah memang di beberapa Kabupaten seperti di Temanggung dimoratorium oleh

Bupati, tapi karena skalanya hanya Kabupaten, jadi di Kabupaten itu di moratorium tapi di Kabupaten semula masih berdiri industri lagi sehingga ini jadi kaya percuma, saya kira ini kalau bisa ditangani oleh Kementerian Kehutanan sangat sayang ini industri ini karena melibatkan banyak sekali tenaga kerja, baik di industri maupun dimasyarakat pedesaan.

Saya kira ikut yang kami maksudkan.

MENTERI LHK:

Terima kasih.

Yang terhormat Pak Panggah.

Memang barkor ini itu sangat tromising, kemudian yang paling banyak minta adalah Timur Tengah Bapak, disisi lain di Jawab itu mutase kayu rakyat, hutan rakyat itu 9 juta meter kubik pertahun, jadi yang ditebang dan ditanam kayu rakyat itu 9 juta dan rata-rata sengon. Jadi saya mendukung Bapak dan kita memang kami baru mengerluarkan Peraturan Menteri yang baru Bapak Permen 62, tugasnya yaitu untuk mengatur hal-hal yang seperti ini kalau perlu dimasyarakat yang banyak langsung ada klasternya yang baik, jadi kami perhatikan Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Silahkan Tengku.

Pertanyaan apa yang belum di jawab?

F-PKS (drh. SLAMET):

Saya kira begini Ketua, saya pun, mereka pelupa, saya pun juga lupa ini Ketua.

Sebab begini Ketua kalau saya tidak salah, ini saya ciduk banyak Ketua, saya yang bertanya banyak dengan beliau, artinya kalau beliau lupa saya sudah enda ingat Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya tafakur dulu sejenak.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Kalau saya minta data 2018 itu terutama korporasi yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pembakaran hutan dan tindakannya, nanti akan kita bandingkan ditemukan 2019 dan polanya, jadi karena itu kita minta data dan tidak dijawab sekarang tidak apa-apa.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bapak dan Ibu sebagaimana saran dan pendapat tadi bahwa jawaban cukup jelas dan diterima semua jawaban atas pertanyaan maka, hari ini saya akan memberikan kesempatan untuk tanggapan kepada 21 yang sudah mendaftar kita sepakati, bagaimana tidak memanfaatkan tatif 3 menit, cukup 1 menit sehingga 30 menit selesai, 30 menit jawaban, iya 1 menit setengah, maksimal 2 menitlah.

Silahkan Ibu Luluk Nurhamidah.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Pak Ketua, jadinya pertanyaan saya memang kalau memang begitu engga dijawab saya engga usah masuk lagi kapan Bu Ketua, saya perlu ketegasan dari Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya nanti dibuka rekaman.

Silahkan-silahkan Bu Menteri.

MENTERI LHK:

Iya saya akan cek juga dicatat saya, karena inikan juga disiapkan oleh team. Tapi saya akan cek yang catatan saya, saya biasanya mencatat juga atau sekaligus nanti dicek risalah aja karena kan setiap sidang ada risalahnya.

Terima kasih Ketua.

Saya minta maaf kelalaian ini.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Tengku beliau kan sudah minta maaf beliau dan menunggu nanti risalahnya dievaluasi kembali termasuk yang belakang ini.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Maksud saya begini Ketua, itu dimaafkan Pak Ketua cuman, kalau bisa ini ada sekaligus saya ulangi pertanyaan dengan tanggapan ini saya yang pertama lagi Ketua kalau Ketua izin.

KETUA RAPAT:

Ohiya silahkan.
Sudah ingatkan?
Ibu Luluk ngalah dulu, seorang Ibu ngalah dulu.
Silahkan Tengku.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Baik Pak Ketua,

Ibu Menteri yang kami hormari, Wamen, para Dirjen semua.

Kalau saya tidak salah dulu Bu pertanyaan saya mungkin cuman saran, ada perhutanaan masyarakatnya sudah di SK kan di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, namun karena ada pegiat dari pada Lingkungan Hidup memprotes ada rapat dilakukan di Hotel Finisuwila Jakarta. Yang saya maksud Bu dulu apa salahnya sebagai Putra Daerah kenapa umpamanya yang membuat itu Pak Dirjen atau Balai-nya tidak mengundang saya sebagai Putra Daerah?

Itu saja cuman pertanyaan saya itu Bu.

Mungkin Ibu lupa.

Yang kedua Bu,

Saya ini padahal anggota yang paling rajin mendampingi Pak Wiratno Bu, minggu yang lalu kami ke Aceh, Pak Wiratno bayar sendiri saya pun bayar sendiri tidak dibebankan ke anggaran dari pada Kehutanan, makanya saya kecewa Ketua engga ada jawaban. Ini Bu Pak Wiratno ikut ada laporan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh Tenggara, kepada Menteri Lingkungan Hidup SQ Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan, ada proyek di Kabupaten Aceh Tenggara Bu lengkap dengan foto-fotonya yang dianggap ini ada penyimpangan. Mohon kiranya kepada Ibu Menteri ini nanti seizin Ketua saya akan memberikan berkas pengaduan dari masyarakat langsung.

Selanjutnya Bu ada yang kedua,

PLTM Lawe Sikap, Pak Wiratno ada saksi hidup pembangunan PLTM Lawe Sikap setelah kami tinjau langsung ada laporan dari Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang diikuti langsung oleh Wakil Bupati Pak Ketua, pembangunan sebuah PLTM akibat sebuah pembangunan tersebut ada intek PDAM Kabupaten Aceh Tenggara terganggu dua intek, Pemerintah Kabupaten sudah menyurati PLTM tersebut namun PLTM tersebut tidak ada upaya untuk mencari solusi agar intek tersebut bisa terhindar dari longsor akibat pembangunan PLTM tersebut, salah satu Dirjen Ibu ikut kelapangan.

Terima kasih Ketua, itu saja Ketua saya serahkan Ketua.

Maunya difoto Ketua.

KETUA RAPAT:

Silahkan TA-nya foto, laporan ke Konsituen ini, biar 5 tahun akan datang tanpa mahar.

Belum selesai kok difoto, oh sudah.

Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kesepakatan kita saya akan memberi kesempatan kepada semuanya.

Silahkan menurut satu ini nomor wahid Ibu Luluk Nurhamidah Jombang Solo, silahkan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Iya terima kasih Ketua, Ibu Menteri dan semua jajaran yang hadir.

Ini sebenarnya ada 3 persoalan yang ingin saya sampaikan, bagaimana membaginya menjadi 1 menit.

Yang pertama dihalaman 10 Ibu, jadi ini yang agak cepat-cepat saja itu yang terkait dengan hasil temuan BPK ya bahwa ada 27,52 miliar tidak diketahui keberadaan peralatan dan mesin.

Ini pertanyaan saya simple Ibu, bagaimana sih sistim inventarisasi Kementerian sehingga kemudian ada asset-asset ini yang nilainya yang begitu besar tidak diketahui keberadaannya, apakah ada kemudian gudagaan sementara internal karena ini terkait juga dengan pengawasan dan pengendalian internal yang memungkinkan Ibu bisa sampaikan di dalam forum rapat kita kali ini, dan apakah kemudian BPK juga mengkategorikan ini sebagai salah satu temuan yang harus ditindak lanjutin, dan ini termasuk temuan yang sangat serius.

Kemudian yang terkait dengan Tora, nah terkait dengan Tora ini karena waktu itu saya mau menanyakan engga boleh karena menunggu waktu yang tepat, nah waktu yang tepat itu sekarang jadi mohon dispensasi waktunya Pak Ketua. Ini dari beban yang diberikan untuk Kementerian ada 4,1 juta hektar ya kalau tidak salah. Apakah ada evaluasi dan monitoring yang sudah dilakukan dari total distribusi tora ini, ini kira-kira

ada penyimpangannya apa engga, ada yang menerima ini benar apa engga karena apa, karena potensi penyimpangan itu bisa aja yang pertama adalah penyimpangan prosedur itu mulai dari soal objek tanah mana saja yang akan dibebas, kemudian pemanfaatnya siapa yang terima dan seterusnya. Yang kemudian adalah soal kemungkinan penyimpangan adanya pungli, itu sudah umum juga dikalangan masyarakat bahwa untuk menerima hak itu ternyata juga tidak bisa bebas tuh. Kemudian yang ketiga adalah soal kewajiban hukum, nah ini instansi mana saja yang kira-kira memang harus terlibat secara langsung agar pelaksanaannya Tora ini bisa dieksekusi, mengingat tidak ada satu secara kelembagaan ya secara khusus menangani apa yang diinginkan oleh Presiden pada waktu itu sehingga 9 juta Tora ini benar-benar bisa dilaksanakan, 63% distribusi, ini berarti belum 100% di 2019, hambatannya apa, jadi hambatan dari mulai administrasi, mungkin hambatan soal pelaksanaan atautkah lain-lain yang kita juga perlu tau jadi 63% itu hambatannya apa, sementara masyarakat menunggunya sudah lama. Kalau sementara dari catatan kami dari beberapa yang disampaikan teman-teman yang diluar yang memang sudah sekian tahun mengawal isu Reforma Agraria, ya memang kelibatan dari masyarakat kelompok-kelompok ini tidak cukup dilakukan, artinya bahwa pendekatan ini masih top down dari apa yang Pemerintah mau tetapi tidak mempertanyakan kepada masyarakat yang dibawah atau pun para pendamping dan pegiat yang semala ini memang sudah berjuang begitu lama yang terkait dengan isu Reforma Agraria.

Nah yang paling penting lagi adalah kemungkin yang dikhawatirkan bahwa akan ada modus dari corporation dari perusahaan yang memanfaatkan ini dengan alasan bahwa rakyat yang diberikan hak untuk memanfaatkan lahan itu karena engga segara mungkin dimanfaatkan sehingga perusahaan ini direct kemudian melakukan persuasi kepada kelompok masyarakat dan mereka juga yang akan pake. Nah hal-hal yang seperti ini apakah kemudian cukup menjadi antisipasi dan temuan dilapangan?

Yang terakhir ini karena waktunya satu menit adalah terkait dengan impor limbah Ibu, saya dari awal sampai akhir sebenarnya nunggu betul bahwa adanya semacam repot, apa yang hari ini dunia yang sedang prihatinkan atas apa yang hari ini mungkin semua orang sudah viral ya dimana-dimana, mulai dari yang desa bangun yang ada di Mojokerto, kemudian di Tropodo yang ada di Sidowarjo, bagaimana ada limbah sampah plastic dan itu berbahaya yang kemudian ketika dilakukan test telornya kadar dioksitnya dioksinnnya itu sudah yang kedua terbesar setelah temuan yang sama itu dilakukan di Vietnam, sementara Vietnam itu adalah bekas bom atom yang dilakukan oleh America. Inikan mengerikan sekali, ada apa dengan Pemerintah kita nuwun semu Ibu. Ketika selalu tidak hadir ketika ada persoalan yang seperti ini, apakah karena memang tidak sehebat isu-isu yang lain, lebih agak hawatir lagi karena Kementerian Ibu inikan dibawah Maritim tapikan disitu plusnya ada investasinya gitu, ketika ini misalnya diungkap apakah dianggap nanti akan mengganggu investasi sehingga hal yang seperti ini tidak diungkapkan gitu, sementara kalau itu korbannya sudah ada. Saya

kalau perlu mengusulkan kepada Pimpinan, kalau sekiranya ini dianggap lebih penting yang lain bukan dianggap tidak penting, misalnya kunjungan spesifik yang ke Bali atau di tempat yang lain, kenapa si tidak kita perlukan untuk kunjungan itu di dua titik ini itu, karena ini sudah kejadiannya bertahun-tahun Pak, sampai orang sudah berahli fungsi dari yang semula dari petani kemudian menjadi mulung plastic. Ada pabrik tau, ya pabrik tahu tapi itu sebenarnya itu produksi rakyat juga yang kemudian menggunakan bahan bakar plastic, kemudian yang tahunya pun juga tercemar.

Kemudian yang namanya ayam-ayam itu juga memakan dari sumber yang terdekat dari mereka karena ini ayam kampung yang dikurung jadi kemudian telurnya tercemar, siapa yang makan telur ini, bisa dipastikan nggak kalau telur ini sudah nyampe di meja makan kita.

Memang lebih Pak karena saya enggak melihat ada perhatian serius dari Pemerintah, saya mengusulkan harus ada nih panjang tentang limbah plastic tercemar dan kalau perlu diagendakan Pak Ketua untuk kunjungan Komisi IV ke desa Bangun atau Tropodo, itu yang paling penting terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih,
Nanti Rapim Komisi IV Pimpinan.
Terima kasih Bu Lulu.
Silahkan Bu Endang, 1 menit setengah Bu ya.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Baik terima kasih.

Pak Ketua dan Bu Menteri yang saya hormati.

Mungkin tadi bicara kan oleh Bu Lulu.

Yang kedua saya ingin mempertanyakan tentang konflik sawit di wilayah perbatasan Bu, nah inikan juga merupakan polemic di masyarakat kita karena sebetulnya Ibu tadi dengan Tora dan Hutan Sosial sudah membuat perencanaan yang bagus, tapi ternyata konflik-konflik di daerah perbatasan ini yang tujuannya juga bagus masih terjadi, nah mohon dijelaskan apa usaha-usaha untuk menangani hal ini, sehingga para konglomerat kita yang menguasai kelapa sawit menyadari bahwa hal tersebut harus ada peraturan-peraturan yang memvonis mereka dengan tegas.

Yang kedua Bu masalah limbah ini. Jadi Kebetulan saya dari Dapil Jabar 3 meliputi Cianjur, disana Bu warga Ciherang menuntut penyelesaian sumur yang tercemar bensin. Yang sampai sekarang itu menjadi polemic, malah ada beberapa mahasiswa HMI yang beraksi meminta agar pihak terkait segera menangani masalah

tersebut. Nah jadi kalau Ibu berkenan mohon di turunkan tim supaya mereka puas, karena sampai hari ini belum ada yang bisa menyelesaikan permasalahan ini.

Yang kedua tentang penyerahan 13.900 hektar SK hutan rakyat di daerah Cianjur, nah ini ternyata juga menjadi polemik karena daerah setempat terutama Pemda nya tidak menghayati tujuan dari pemanfaatan hutan sosial tersebut, nah sehingga tidak dimanfaatkan dengan optimal. Nah alangkah baiknya kalau ada koordinasi apalagi tadi Ibu bagus sekali kalau bisa bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri, karena di sana Bu terutama, mohon maaf ini karena saya perempuan, banyak sekali TKW-TKW dari Cianjur yang kehidupannya sangat memprihatinkan dan tenaga kerja perempuan di sana ini tidak dihargai dengan baik setelah pulang dari Saudi Arabia. Nah ini kan kesempatan yang baik untuk mengentaskan kemiskinan dan juga menciptakan lapangan kerja yang baru, apalagi Bu sana di Cianjur itu dekat dengan balai-balai penelitian yang dikoordinasi oleh Kementerian Pertanian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ibu Endang 1 menit setengah saya hitung tadi.

Silahkan Adinda Yessy, 1 menit setengah maksimal.

F-NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Siap Pak Ketua.

Baik terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Ibu Menteri beserta jajaran.

Mungkin saya langsung saja mencoba memanfaatkan waktu yang hanya 1 menit. Sedikit menindaklanjuti jawaban tanggapan atas pertanyaan saya pada raker yang lalu, saya bertanya tentang relevansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah disitu kemarin saya ingin menceritakan tentang, kenapa Undang-Undang bagi saya begitu penting Bu, karena ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak masyarakat kami di Kalimantan Barat yang notabenehnya masih petani dengan cara membuka lahan dengan cara dibakar, dan di situ saya melihat salah satu Pasal, Pasal 69 Ayat 1 kalau tidak salah, itu sudah jelas kali beberapa point larangan, salah satunya adalah membakar lahan yang tidak diperbolehkan dan di Pasal 2 dengan catatan memperhatikan kearifan lokal daerah setempat dan itu hanya ada pada penjelasan. Dan ingninnya saya kalau memang bisa tapi nanti kita coba diskusikan, apakah tidak baik ini direvisi dengan catatan untuk

penguatan, karena sepertinya Undang-Undang ini tidak tepat lagi untuk menjadi payung hukum bagi masyarakat kita di daerah, dan pada saat ini gejolak masih sangat besar terjadi di Kalimantan Barat Ibu Menteri. Jadi kalau mungkin rekan-rekan semua sempat membuka di media sosial salah satu di Facebook itu viral sekali, saat ini masyarakat adat sedang berusaha memberikan dukungan moril kepada peladang 6 orang yang sedang ditahan dan ini yang dikenakan mereka adalah Pasal 69 Ayat 2 ini. Ini kan bagi saya lucu sekali di satu sisi, Pemerintah kita berharap berpikir keras sekali memikirkan solusi bagaimana kita menciptakan ramah lingkungan, menciptakan kelestarian lingkungan hidup tetapi ini tidak linier dengan masyarakat kita di daerah, mereka justru menangis dengan pola kita seperti ini berarti masih ada yang tidak beres menurut saya.

Dan saya berharap Komisi IV dan Kementerian terkait ini bisa mendorong mungkin revisi ini Undang-Undang-nya untuk penguatan, mungkin ditambah Pasal saja yang mengatur secara jelas kearifan lokal disitu ditambah batas maksimal 2 hektar kita berlakukan, sekat batas bakar juga kita tuliskan di situ, bila perlu izin membakarnya juga kita cantumkan seperti apa mekanismenya, tingkatan yang levelnya di Desa atau di Kecamatan atas sampai di Kabupaten. Ini harus jelas supaya masyarakat kita tidak bingung, seperti sekarang ini moral mereka luar biasa terobrak abrik dengan bayangkat masyarakat yang tidak tahu apa-apa mereka punya tanggung jawab hidup, punya beban dengan solusi yang diberikan Pemerintah katanya cetah sawah, tapi kalau kita lihat program kita sawah ini saya tidak tau, 5 tahun 10 tahun dan bisa berjalan dengan baik atau tidak khusus di daerah kami di Kalimantan Barat dan ini belum bisa dijadikan salah satu solusi konkrit saat ini untuk mengatasi tentang persoalan yang terjadi di daerah kami.

Mungkin itu **Ibu Menteri yang saya hormati dan Pimpinan.**

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Johan Rosihan, oh ke DPP iya.

Sulaiman Hamzah Lesu.

F-NASDEM (SULAIMAN L. HAMZAH):

Terima kasih,

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati dan seluruh jajaran.

Pertama saya sampaikan selamat kepada Kementerian LHK yang tahun 2018 memperoleh opini WTP sama dengan tahun sebelumnya tahun 2017, tentu harapan kami temuan hasil pemeriksaan yang sudah diberikan BPK dapat ditindak lanjuti.

Kemudian dalam forum ini saya ingin sampai kinerja penyerapan anggaran dari LHK 2019 di halaman 17.

Rata-rata realisasi anggaran Kementerian KLHK baru mencapai 66,2% dibawah rata-rata nasional yang sebesar 73,4%, dengan peringkat 64 dari 83 Kementerian dan Lembaga, bahkan terdapat satu Dirjen yang realisasi anggarannya baru sebesar 52,70% yaitu Dirjen PDAS AL, dan 48,57% dari Badan Restorasi Gambut.

Mohon Bu Menteri dapat menjelaskan kenapa realisasi anggaran tahun 2019 per-14 November itu masih belum optimal, itu yang kedua.

Yang ketiga terkait dengan hasil perumusan kesimpulan rapat tanggal 26 November. Tercantum disitu bawah ada indikasi areal dan data perusahaan kebun sawit illegal dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia termasuk Papua, barang kali ini merupakan kesimpulan rapat dan sedapat mungkin Bu Menteri bisa menyerahkan atau menjelaskan pada forum terhormat ini.

Yang berikut masih berkaitan dengan hasil rapat kita sebelumnya, ada sejumlah dokumen yang saya serahkan langsung pada waktu itu, yaitu masyarakat adat yang mengklaim tentang daerahnya dijarah oleh perusahaan dan sampai sekarang tidak mendapat penyelesaian yang baik, sehingga dokumen yang diserahkan itu barang kali sudah sejauh mana tindak lanjutnya, mohon bisa dijelaskan pada forum ini.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Pak H. Sutrisno, 1 menit setengah Pak maksimal.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Bu Menteri dan jajaran langsung saja.

Hampir mirip dengan Pak Hamzah,

Saya memberikan apresiasi atas tranparansinya mengsikapi laporan LHP BPK 2018, dengan tegas, lugas Ibu Menteri segera mengambil langkah, dan selamat dengan memperoleh WTP dua tahun berturut-turut.

Yang kedua evaluasi kinerja 2019, tentunya ini kinerja keuangan. Pagu anggaran 9,215 triliun, realisasinya 6,19 triliun, ini belanja publiknya itu hanya 58,9%. Saya menyorotin ini kurang responsip terhadap kepentingan rakyat, ini ditengarahi oleh

rendahnya belanja public Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi hanya 20,2% ini stak sampai akhir tahun sudah tidak ada kegiatan apa-apa 20,2%.

Kemudian dari Dirjen Pengolahan Sampah, ini belanja modalnya 12,7%, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016 merilis bahwa sampah di negeri kita itu terbangun 65 juta ton dan dalam penambahan yaitu setiap tahunnya 1 juta ton. Mestinya ini program sangat utama untuk diprogramkan.

Kemudian dari Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, ini belanja modalnya 50,3%. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan mestinya ketiga-tiganya itu, itu menjadi program unggulan utama. Oleh karena itu sarannya adalah agar menjadi perhatian utama dalam menganggarkan ditahun 2020 ini, agar sungguh-sungguh memperhatikan apa yang diarahkan oleh Presiden, karena semua anggaran itu kan harus ada jaminan penggunaannya focus, tepat sasaran, tepat arahnya memiliki dampak ekonomi, kemudian juga memberikan manfaat buat rakyat dan kesejahteraan rakyat.

Dan terakhir Pak Pimpinan saya hanya mengingatkan RAPBN 2020. Ini dari program Nasional Kementerian LHK mendapatkan anggaran 4,9 triliun, itu untuk Direktur Jenderal Pengendalian DAS, Direktur Jenderal apa namanya (KPSDAE), total anggaran semuanya itu apa namanya dengan yang ada apa namanya di Dirjen itu, itu 0,78 triliun untuk konservasi SDASE dan Dirjen ini secara keseluruhan mendapatkan anggaran 2,049 triliun, ini program yang sangat luar biasa. Saya dari Dapil Jawa Barat 9 Pak. Mengingatkan kembali kemarin Hutan Lindung yang Taman Nasional Gunung Cermi kebakaran, perlu diketahui menurut Kepala Balai Taman Nasional Gunung Cermi panorama alam di Hutan Gunung Cermi itu lebih indah dari panorama di Gunung Bromo. Tapi saya buka-buka tidak ada itu konservasi rehabilitasinya itu, disisi lain pertanyaan yang tanggal 6 itu saya sebenarnya memancing pertanyaan, karena banyak galian tambang terutama galian C di Jawa Barat itu, nah ini ada Direktur Utama Hutani-nya, itulah tidak ada yang memperbaiki, walaupun tadi dikatakan ada jaminan itu. Makanya alasan inilah kenapa ya Pimpinan DPR RI Komisi IV ya sangat tepat manakala Lingkungan Hidup itu di Komisi IV supaya dijamin reklamasinya ke depan di jaga dan dipelihara.

Saya mohon untuk diusul saja Pak Pimpinan, iya kalau mungkin kita bikin Panja lah kita mengkaji bagaimana program-program yang sudah dirumuskan, jangan kemudian di dalamnya tidak ada itu Pak, bagaimana mempertanggung jawabkan pada rakyat yang telah menilik saya untuk hadir ditempat ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Firman, dan siap-siap nanti Pak Andi setelah Pak Firman.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Karena jam 4 kita ada Paripurna, saya di WA jam 4. Jadi waktu saya, saya hibahkan kepada yang lain dan nanti pertanyaan saya mau WA saja ke Bu Menteri dan ke Pak Sekjen.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Andi satu menit saja, karena waktu sudah Paripurna kan ini, yang belum tertulis saja kan ini.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Iya Pak Ketua.

Pertama anggaran LHK saya kira Ketua perlu kita tingkatkan kedepannya ya, karena 9 triliun itu sangat kecil ya untuk mengatasi masalah lingkungan dan kehutanan.

Yang kedua Bu Menteri saya ini juga ada beberapa masukan dari Riau ini mengenai masalah system pengawasan untuk limbah ya, terutama untuk pabrik-pabrik yang bahan bakunya dari kayu. Iyakan jadi, kita ingin memastikan apakah memang kayu itu berasal dari hutan tanah industry mereka atau dari hutan yang dirambah gitu, ini saya kira perlu audit gitu yang cukup dalam. Kemudian yang kedua bagaimana dari si input dan outputnya gitu dari pabrik ini, kita tau masyarakat banyak mengeluhkan keberadaan pabrik ini terhadap limbah-limbah saya kira ini perlu juga karena, insyaallah nanti Pak Ketua saya usulkan nanti kita kurspek nanti ke Riau untuk melihat masalah ini.

Kemudian itu saja kedua karena satu menit, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Jadi ada tiga usul unspik nanti biar dicatat, termasuk Bu Luluk tadi walaupun bukan Dapil karena Perintah Bu Nusahbani ya.

Iya Jawa Timur saya nanti, oh iya.

Pak Andi sudah, selanjutnya mungkin dua penanya, Pak Muchtarom, silahkan Mbah Muchtaro, engga ada Pak Tarom?

Sebentar-sebentar,

Pak Budhy Setiawan?

Pak Budi tidak ada,
Oh ada silahkan Pak.

F-PG (BUDHY SETIAWAN):

Iya terima kasih Pimpinan.

Engga banyak, pertama menyangkut soal perhutanan social saya ingin data yang lebih kongkrit mengenai dampak terhadap pendapatan hutan kemasyarakatan ini. Di dalam data Ibu menyebutkan rentang pendapatan satu juta sampai dengan sekitar 20 juta pertahun, itu sekitar 53,5% dari peserta hutan kemasyarakatan. Kalau 20 juta pertahun sekitar 1,6 juta perbulan, berarti garis kemiskinan kita masih diangka 1,9. Jadi saya ingin data yang lebih kongkrit, tidak rentan yang terlalu jauh, antara 1 juta sampai 20 juta terhadap pendapatan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak dan Ibu.

Karena saya diingatkan oleh Pak Mindo dan Pak Firman bahwa kita kedekatan Paripurna, saya memberikan kesempatan terakhir dan selebihnya ini catatan ansilema.

Sebentar-sebentar ini dulu, saya takut diprotes nanti dibaca di depan mana absennya.

Nomor 11, silahkan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Bu Menteri Selamat Siang, Menjelang Sore.

Saya mau klarifikasi dulu, Yohanis Fransiskus Lema Ansilema dari PDI Perjuangan Bu, karena disitu salah ditulis Partai Demokrat, harusnya PDI Perjuangan Bu saya.

Saya bicara soal Taman Nasional Komodo Bu, jadi pengelolaan Taman Nasional Komodo ini kita ketahui sepenuhnya ada di otoritas LHK Bu dan perpanjangan tangan di lapangankan ada Balai Taman Nasional Komodo dan itu implikasinya semua pendapatan ini pendapata negara yang bukan pajak itu masuk Kementerian Ibu 2017 ada sekitar 29 miliar, 2018 ada sekitar 32 miliar Bu. Nah disisi lain kemarin Pemerintah Pusat juga membentuk yang namanya Badan Otorita Pariwisata, tujuannya juga untuk mempercepat ekonomi dan kemudian membuat regulasi dan birokrasi itu menjadi lebih efisien dan efektif.

Nah pertanyaan saya Bu, ini Pemerintah Daerah dan Rakyat di Manggarai Barat ini dapat apa dari hal ini Bu. Padahal kalau kita bicara Bu Presiden Republik Indonesia ini punya dua tangan, satu tangan Kementerian di Pusat dengan berbagai negara, satu itu Kementerian Daerah Bu. Nah saya baca ada peraturan Presiden dan juga kalau tidak salah di Kementerian Ibu itu bisa mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), nah apakah ini mungkin untuk dilakukan?

Yang kedua Bu kordinasi antara Kementerian Ibu dengan Pemerintah Daerah beberapa waktu lalu, terkait dengan konservasi masyarakat NTT itu resah Bu karena ada pernyataan dari Pemerintah Provinsi yang akan melakukan penutupan terhadap Taman Nasional Komodo dan melakukan relokasi terhadap masyarakat disana, tetapi Dirjen yang membidangi masalah ini mengatakan, otoritas sepenuhnya ada di KLHK. Kami ingin mendapatkan jawaban yang resmi.

Terakhir Bu, ada tiga desa yang masuk dalam zona peyangga di Taman Nasional Komodo Bu, karena masuk dalam Zona Peyangga berarti bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Bu. Konsekuensinya Bu mohon maaf, pendidikan mereka tidak diurus, air, listrik semua dilepas begitu saja oleh Pemerintah Manggarai Barat. Nah ini bagaimana kira-kira yang bisa dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terakhir Bu Dirjen, sampah Bu, saya baru beberapa waktu lalu ke Labuan Bajo, Bu mengerikan Bu sampahnya Bu, tolong itu TPA-nya itu sudah tidak mampu lagi menampung ada angkanya yang saya catat luas TPA-nya cuman 25m x 90m, sementara sampah perhari 112,4 meter kubik atau setara 12,8 ton, itu baru di Kota Labuan Bajo Bu belum sampah-sampah yang di laut itu dan ini mengerikan.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak dan Ibu ini karena waktu, karena ada Paripurna ini.

Sebentar, ini banyak karena ingin bertanya semua dan sedikit semua ini.

Atau dilanjutkan selesai Paripurna?

Sebentar dulu,

Sepakat selesai Paripurna ya?

Kata, pertanyaannya tertulis.

Oh jawabannya tertulis nanti setelah Paripurna ya.

Sebentar dulu, kita sepakati jam berapa ini selesai tanggapan anggota?

Setengah lima ya, saya tambah 15 menit. Karena menurut info ada Pak Mindo jam 4, yang sebelah bilang jam 5 Paripurna. Kita sepakati sebagaimana awal 16:30, biar ada kesempatan sholat Ashar, lanjut Paripurna.

Silahkan selanjutnya Pak Bambang Purwanto, monggo Pak.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Bismillahirrohmaanirrohiem

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Langsung saja ini Pimpinan.

Terkait dengan masyarakat yang ada dikawasan hutan, kemarin juga saya tanyakan. Yang mau dilepas oleh KLHK itu kan HPK, sedangkan masih banyak masyarakat yang di Kalteng itu yang tinggal dikawasan hutan produksi, ini mohon kiranya bisa dilepaskan karena Kementerian lain engga bisa masuk.

Kemudian terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Harapan kami dari KLHK ini focus kelahan gambut, sementara yang sudah dilakukan membuat kanal dan skat kanal ini menurut hemat saya pengalaman di lapangan ini lebih cepat terjadi kekeringan dilahan tersebut. Kemudian juga dibangun sumur, ketika juga ditengah lahan gambut ini juga akan berpengaruh mengalami kesulitan petugas yang ada disana. Kami mengusulkan setiap lahan gambut ini tentu ada sungai-sungai besar yang ada disekitar lahan gambut, kalau memungkinkan ini dibuat hutanisasi dengan disel yang besar langsung ditarik kedalam, mungkin ini lebih efektif ketimbang yang ada pada saat sekarang ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Satu menit setengah.

Silahkan Bu Vita, setelah itu TA Khalid.

F-PDIP (VITA ERVINA, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Bu Menteri dan beserta jajarannya.

Sedikit saja dari saya terkait KLHK ini memiliki satuan kerja dari sekolah menengah kejuruan kehutanan ya yang dibawah penyuluhan pengembangan dari sistim SDM, betul ya, ini punya alokasi dananya sekitar 100 miliar gitu ya setiap tahunnya, nanti ditahun 2020 ini kelihatannya naik 157 miliar, betul? Dan ini saya lihat potensinya sangat besar karena setiap tahun memiliki SMK-nya ada 5 di Samarinda, kemudian ada juga di Pekanbaru, di Majalengka juga ada di Kabupaten, kemudian juga ada di Manuklari saya lihat setiap tahunnya menghasilkan pendidiknya ada sekitar 431.

Harapannya ini para sekolahnya ini bisa difungsikan potensi SDM-nya ini menjadi penyuluh kebakaran hutan, apalagi sekarang kita kan lagi sedang bermasalah dengan kebakaran hutan. Ketika kebakaran hutan ini terjadi mereka memiliki pendidik kehutanan yang sangat mumpuni kenapa mereka tidak dilibatkan saja, karena ketika mereka sudah lulus mereka kelihatannya tidak diserap dengan baik lulusan dari mereka, ini patut di evaluasi dari Kementerian, ini yang disorotin dari kami.

Kemudian yang kedua terkait dengan sampah Bu Menteri, ini sejalan dengan visi Presiden juga dengan KSPN (kawasan strategis pariwisata nasional), kalau pariwisatanya besar Sampah juga ikutan terserap bisa membawa orang tanpa juga naik masuk bagaimana pengolahan sampah nya juga harus dipikirkan, tolong pengelolaan sampah nya dipikirkan juga untuk dibuatkan lagi anggarannya ditingkatkan untuk pengolahan sampah yang modern di tempat-tempat KSPN tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oh iya setengah menit Pak.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Interupsi Pimpinan, Pimpinan, sebentar ada yang ketinggalan tadi, ini penting untuk Komisi IV semuanya.

Iya kami minta kepada Bu Menteri Peta Kawasan Hutan agar kami bisa melakukan Evaluasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silahkan TA Khalid.

Selanjutnya Krisantus.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Pimpinan beserta seluruh Anggota yang saya muliakan,
Bu Menteri beserta seluruh jajaran.**

Izinkan pada kesempatan kali ini Bu Menteri, sebagaimana yang kita pahami dan inginkan bersama pencegahan kebakaran hutan itu lebih baik dan lebih hemat dari

pada penindakan setelah terjadinya kebakaran. Maka izin bahwa di Aceh selama ini kebakaran hutan nyaris tidak ada di Aceh, bukan tidak ada api, tetapi pencegahan terus dilakukan baik sebagaimana yang saya pernah sampaikan ke Pak Dirjen waktu mendampingi kami ke Riau, bahwa pemanfaatan pendekatan social itu sangat efektif. Tetapi dibalik dari pada itu juga Polhut (Polisi Hutan) di Aceh juga sangat membantu untuk menjaga hutan baik dari kebakaran, maupun dari pembala liar walaupun masih ada juga illegaleging di Aceh. Namun, pada kesempatan ini saya meminta juga pada Bu Menteri dimana para Polhut yang jumlahnya hampir 2 ribu di Aceh yang sudah mengabdikan 12 tahun sampai hari ini belum pernah diperhatikan belum baik apalagi menjadi PNS, saya dengar informasi terakhir dari 2000 Polhut yang ada di Aceh yang menjadi PNS hanya sekitar 120 sekian, maka ini menjadi perhatian karena mereka juga bermanfaat untuk menjaga hutan dan lain sebagainya, kami minta kepada Bu Menteri ada sekian banyak Polhut yang tidak diperhatikan di Aceh agar dapat diperhatikan pada tahun-tahun yang akan datang.

Kemudian izin yang kedua, perlu kami sampaikan kepada Bu Menteri. Sebagaimana kita paham bahwa pada tahun 2005 paska tsunami dimana itu menjadi cikal bakal awalnya perdamaian Aceh berakhirnya konflik bersenjata di Aceh akibat disebabkan oleh kesepakatan perjanjian damai antara gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia (suara kurang jelas). Perlu kami sampaikan pada forum ini kepada Bu Menteri bahwa ada salah satu point dalam perjanjian damai MOU Action Q yaitu point butir 2.3.5 dimana Pemerintah Republik Indonesia berjanji akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai pada Pemerintah Aceh untuk tujuan memperlancar re-integrasi pasukan gerakan Aceh Merdeka dalam masyarakat. Perlu Bu Menteri ketahui sampai hari ini belum terealisasi dengan baik, maka pada forum di rapat ini saya berharap kepada Bu Menteri agar segera dapat diberikan lahan tersebut. Kalau tadi Ibu Menteri menyampaikan setelah berikan lahan harus kita perhatikan izin, kemudian setelah harus kita berikan dana kepada skombatan, bukan cuman menunggu mereka minta izin Bu, kita harus cari lahan memberikan izin, memberikan dana, kemudian kita bina agar kenapa, harapan dari pada integrasi perjanjian damai ini sehingga Aceh dapat aman, nyaman selamanya.

Terima kasih Bu Menteri.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Krisantus.

Siap-siap Pak Slamet.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri, Pak Wamen beserta jajaran.

Saya menanggapi pertanyaan saya pada RDP yang lalu.

Saya mau tanya dulu, ini siapa yang jawab?

Karena jawaban ini nyontek, menyontek pernyataan Sutopo pada tanggal 4 bulan September 2019 yang mengatakan bahwa, kabut asap yang terjadi wilayah Kalimantan Barat disebabkan oleh tradisi gawai serentak. Jawabannya disini sama persisis, sama persisis. Kebakaran ditimbul dari kebiasaan turun temurun, permasalahan karhutla yang ditimbulkan karena kebiasaan adat secara turun temurun contoh, gawai serentak di Kalimantan Barat bulan Juli sampai September.

Nah pada kesempatan yang berbahagia ini Ibu Menteri, saya mohon maaf, saya perlu menjelaskan esiensi dari pada daya, gawai daya, Pak Wamen paham. Gawai daya tidak bisa dihapus, gawai adalah ucapan syukur kepada Jumata, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah ucapan syukur terhadap hasil panen dalam hasil satu tahun, gawai tidak membakar.

Apakah kejadian Pak Sutopo terulang?

Makanya saya tanya siapa yang jawab ini?

Pak Sutopo diadat oleh orang Dayak pada waktu itu, mungkin Pak Wamen tahu kejadiannya. Dipanggil ke rumah Radang di Provinsi Kalimantan Barat, bayar adat kepada orang Dayak, ini persis pernyataannya persisi sekali. Jadi in bukan jawaban, ini nyontek, ini jawaban yang nyontek tidak perlu pemikiran, tidak perlu gagasan.

Apakah kejadian Pak Sutopo terulang lagi?

Nah cerita Dayak Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya orang Dayak, Dayak itu ada dua tipe. Satu Dayak pekerjaan yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan, mereka menjadi buruh disana, perusahaan-perusahaan memerintah orang Dayak, karena Dayak ini kuli, bakar lahan, dibakar lahan maka kebakaran besar. Yang peladang tidak mampu, tidak pernah terbakar sampai merembet, mereka sudah mengerti cara membakar lahan yang benar, mereka bikin parit, mereka jaga ketika membakar lahan. Maka dari kemarin-kemarin saya selalu ngomong masalah ini. Dan hari ini Ibu Menteri, demo besar-besaran sekitar 2000 orang mendatangi di DPRD Kabupaten Sintang, tanggal 21 hari Kamis ribuan masa akan mendatangi pengadilan negeri Sintang untuk membebaskan 6 rekannya yang sekarang ditahan.

KETUA RAPAT:

Pak Krisantus agak santai sedikitlah, tadi juga saya sudah dapat pengarahan dari Fraksi, agak santai sedikitlah supaya susananya enak.

Kalau Bapak ngomong terlalu kenceng juga tapi solusinya tidak ada kan percuma.

Jadi nanti setelah Bapak ngomong nanti saya sampaikan permasalahannya juga, karena barusan saya juga dipanggil oleh Fraksi.

Iya lanjutkan Pak.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Baik,

Jadi ini tipenya Pak Ketua, saya bukan berarti marah seperti ini. Orang Dayak itu Bu kalau ngomong seperti ini memang, seperti ini. Kan ada penghipur lara kita, saya ada pantun, saya akan sampaikan pantun biar Pak Ketua engga stress.

Iya jadi harapan saya Bu Menteri, mungkin Dirjen terkait saat ini saya mohon kordinasi dengan terutama Pemerintah Kabupaten Sintang, kemudian Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan. Mereka cari sesuap nasi, janganlah sampai dibuat seperti itu. Tentu kebijakan-kebijakan khusus yang bisa membantu para pemurni peladang, bukan pekerja, itu harapan saya.

Kemudian iya pantun, karena yang diminta pantun.

Mereka berburu mencari kijang

Bawa senjata berbekal beras

Oh ulang lagi.

Pergi berburu mencari kijang

Bawa senjata berbekal beras,

Ada demo di Kota Sintang

Enam peladang harus bebas.

Yang kedua.

Atap rumah lantai lima

Menjulung tinggi ditengah pasar,

Asap pekat kotorlah udara

Ulah perusahaan modal besar.

Yang ketiga.

Anak raja duduk ditangga

Duduk ditangga pakai kebaya,

Para pengusaha bebas Berjaya

Rakyat jelata masuk penjara.

Demikian terima kasih.

Sudah tiga Pak,

Terima kasih.

Adil kata lino bacura menka saruga, basengat bajubata (Bahasa Dayak / Bahasa Daerah).

MERDEKA.

Saya dari PDI-Perjuangan Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Slamet silahkan satu menit.

F-PKS (drh. SLAMET):

Baik terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya Slamet dari PKS.

Yang pertama ingin mengusulkan terkait tadi disinggung-singgung dengan IKN atau Calon Ibu Kota Negara. Apakah kemudian tidak sebaiknya dibentuk, iya kalau hanya di Komisi IV berarti perlu adanya Panja sehingga nanti pendalamannya lebih khusus kita, kalau disampaikan di forum-forum seperti ini tidak akan dalam. Kalau Pansus itu nanti lintas Komisi nanti, itu yang pertama.

Yang kedua, dari data temuan audit atau laporan yang kita baca itu ada piutang yang sangat-sangat besar, kira-kira kurang lebihnya 4 triliun. Nah saya ingin mendapatkan gambaran, kira-kira langkah-langkah penagihaanya kaya apa dan kendala-kendalanya sampai belum bayar itu apa? Ini mungkin kita ingin mendapatkan secara detail eksekusi dari seluruh ini, karena cukup besar angkanya.

Berikutnya saya ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan belanja social, saya liat juga dilaporan belanja social hitungan itu kosong. Maksud saya, momen klatur belanja social itu apa saja karena disitu digambarkan kosong, kalau terkait dengan social yang saya pahami justru masyarakat yang ada disekitar hutan itu secara ekonomi maupun secara sosialnya sangat-sangat membutuhkan itu. Tapi saya tidak tahu persis yang dimaksud dengan belanja social itu apa, disitu cuman tercatung kosong.

Dan itu ada temuan diaudit BPK-nya terkait dengan peralatan mesin sekitar 27,5M itu keberadaanya tidak diketahui, iya ini sehingga sampai tidak diketahui ini mungkin kronologis dan juga hal-hal sudah, kalau dilakukan Bu Menteri sudah menerbitkan surat perintah dan lain-lain, tapi eksekusi lapangannya kita ingin mendapatkan gambarannya seperti itu.

Dan yang terakhir Pimpinan terkait dengan antisipasi hutan social yang ini terjadi juga di Dapil ketika ada redistribusi dari HGO kepada masyarakat ujungnya itu bisa miliki tetapi untuk daerah pengarapan engga ada. Nah pertanyaan saya kira-kira langkah-langkah antisipasi untuk perhutanan social yang pada akhirnya nanti dijual lagi,

karena tidak ada kemampuan untuk menggarap yang pada akhirnya adalah nanti korporasi-korporasi juga, ini mungkin ingin mendapatkan penjelasan seperti itu.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak Ibu yang terhormat.

Karena barusan ada undangan mendadak Paripurna yang penting, maka saya minta persetujuan kita Paripurna dulu diskors, sekalian issoma, nanti 18:30 kita kembali lagi. Karena Paripurna penting, issoma juga penting. Jadi saya skors, kembali lagi 18:30.

Selanjutnya Pak Suhardi Duka, silahkan Pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Dan Selamat Malam Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Ibu Menteri bersama dengan seluruh jajaran Eselon I.**

Kalau kita Evaluasi hasil Audit kita optimis bahwa sudah tiga kali berturut WTP dan insyaallah 2019 ini juga akan sama, walaupun ada berapa yang akan ditindak lanjut oleh hasil pertemuan BPK. Begitu juga dengan program yang diajukan oleh KLHK, saya melihat bahwa program ini memenuhi harapan masyarakat utamanya mendukung dalam ketahanan pangan, air, energy dan lingkungan hidup sangat terpadu. Oleh karena itu saya memberikan support, hanya ada beberapa hal yang ingin minta tanggapan Ibu. Yang pertama saat ini kita devisa neraca pembayaran kita butuh dolar, kita butuh ekspor, tapi disisi yang lain banyak yang memungkinkan atau potensi kita untuk kita ekspor dan pasar dunianya bagus kenapa distop, katakanlah seperti rotan. Rotan ini sampah hutan, bukan merusak hutan kalau diambil, memperbaiki hutan. Tapi ekspor rotan setengah jadi itu distop. Dengan demikian pengumpul petani rotan kita di daerah tidak mengumpulkan lagi karena hanya untuk kebutuhan negeri dibawa ke Semarang, Semarang juga perajinnya juga tidak mampu, akibatnya rotan ini sedangkan pasarnya di luar bagus. Saya minta kepada Ibu untuk meninjau kembali ini kebijakan ekspor rotan.

Yang kedua di area Sulawesi Barat itu ada tambang strategis yang sudah dikavang oleh negara, tapi masuk dalam kawasan hutan dan ada penduduk disitu, yaitu Uranium, Uranium ini tambang strategis saya kira tidak bisa sembarang orang, dan

Uranium ini yang terbaik di dunia kalau berhasil. Nah bagaimana statusnya ini yang kondisi seperti ini, karena bagaimana pun juga negara pasti butuh. Disisi yang lain masyarakatnya perlu dicarikan tempat untuk bisa kita pindahkan secara berangsur-angsur karena tingkat radiasinya waktu saya Bupati dulu, masyarakat dilarang berumah harus pakai tiang, tidak bisa berumah di bawah karena tingkat radiasinya tinggi.

Yang terakhir pemanfaattan kawasan hutan kemarin di Sulawesi Barat sudah ada melalui DAS lari yang memasang kurang lebih 2000 hektar, tahun ini saya akan ajukan dua aliran sungai untuk kita perbaiki hulunya dan ini aliran sungai ini menopang untuk PDAM. Jadi saya minta kepada Ibu supaya ini prioritas kedepannya dan juga mungkin tahun depan kita perbaiki untuk, kita bendung untuk menjaga ketersediaan air di PDAM.

Saya kira itu yang saya sampaikan, terima kasih.

Wallahu ila kaumit thoriq

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sedikit lagi saya lupa, ada ini hutan wisata, ada kayu terbesar di dunia dan tertua di dunia adalah kayu eboni yang ada di Mamuju, usianya kurang lebih 400 tahun. Ini bisa menjadi tempat wisata, ada anak-anak mileniar mungkin bisa masuk disini untuk mengelolah tempat ini mungkin kurang lebih kalau bisa dikasih sampai dengan 200 hektar saya kira cukup, dan ini kayunya itu 8 orang kita bersambung-sambung tuh tangan baru satu tuh kayu, Eboni hanya kayu langka di dunia.

Terima kasih Bos.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETA RAPAT:

Selanjutnya Pak Muslim silahkan, singkat, jelas.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Siap Ketua,

Terima kasih Pimpina, serta Anggota Komisi IV, Bu Menteri beserta jajarannya.

Yang pertama Bu Menteri berkaitan dengan persoalan tambang, tentu saya memberikan apresiasi tadi gambaran Ibu Menteri secara menyeluruh terhadap paparan ini saya pikir sangat menggambarkan ya secara totalis dari pada program dari pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan tambang Bu Menteri ini kita tahu betul tadi Ibu jelaskan bekas dari pada rel tambang ya, ini yang dijanjikan oleh Pemerintah dalam konteks rehabilitasi pasca tambang atau RPT, namun faktanya ini terus terang banyak masukan buat kita

Bu Menteri, masih banyak bekas tambang-tambang yang masih dibiarkan terbuka dan belum direvegetasi atau direhabilitasi. Banyak areal bekas tambang ini kita tahu betul di Kalimantan Timur ada sekitar 36 kasus korban jiwa ya dalam konteks ini. Kita tentunya kita minta dari pada Kementerian Kehutanan, ini saya kira harus ada tindakan tegas Bu. Kalau ini tidak dilakukan, ini sampai kapan pun saya yakin persoalannya ini engga selesai, karena mereka yang mengeruk keuntungan yang luar biasa dari tambang-tambang ini, mungkin bukan hanya di Kalimantan Timur ya kemudian di beberapa daerah yang lain, itu satu hal Bu.

Yang kedua berkaitan program Tora Bu, saya tau betul tadi sekitar 4,9 juta hektar, tentu ini saya yakin bahwa program Pemerintah ini saya pikir sangat bermanfaat ya dalam rangka khususnya buat kepentingan masyarakat ya. Namun dalam hal ini tentu kita berharap bahwa harus punya juga satu strategi, monitoring dan evaluasi yang konferensif terhadap pemberian alat-alat tersebut, jadi sehingga tidak terulang seperti mungkin Ibu ingat betul ketika Pemerintah melakukan program PIR ya (Program Inti Rakyat). Kenapa, kalau ini tidak di evaluasi engga jelas programnya akhirnya masyarakat hanya dijadikan alat buat kepentingan pengusaha dan saya yakin ini akan terjadi terus. Jadi saya berharap Tora ini salah satu program yang strategis dari Kementerian Kehutanan ini betul-betul dimaksimalkan, diawasi betul, tepat sasaran engga sampai kepada masyarakat atau tidak, kalau engga masyarakat hanya dijadikan alat saja, akhirnya tepat pengusaha lagi yang diuntungkan. Itu mungkin yang kedua.

Yang ketiga Bu, saya melihat disini berkaitan dengan pelaksanaan Tora saya melihat dihalam 37 ya, disini ada peneribitan SK, saya lihat disini masih sangat minim sekali. Saya berharap nanti Bu khususnya di Provinsi Aceh saya bisa dapatkan data Pak berkaitan dengan Tora ini, karena kita sangat punya kepentingan, karena saya lihat ada non infer maupun infer ya karena ini kita sangat punya kepentingan dalam rangka kepentingan Pemerintah Kabupaten Kota.

Mungkin itu Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Muhtarom, silahkan Pak.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Komisi IV, Ibu Menteri dan jajaran Anggota Komisi IV yang saya hormati.

Langsung saja disini saya menyampaikan yang terkait dengan emementasi dan permasalahan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan nomor P39/MENLHK/SEKJEN162007 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Disini terkait dengan Emmentasi sudah bagus termasuk untuk perhatian kepada LMDH, dan MPSDH ini benar-benar mendapatkan perhatian dan juga dilaksanakan dengan baik.

Kemudian yang menjadi permasalahan untuk kasus di Jawa Timur ada masih ada kelompok masyarakat yang mengajukan izin permanfaattan hutan perhutanan social atau IPHSPS atau pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan atau kulinkaka diluar kelompok masyarakat yang selama ini sudah memiliki kerja sama dengan perhutani LMDH dan MPSDH. Disinyalir ada gentayangan semacam makelar atau apalah, tapi yang jelas ini menjadi potensi konflik orizontal apabila tidakantisipasi yang benar-benar bagus.

Kemudian disini yang perlu saya sampaikan juga terkait dengan Tora, lihat progress pelaksanaan Tora bulan Oktober 2009 tersaji sakt dihalaman 14 1.834.500, sedangkan target dalam kurun 2015-2019 ini yaitu 1.590.000, artinya tidak seluruhnya masuk kedalam program tersebut masih ada kurang lebih 200 ribu. Di dalam pelaksanaan yang terlaksana pada tahun 2000 saja yaitu 930.878.

Untuk itu mohon penjelasan yang pertama mengapa tidak seluruh lahan yang masuk dalam peta indikatif tidak dimasukan dalam target yaitu 100%.

Kemudian yang kedua bila dilihat dalam data yang disajikan target dibuat dalam kurun waktu dibuat 2015-2019, akan tetapi bila dicermati pelaksanaa hanya tahun 2018, 2018 saja seluas 938.878, sedangkan tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019 praktis tidak ada. Mengapa bisa seperti ini, mestinya harus terjadi kesinambungan dalam satu tahun saja. Kemudian perihal dari target yang telah dicadangkan sekitar 1.590.000 hanya terlaksana 938.878 berarti terlaksana 59%. Langka apa yang dilakukan oleh Kementerian LHK dalam kurun waktu 2019-2024.

Kemudian yang terakhir tadi saya ngolak-ngalik kemudian ada tanggapan, tapi nama saya kok tidak ada jawabanya lisan disampaikan oleh Professor sebelumnya Pak Sekjen. Ini saya punya kepentingan kalau tertulis karena di Madiyun itu masih ada potensi dua waduk yang sudah disurvei dan kemungkinannya kalau nanti seperti usulan saya yang kemarin yaitu ada penyederhanaan-penyederhanaan ini benar-benar sangat membantu dengan suwasembada pangan. Ini bagi kami penting, karena saat ini daerah Madiyun ini merupakan lumbung pangan daerah Jawa Timur Barat.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Ibu Nuraini, siap-siap Pak Mindo Sianipar.
Engga ada, iya Pak Mindo.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Baru ngomong sama Mbah Tarom kalau di Dapil, saya satu Dapil, se-Kabupaten itu manggilnya itu tidak pernah Pak Tarom, Mbah Tarom karena dua kali Bupati beliau. Saya bilang tadi ngomong tentang waduk toh, lah waduk mau dibangun oleh PU, lah hutannya gundul mau jadi apa waduk itu. Karena persoalan di Pertanian adalah banyak irigrasi dibuat airnya tidak ada, karena hutan sudah gundul. Nah ini yang harus kita bagaimana kita kerja sama dengan Kementerian Perhutanan penanaman-penanaman ini kembali tetapi dikaitkan dengan sifatnya produktif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah bagaimana supaya lebih produktif ya?

Dulu orang bangsa Eropa datang ke Indonesia karena rempah, kalau di Cina dikenal oleh jalur sutra saya yakin betul dulu itu ada jalur rempah sehingga sampai ke Nusantara ini. Nah teman-teman dari Kehutanan saya kira bisa memikirkan apa yang kita tanam kembali, tetapi sekaligus juga dalam rangka itu. Kita menginginkan kita merencanakan Indonesia menjadi lumbung pangan 2045, tentu termasuk di dalamnya rempah, bunga pala, merica, apa begitu. Tapi apa yang disekitar hutan itu yang bisa kita lakukan.

Nah Ibu Menteri dan teman-teman sekalian, sekali-kali kita berpikir untuk auto the box ya, coba si ditantang anggota dewan ini yang dari berbagai partai ini, bisa tanam pohon apa kami siapkan bibitnya yang sudah berumur satu meter, sehingga Pak ansilema ini yang selalu mengatakan daerahnya kering, ya kalian pikirkan bagaimana supaya daerah pemilihannya itu lima tahun mendatang ada hijaunya, kalau dia sudah hijau dia terpilih lagi tanpa harus nanti warga masyarakat mengatakan wani piro, gitu lo, dia akan terpilih kembali. Iya saya terima kasih juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehtunan, juga Kementerian Pertanian ditempatnya Mbah Tarom ini, Mbah Tarom kan Bupati, saya yang tanam kelengkeng didepan rumah-rumah orang, nah jadi ada yang memilih Mbak Tarom banyak tapi sedikit dari situ ada juga milih saya. Nah itu gara-gara kelengkeng itu Pak, nah jadi itu.

Yang kedua tadi saya sudah saya katakan, lingkunga ini jangan hanya kita lihat yang besar-besar kerusakannya, kerusakan kecil tapi cepat dipandang mata itu juga ngerusak nama Indonesia. Saya pada bulan Oktober 2018 itu membersihkan saluran air di depan kontrak saya di Mojokerto, sampahnya itu Pampers banyak sekali, iya toh, begitu hujan lewat Kasur, nah jadi Mojokerto itu pergi saja Bapak-Bapak ke daerah Mojokerto daerah bangkal namanya, daerah Brangkal itukan ketemu nanti Pampers ini dan sebagainya. Saya tidak bisa mendorong Pemda untuk mengsosialisasikan

kebersihan, karena uang Pemda tidak ada engga menjadi prioritas itu, Mbah Tarom juga mengatakan tadi engga menjadi prioritas. Jadi mungkin perlu kita dorong Kementerian Lingkungan Hidup ini untuk membuat anggaran, jadi Komisi IV itu mendorong ada mata anggaran sosialisasi soal lingkungan hidup yang kerja sama dengan Pemda, jadi uang sosialisasi itu dari pusat, jangan mengharapkan dari Pemerintah Daerah setempat. Kelihatannya itu kecil, tapi pengaruhnya itu untuk berita difoto-foto begitu ya, grenfis itukan gitukan foto sana, foto situ kirimkan buntutnya akan mengurangi pariwisata ke Indonesia-an, kan kira-kira begitu perlombaan antar negara sekarang ini.

Itu saja yang mau saya sampaikan, supaya kita masukan itu dalam salah satu keputusan rapat kerja ini, saya mendorong agar dibuatkan anggaran yang kerja sama dengan Pemerintah Daerah terkait dengan masalah lingkungan yang lebih luas, tentu ini hanya contoh saja belum lagi nanti limbah rumah sakit iya, mungkin di dalamnya harus ada percontohan-percontohan insinarator sederhana, to camber come back soon dan sebagainya.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Edward.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik terima kasih.

Pimpinan dan para Anggota Komisi IV, Ibu Menteri dan jajarannya.

Mungkin saya hanya menyampaikan permasalahannya menyangkut imprastruktur. Jadi kita ketahui bersama di NTT itu banyak terjadi kebakaran lahan mineral. Yang saya bingung itu kenapa hanya di lahan gambut saja yang dilakukan sumur-sumur dangkal, padahal di lahan-lahan mineral ini juga perlu sumur-sumur itu, kalau terjadi kebakaran ambil airnya di sungai bisa-bisa kering dan jauh. Maka itu kita perlu antisipasi kedepan mungkin saya usulkan kalau boleh di NTT juga dibangun sumur-sumur dangkal, satu lagi menyangkut mengantisipasi kemarau panjang. Jadi siswa yang tadi Pak Ketua tadi bicarakan bahwa embung-embung itu perlu dibangun sebanyak mungkin, karena NTT itu topografinya bergunung, jadi embung itu tempat pemasangan embung atau peletakan embung itu di lereng-lereng gunung karena dia menampung air hutan, tapi kualitasnya embung itu bukan hanya gali saja lepas hanya pemadatan diatas saja, jadi perembesan airnya besar, hujan lewat dua bulan airnya sudah kering belum musim panas. Jadi yang kita tau di daerah kita itu ada embung yang buatan Australia NTADP, itu yang dipakai adalah lumpur bogonaro, jadi

dipadatkan di dasarnya dan lumpur bogonaro ini sifatnya kedap air. Kalau seandainya kita tidak dapat lumpur bogonaro kita gunakan membrane, itu tujuannya untuk menampung air bukan demkon, dia bukan mata air, membrane yang dipasang dipinggir laut itu supaya jangan terjadi abrasi. Jadi membangun suatu struktur itu harus sesuai dengan manfaatnya, kalau kita hanya membangun-bangun seribu embung juga percuma, hanya semangat proyek tapi tidak semangat membangun kesejahteraan rakyat. Dan hubungan antara makhluk hidup semua makhluk hidup mulai tumbuhan, kuda, babi, sapi, manusia itu butuh air. Jadi sekarang kita berpikir air ada lebih dulu atau tumbuhan ada lebih dulu, pasti air. Nah ini kita mau tanam penghijauan tapi air tidak ada. Pupuk tidak ada, air ada tanaman bisa hidup. Tapi kalau pupuk seribu tahun air tidak ada, kalau pupuk begini tanah kering apa yang mau tumbuh disitu. Jadi omong pergi, omong datang, kita sekarang bagaimana penyiapan air sumber daya air ya, embung juga baik, yang paling baik itu ada bendungan. Jadi saya ngomong dari tadi saya hanya focus imprastruktur. Kita mau atasi hutan kebakaran, kalau tidak ada air biar helicopter seratus biji juga mau buat apa helicopter terbang persiar diatas saja, biar mau pake satelit tera akuaka, noaka, percuma hanya dapat-dapat tapi tidak bisa mengatasi masalah ini. Jadi sekarang saatnya nanti kan bulan Desember kan hujan, disitulah kita menampung air, kalau tanpa hujan percuma kita turi biar pakai dokter dari America datang juga omong kosong banyak saja.

Jadi saya kira seperti pikiran saya praktis, terima kasih banyak Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Dirjen Kanjeng.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua,

Mohon maaf,

Bu Menteri, Pak Wakil dan Eselon I.

Ini mohon izin Pak Ketua saya hanya membacakan ya, bukan,

Jadi begini Bu, nanti Ibu juga tolong bersabar ini kalimatnya kurang enak kalau saya bacakan.

Kemarin hari Jum'at saya diundang oleh komunitas himbauan Nusantara Bu, komunitas himbauan Nusantara telah membuat surat ke Presiden, jadi saya disitu setengahnya di adili, nanti suratnya engga saya baca tapi ada yang kecil-kecil secara singkat saya, komunitas ini ditanda tangani Bu oleh 19 organisasi mungkin Ibu sudah baca. Yang pertama forum lembaga pendidikan tertinggi kehutanan di Indonesia, ada 8 fakultas kehutanan ada di IPB, Gajah Mada, ITB semua ini tandan tangan dan ditanda tangani oleh (Dr. Ir. Rinekso Sukmaji) mewakili lembaga,

(kaset terputus), nanti garis besar ada 15 butir Pak, iya ini hanya saya disuruh membacakan soalnya, oh engga sampai saya kurangi nanti, ini jadi ngurangi menit loh Pak.

Yang keempat asosiasi pengusaha hutan Indonesia ini ditanda tangani oleh Pak Raharjo Binyamin, persatuan sarana perhutanan Indonesia oleh Puji Kurniawan ini pengusaha, forum kolaborasi Rimbawa ini Cipta Purwita Dewas Perum Perhutani, terus Asosiasi Industri Panel Kerajinan Indonesia ini Pak Anggoro Pengusaha Kayu, Indonesia Swamil ini Pak Samsul Efendi pengusaha, himpunan Pensiunan Kehutanan Pak Sutino Wibowo mantan Dirjen BPDASAL, Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia ini Pak Rahmat Sah, Pusat Kajian Strategis Kehutanan ini Nurhidayat mantan Inspektorat Jenderal, ini harus baca. Terus Himpunan Konsultan Kehutanan di Indonesia Ateng Sutisna ini Pengusaha Konsultan, Masyarakat Penggiat Energi Biomas ini Pak Nanang Rofandi mantan APAI, Persatuan Pemeratih dan Kehutanan ini Dokter Ir.Dodi Supriadi, Forest Font Thetion ini Pak Bun mantan Sekjen, Ikatan Alumni Kehutanan Universitas Hasan Nudin Andri Adriana, Ikatan Alumni SKMA Dokter Risno, Hiyasan Falfores Bambang Purwanto ini Enjeo, Fakultas Kehutanan IPB ini Muhayat, Fakultas Kehutanan UGM Agung Nugraha.

Nanti saya sampaikan isinya yang surat ke Presiden sama Pak Ketua dan Bu Ketua, Bu Menteri dan ada beberapa yang lisan Pak yang saya sampaikan Pak, ada cepat aja nanti ini yang mana tadi ini.

Yang pertama Bu ini kelompok ini mengatakan kecewa pada wakil Kehutanan di Komisi IV kepada Darori katanya, saya katakan, saya tidak mewakili anda sebagai rimbauan saya adalah wakil dari Kebumen, Banjar dan Purbalingga, dan saudara tidak memilih saya. Itu jawaban saya Bu.

Terus yang kedua, kecewa dengan kinerja pemberian LHK, Ibu saya sampaikan. Terus yang kedua LHK sibuk dengan kebakaran dan lupa dengan bencana alam, banjir, longsor, RHL dipertanyakan. Ini gausah emosi Bu, saya kemarin agak emosi jawabnya.

Lembagaan perlu disempurnakan, iya saya menyampaikan saja ini, Kelembagaan perlu disampaikan.

Yang keempat kawasan hutan yang luas ya bekas lock over area dibiarkan jadi ajang sawit illegal, ini saya ringkasan aja.

Yang kelima program Tora dan Perusahaan Sosial tidak lanjutnya apa, rakyat miskin tidak punya modal untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan saya pertanyakan ada kawasan konservasi Taman Nasional lebih dari 100 ribu sectoral dasarnya apa.

Yang keenam, komunitas rimbauan nusantara siap bertemu Komisi IV ini Pak Ketua, karena infonya sulit bertemu dengan Menteri LHK, saya bilang tidak sulit, saya siap kapan bisa ketemu, mungkin anda salah waktunya tidak tepat saya jawab gitu Bu, mudah-mudahan jawaban saya benar. Komunitas siap memberikan masukan revisi Undang-Undang 41 ini Pak Ketua.

Yang kedelapan HPH Senin Kamis karena harga lock diluar negeri 300 dolar, sedangkan di dalam negeri 100 dolar, apa langkah-langkah Kementerian Kehutanan untuk membatu perusahaan.

Gabung dalam bertugas seperti Bareskrim, tapi tidak ada yang dipenjarakan, nah ini apa betul ini, bahkan Undang-Undang 18 tidak dipakai. Ini-ini pertanyaan saya Pak Kagumno yang jawab. HTI rugi karena semuanya biaya sendiri, tidak ada asuransi, tidak ada biaya negara biaya sendiri, tapi terbakar jadi tersangka. Bahkan arealnya dalam waktu dekat sebageian berapa perusahaan akan dikembalikan kepada negara.

Ini satu lagi Pak ada dua lagi ini, cepat ini.

Ada 3 PP Undang-Undang 590 yang belum dibuat, ini mungkin sejak saya memang belum dibuat Pak, jadi mohon ini Pak Dirjen PP-nya mengenai peyangga kehidupan, juga ada PP Taman Buruh ini.

Nah Buffer Zone kawasan kehutanan diusulkan agar ditanam pohon produktif, ini saya kira sudah dilaksanakan oleh Perusahaan Sosial itu.

Demikian Ketua, saya mohon izin, saya serahkan sehingga beban saya tidak ada ini.

KETUA RAPAT:

Silahkan Kanjeng.

Cuman saya tadi mendengarnya lucu sekali, kok pengusaha TI minta dibiayai negara, kalau memang gamau HTI ya kembalikan ke negara saja bilang. HTI kan kalau engga untung mana mungkin dia buat HTI di Indonesia, itukan omong kosong. Terus masalah PH tadi kanjeng, nanti kalau ketemu sampaikan sama orangnya. Kalau 300 dolar diluar negeri, 100 dolar di dalam negeri, ya jangan ditembang kalau rugi biarkan saja tegakannya, kalau engga tebang kan berarti engga ada kewajiban membayar iyuran kan gitukan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Iya saya setuju, cuman karena itu pertanyaannya bukan ke saya, iya saya teruskan saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke sip.

Pak Haerudin sudah siap?

Sudah siap?

Kalau sudah siap saya kasih waktu untuk ngomong.

Iya jangan dong, jangan lupa tatifnya 3 menit.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Siap Pimpinan.

Pimpinan, Anggota yang terhormat, Ibu Menteri, Pak Wamen, berserta Direktur Gambut, beserta seluruh jajaran, para Pejabat yang hadir yang saya hormati.

Kami harus sampaikan beberapa hal terutama nyambung yang tadi belum selesai, keburu Bapak Ketua kita istirahat mau Paripurna yang gagal.

Pertama memang kita butuhkan perkebunan-perkebunan illegal itu seharusnya public tau, kalau kita terbatas mengawasi biarkan public mengawasi tapi public harus tau bahwa dia illegal. Pertanyaannya begitu lama, kenapa Publik malah gatau? Nah itu yang pertama, ini simple-simple saja Bu Menteri.

Yang kedua, IPPKH yang tadi sampaikan bahwa mereka diberikan izin 100 tapi jadi 200 menurut saya juga sudah bisa terditeksi harusnya sudah terinfentarisir, beberapa pengusaha dia dapat izin tapi nakal. Nah ada juga nakal baik dia menambah ruang tanpa izinnya, ada juga nakal karena dia tidak komitmen sesuai perjanjian direklamasi reboisasi, ada juga nakal yang nunggak PNBP-nya walaupun ini tugasnya dari Keuangan tapi dikita kebagian pertanyakannya. Kalau memang tadi asalannya bingung bagaimana cara menagihnya, kenapa engga disampaikan di Komisi IV, butuh anggaran untuk menagih, butuh team yang harus dibiayai, karena duit yang harus ditagih itu besar bukan kecil. Sampaikan saja di Komisi IV apa adanya, apakah kita ada solusi atau tidak. Nah itu yang harus kami sampaikan Bu.

Yang keduakan ini kita dengarnya sudah terlalu lama bahwa isu tentang limbah terutama di kita, saya ingin tidak jauh-jauh di Kabupaten Bandung yang kita tahu tempat industry yang salah satunya Ibu sampaikan tentang sungai Citarum Harum yang sampai har ini jangankan harum, tetap bau Bu karena tetap hitam warnan airnya. Kalau tidak disiplin dari Kota Bandungnya, dari hulu airnya diperbaiki kita akan kesusah di Citarum itu. ditambah lagi itu di Kabupaten Bandung itu seluruh industry buang air yang berwarna yang kita hakul yakin itu adalah ipal gagal atau itu bahkan tanpa ipal, tapi itu jangan disungai alur Citarumnya harus dilihat di alur-alur kecil yang nanti Citarum nanti jatuhnya, seperti daerah Banjaran yang ke Citarum, itu mereka pabrik-pabrik yang nakal dari sisi hipal. Nah itu juga saya yakin Kementerian LHK jauh lebih tau dari pada saya, tapi hanya kita mengawasi kenapa itu belum bisa selesai ada masalah itu.

Yang ketiga Ibu Menteri, pendek-pendek yang Pak Pimpinan. Ingin kami sampaikan bahwa air itu tanggung jawab kita bersama, sebentar lagi kita mengalami elnino kekeringan yang hari ini kita merasakan sengsara dengan kemarau yang panjang cukup hampir 7 bulan, luar biasa kita terasa sengsaranya, Kementerian LHK

begitu kerepotan untuk memadamkan dengan Tentara, dengan Polisi, dengan Masyarakat hanya bisa padam karena hujan saja. 100 Miliar keluar hanya bisa memperlambat kebakaran hutan, tidak bisa memadamkan. Hujan 3 kali, 3 hari 3 malam selesai kayanya sama hujan padam. Saya ingin sampaikan Bu, memang dikita hari ini banyak tanaman pohon yang di hulur air itu yang ditebang masyarakat. Saya ingin sampaikan bagaimana kita coba penanaman pohon yang tidak dibutuhkan buahnya, karena dulu kalau ada di sunda itu dikita di Jawa Barat ada namanya TangkalKonang, Pohon Konang Bu buahnya tidak enak, tidak diambil, masyarakat juga tidak membutuhkan, pohonnya juga besar-besar, tapi dia itu melingdingi mata air. Coba mungkin kedepan kalau sama pohon yang produktif seperti yang pohon kayu jati dan yang lain, wah sudah terlalu cerdas masyarakat kita itu melebihi Polisi dan Tentara.

Cukup Pimpinan,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Saya senang melihat Pak Haerudin engga marah.
Selanjutnya Mbak Riezky, silahkan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ibu Menteri dan jajaran,

Saya mungkin minta waktu agak panjang sedikit ada beberapa point. Pertama mungkin isu yang beberapa hari kemarin ini ada berita dan center terkait adanya Macan Putih yang keluar lagi pagar alam. Perlu diketahui bahwa pagar alam inikan hutan lindung, iya akan tetapi saya tidak memahami dalam arti di LHK ini bagaimana mengkategorikan hutan lindung dan konservasi gituloh karena kenapa, karekteristik keanekaragaman hayati di Gunung Dempo tempat terjadi tersebut itu memang dari jaman Belanda itu termasuk wilayah yang berbeda sendiri iklimnya berbeda dia, perkebunan teh disitu sampai sekarang itu masih cukup produktif dan kalau di daerah lahat pagar alam itu memang sampai sekarang itu banyak sekali binatang yang mungkin harusnya dilindungi, nah kalau sampai mereka keluar dari hutan tersebut berartikan mungkin ada hal yang mengganggu ekosistemnya. Mungkin saya memohon untuk khususnya isu yang berkembang tersebut terkait dengan hutan lindung ataukah hutan konservasi nantinya untuk pagar alam khususnya Gunung Dempo untuk ditinjau kembali, karena ini termasuk daerah tua yang dari dulu alamnya tidak berubah dan termasuk masih asli gitu, jadi tolong untuk dipertimbangkan untuk itu.

Kemudian terkait juga dengan wilayah Musirawas Lingau Muratara, ini terkait TNKS, TNKS di wilayah sini yang mungkin kebelakangan ini lebih banyak perkebunan sawitnya hutannya sudah mulai habis dan ini untuk masyarakat disekitar situ juga sudah mulai apa ya, sudah mulai menghilang juga karena tidak, iya mungkin menurut mereka buat apa juga mereka disitu diantara kebun sawit yang selama ini berada di hutan social tersebut gitu. Nah jadi saya juga mengusulkan untuk TNKS ini ditinjau kembali, karena contohnya di Lubuk Lingau itu karena TNKS ini setau saya kan di beberapa daerah Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan ada satu daerah lagi, iya jajaran TNKS inikan salah satu paru-paru dunia juga kalau tidak salah.

KETUA RAPAT:

Kalau bisa cepat sedikit, jangan lawi-lawi ke Provinsi lain, ini focus tadi masalah Sumsel saja.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Iya karena TNKS inikan penting, karena mulai digunakan untuk wisata, dan harapan masyarakat itu dikembalikan kepada kodratnya sebagai hutan yang memang konservasi untuk wilayah disitu.

Itu saja dan yang pasti sekali akan lebih baik apabila kami juga memegang data terkait hal-hal tersebut, apabila data itu ada mungkin sangat membantu juga bagaimana kita juga menjelaskan ke konsituen kita masing-masing.

Terima kasih.

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Ibu Faridah, siap-siap terakhir Ibu Nuraini, karena tadi beliau keluar datang belakangan berarti jatahnya belakangan.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri dan rekan-rekan Anggota,

Saya mengangkat isu terkait lingkungan hidup yang terjadi di Jawa Timur, terkait dengan Import Limbah Plastik. Yang mana limbah plastic itu kan di import untuk industry

kertas, masalahnya ternyata banyak di lapangan itu yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak digunakan untuk produksi kertas, sehingga orang-orang kita ini pintar melihat peluang, kalau engga dipakai berarti bisa dijual, harganya otomatis murah maka digunakan untuk memproduksi tahu yang mana limbah ini bisa menimbulkan asap yang menimbulkan asma untuk masyarakat yang ada disekitarnya. Nah ini bagaimana langkah LHK terkait dengan import limbah plastic?

Terus pertanyaan saya begini, kita ini konsumsi terbesar limbah plastic, kenapa engga kita yang eksport plastic limbah? Saya yakin limbah kita lebih banyak dari pada Australia dari pada Belgia yang eksport ke kita. Kenapa kita tidak melihat peluang-peluang itu?

Sudah mungkin itu saja cukup pertanyaan saya, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terakhir silahkan singkat padat jelas, karena sudah jam 19:30 belum nanti jawaban, belum kesimpulan, insyaallah seperti yang semalam.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Iya baik terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Komisi, serta Anggota, Ibu Menteri, Pak Dirjen dan jajarannya.

Sedikit yang ingin saya sampaikan terhadap evaluasi LHPPK dimana apa yang disampaikan saya memberikan apresia yang setinggi-tingginya, ini luar biasa bahwa Kementerian LHK ini sudah menyampaikan secara utuh serta transparan dari sisi lokus anggaran dan sebagainya, luar biasa ya. Akan tetapi kalau melihat dari sisi temuan iya kelemahan system pengendalian internal saya melihat bahwa belum ada mencerminkan terhadap pengelolaan keuangan ini secara efektif, efisien dan akun table, mungkin ini sebagai bahan evaluasi perbaikan kedepan agar lebih efektif, efisien dan akun table, dan beberapa temuan ini untuk segera diselesai. Dan berikutnya bahwa cerminan yang disampaikan ini tidak sebanding lurus dengan apa yang dilakukan hasil yang sudah disampaikan LHP BPK, saya melihat disini menggambarkan bahwa anggaran yang sudah diserap dari PDL sendiri masih rendah PSL D3 juga cukup rendah dimana persoalan-persoalan masyarakat kita sekarang sudah jelas ya seperti adanya limbah yang disebabkan industrialisasi, belum lagi polusi udara, persampahan dan sebagainya sepertinya ini belum mampu menyerap ya untuk bisa dijalankan. Yang dijawab kemarin juga atas pertanyaan saya ini belum memuaskan, intinya apa yang

ditanyakan jawabannya itu tidak sesuai dengan kondisi, tidak ada strategi atau pilihan alternative laini disitu dijawab, kenapa anggaran ini rendah kaitan dengan PSL D3, kenyataannya di Banten sendiri banyak limbah-limbah industry yang terus mengalir ke sungai-sungai itu disebabkan karena belum bisa menjalankan mengingat sekarang masa panjangnya musim kemarau, itu alasannya yang klasik saya kira, akan tetapi ini harus ada terobosan, selain alasan yang kemarau mungkin Kementerian kedepan bisa melakukan inovasi yang lain menanam mungkin jenis tanaman yang tidak hanya tergantung kepada kemarau dan lain sebagainya.

Terus disini juga saya melihat bahwa adanya piutang yang belum ditangihkan karena tertib 2,7 sekian miliar juga tidak diketahui asset, ini juga menandakan tidak sejalan dengan anggaran BP2SDM yang cukup tinggi akan tetapi tidak menunjukkan terhadap realisasi anggaran yang kenyataannya ini masih piutang dan lain sebagainya. Mohon ini menjadi koreksi, nanti langkah-langkah apa harusnya sebanding anggaran yang telah dikeluarkan tentu harus ada hasil yang dicapai.

Nah berikutnya saya juga belum puas terhadap pertanyaan saya, mengapa anggaran ini cukup banyak tapi realisasinya masih rendah. Kaitan dengan isu yang ada di Provinsi Banten bahwa sungai-sungai yang menjadi kewenangannya Kementerian KLH ini sungai Cidanau, Ciujung, Cisadane akan tetapi pada pelaksanaannya wilayah kerja ini kok dihubungkan antara Provinsi Banten itu merupakan wilayah sungai-sungai yang mengalir antar Citarum, Ciliwung, Kali Angke, serta Cimandiri saya jadi bingung ini, bagaimanasi sebetulnya memetakan wilayah kerja antara suatu wilayah daerah satu dengan yang lainnya jangan sampai terjadi kaya begini, karena mengingat DAS inikan dari Hulu sampai Hilir yang pada akhirnya yang diakibat dari pada aliran sungai-sungai mulai dari Jawa Barat ke Banten kita yang dapat kena hulu-hulu, DAS yang ada di aliran sungai Cijung, Cisadane boleh Bapak Ibu control kesana ini juga cukup mengganggu sekali mengkhawatirkan iya karena pencemaran tadi industrialisasi, belum lagi bicara Cilegon Kabupaten Serang yang banyak industrialisasi.

Berikutnya bahwa anggaran harus difokus dengan sesuai kebutuhan daerah tersebut, seperti saya lihat anggaran 2020 disini ada kegiatan untuk seperti persampahan, melihat itu lokasinya ada di Kota Tangerang, bila perlu diarahkan di Kota Serang karena Kota Serang juga merupakan Ibu Kota Provinsi dari sisi keindahan, kebersihan ini juga harus menjadi perhatian kita semuanya.

Terima kasih.

Billahi Taufik Walhidayah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Cukup.

Sekarang saya mau tanyakan dari Direktur Utama Inhutani 1 ada yang mau disampaikan?

Ada, dua, kalau gitu nanti kita akan bahas dengan Perhutani dan Inhutani pada tanggal 3 Desember untuk kita mengetahui isu-isu permasalahan yang ada di Perum tersebut.

Saya ingin bertanya Ibu Menteri sedikit, mungkin dengan Pak Dirjen karena tadi saya ada penugasan langsung dari Fraksi, perihal rakyat Dayak yang ditahan dipengadilan Sintang Kalimantan Barat, karena tadi saya ditugaskan untuk menanyakan secara langsung kepada Dirjen Gakum maupun kepada Ibu Menteri, dan tadi saya sudah minta persetujuan teman-teman semua seharusnya kami ke Kaltim meninjau calon Ibu Kota Republik Indonesia, tetapi karena kasus masalah Sintang ini lebih penting maka kami alihkan untuk kunjungan kerja spesifiknya ke Kalimantan Barat.

Demikian tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudari Menteri atau Eselon I untuk menjawabnya secara singkat dan jelas.

Kalau bicara yang memuaskan, iya tidak ada yang puas jawabanya.

Jadi yang penting kita mengerti apa yang ditanya, apa yang dijawab, dan semua kita cari jalan keluar.

Silahkan Bu Menteri.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Bu Menteri.

Yang kam hormati Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

Izinkan saya secara singkat memberikan respon atas semua pertanyaan dari tadi pagi sampai dengan sekarang.

Pertaman dari **yang terhormat Bapak Salim Fahri** terkait dengan rapat peninsula dan lain-lain saya mendorong sebetulnya untuk kasus-kasus apakah itu hutan social atau pencemaran dan lain-lain, kita bisa menyepakati bahwa kalau sudah tau Pak Dirjenya mekanismenya bisa dilakukan nanti dalam hal harus ada keputusan yang kursial itu bisa untuk tindak lanjutnya bisa meminta persetujuan. Saya tapi secara umum biasanya untuk operasional itu Dirjen bisa mengambil langkah.

Kedua yang terkait dengan Lawesikah Aceh Tenggara, pada dasarnya setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan itu harusnya langsung diambil langkah pengawasannya. Sebetulnya Kabupaten punya intrusmen juga, karena izin lingkungan dan amdal itu dikeluarkan oleh Kabupaten dalam hal Kabupaten mengalami kesulitan untuk melakukan langkah-langkah loan enforcement maka sebetulnya kami bisa menugaskan baik PPKL pengendalia pecegahan dan perusakan lingkungan Pak Dirjen

bisa mengutus teamnya, atau dalam hal ini kalau PLTM biasanya ini mikro hidro ya Pak biasanya diareal konservasi maka saya juga bisa meminta Dirjen Konservasi untuk menurunkan teamnya. Kalau Gakum sebaiknya memang last resort lah bagian terakhirlah, kalau kita masih bisa melakukan pembinaan kita lakukan dengan pembinaan.

Untuk **yang terhormat Ibu Lulu dan terakhir barusan tadi sampaikan juga oleh Ibu Nur** berkaitan dengan maaf yang masalah sampah di Jawa Timur dan lain-lain. New York Times dalam minggu ini mengeluarkan berita berkaitan dengan import bahan baku kertas, jadi sebetulnya yang di import itu bahan baku kertas bukan limbah. Limbah dilarang masuk menurut Undang-Undang 32 maupun menurut Undang-Undang Sampah, jadi bunyinya sangat kejam, Dilarang memasukan sampah atau limbah ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi sebetulnya tidak boleh. Apa yang terjadi di Jawa Timur itu adalah masuknya import bahan baku dari luar negeri dari America, Australia, Jerman, Inggris, Hongkong dan lain-lain sebanyak 2194 kontainer dan sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden pada Sidang Kabinet bulan Juli, dan perintah beliau untuk re ekspor dan sudah kita kembalikan 883 kontainer dan ini masih berlangsung. Memang agak aneh America yang memberitakan, sebetulnya yang mengirim pengusaha dari sana juga. Nah apa yang kita lakukan adalah Re Ekspor, jadi pengusaha kena juga, berarti dia harus melakukan itu dengan dukungan beacukai tentu, karena kalau sudah masuk ke wilayah pabean itu sudah bukan wilayahnya KLHK lagi, tapi kita yang periksan kita yang bilang bahwa ini harus di re ekspor.

Kemudian yang terkait dengan Desa, Desa yang penuh limbah ini, ini sudah kami bahas, sudah kami rapatkan dengan Pemerintah Daerah, Perindustrian semua pihak, ternyata ini proses yang sangat sudah lama mungkin dari tahun 80-an. Apa yang terjadi dari sampah yang masuk dalam import kertas tersebut mengapa import kertas itu dilakukan dan di dalamnya ada sampah ada yang 30%, ada 10% bayangin, Undang-Undang saja melarang dan hukumnya Pidana. Waktu kami melaporkan kepada Bapak Presiden, perintah dari Bapak Presiden adalah re ekspor dan tidak boleh dilarang karena hal itu akan merusak generasi bangsa Indonesia, jadi ini bukan hanya soal hukum tapi ini soal manusia dan soal generasi. Apa yang terjadi karena harga barangnya itu antara 30 sampai 70 dolar per ton, sedangkan kalau beli bahan baku itu harganya 2 juta rupiah per ton Bapak, jadi ada Margine yang tinggi sehingga import seperti itu dilakukan. Itu yang terjadi. Lalu apa yang terjadi dengan sampah-sampah itu, sampahnya serem-serem ada yang bekas infus, kalau pempers, segala macam serem-serem. Apa yang terjadi, sampahnya kemudian oleh si pengusaha importir ini diberikan kepada masyarakat ada yang seperti siesar oleh masyarakat diolah, ternyata masyarakat bisa dapat uang sampai 200 sampai 400 sehari dari pemilahan itu.

KETUA RAPAT:

Menteri, jadi sampah tersebut diperjualn belikan kembali?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Tida sebetulnya, diberikan CS art tapi lalu kemudian diperjual belikan.

KETUA RAPAT:

Kalau dijadikan CS art apakah engga itu pelanggaran, itukan limbah?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Seluruhnya pelanggaran Bapak, ketika masuk saja sebetulnya sudah pelanggaran.

KETUA RAPAT:

Apalagi diberikan CS art dari perusahaan?
Apakah perusahaan itu diproses atau tidak?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Lebih parah lagi, lebih parah lagi.
Sekarang sedang kita olah, sedang kita proses.

KETUA RAPAT:

Oke terima kasih.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Jadi apa yang terjadi di kampung itu kemudian oleh masyarakat diolah dijual ke pabrik tahu menjadi bahan bakar, kenapa karena, kenapa pabrik tahunya beli, karena harganya hanya 800 ribu satu bulan dia keluar duit kalau dia beli itu, tapi kalau dia beli bahan bakar biasa keluarnya dua juta, jadi ini ada persoalan margin semua. Apa yang saya ingin katakan, proses hukumnya kita lakukan, re ekspor kita lakukan. Nah sekarang yang harus ditangani berikutnya adalah bagaimana soal Desa, soal Masyarakat tersebut, itu sudah tidak hanya LHK sendirian, kita harus tangani, karena ini

betul-betul transpormasi secara structural yang harus kita lakukan, jadi itu situasinya. Oleh karena itu saya sampai heran juga, kenapa New York Times mempersoalkan itu padahal itu kerjaannya dia juga begitu. Jadi ini sudah dibahas di sidang cabinet arahan Bapak Presiden kepada Kementerian LHK juga sudah diberikan dan kami sedang melangkah menyelesaikan.

Kemudian dari **yang terhormat Ibu Lulu** juga masih bagaimana Tora, apakah ada kontrolnya, ada. Jadi apakah ada penyimpangan prosedur, sebetulnya kalau prosedurnya agak ketat, karena prosedur dengan inventarisasi yang ketat, verifikasi juga berlapis-lapis mulai dari Daerah sampai dengan Nasional di Kemenko, setelah di inventarisasi dibahas lagi untuk persetujuan Menko, kemudian waktu sudah jadi baru masuk ke KLHK dan menjadi surat keputusan seperti ini. Disini ada daftar namanya, ada luasnya juga. Surat keputusan warna biru ini akan menjadi sertifikat, artinya apa, kembali oleh BPN dan Pemda itu diteliti lagi orangnya menerima berapa, jadi memang cukup berlapis-lapis mengatasinya sehingga rasanya kalau prosedur penyelesaiannya dan juga punklinya harusnya tidak ada karena begitu ketatnya. Kemudian instansi mana yang terkait dan terlibat dengan Tora sampai dengan eksekusi dan sebagainya, kalau dari tanah kawasan hutan hanya kehutanan dan Kementerian Perekonomian sebagai kordinator itu ada PP-nya, kemudian bersama-sama juga Kementerian ATR. Kemudian terkait dengan hasil BPK 20 peralatan itu kenapa peralatan seolah-olah lalu menjadi tidak jelas.

Bapak Ibu yang kami hormati,

Ini penyatuan dua Kementerian ini memang repot begitu, terutama organisasinya itu kita bisa selesaikan. Kemudian ternyata menta assetnya itu juga setengah mati dari tadinya susah ini makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit yang engga ketahuan dan sedang kita raphin terus, terus lagi dicari, terus lagi dicari. Dan usaha ini oleh BPK itu bisa dilihat karena pada tahun 2016 kita belum dapat WTP, karena susah sekali menata asset dua Kementerian ini. Kemudian 2017 mulai kelihatan upayanya jadi juga masih berat, jadi 2018 baru kita dapat WTP-nya karena kelihatan usahanya kita pakai BPKP dan lain-lain untuk membatu, jadi ini masih terus kami lakukan, kami masih terus sempurnakan untuk penyelesaian asset ini.

Kemudian tentang kelibatan kelompok masyarakat, sebetulnya kalau Tora itu dilakukan dengan pedoman peraturan Presiden, kalau yang pendampingan itu yang Hutan Sosial karena langsung kelompok. Kalau yang Tora itu bisa perorangan mengklaim dan mempersoalkan penguasaan hutan dalam kawasan hutan itu juga bisa dilakukan, sehingga kalau pendampingan tadi seperti yang ditanyakan oleh **yang terhormat Ibu Lulu** ini bicara pendampingan itu sebetulnya lebih banyak di Hutan Sosial.

Selanjutnya pertanyaan **yang terhormat Ibu Endang**, konflik secara parsial memang sedang terus kami tangani. Tadi sudah saya laporkan 3 jutaan hektar yang

bisa ditangani dari penyelesaian konflik-konflik itu, jadi cash buy cash bisa kita atasi, karena Indonesia begitu luasnya belum semuanya bisa ke monitor. Tetapi memang dengan adanya interuksi Presiden nomor 8 tahun 2018 tentang moratorium sawit maka sekarang tentang sedang diteliti oleh Kementerian LHK. Jadi ada beberapa kategori di dalam arah Bapak Presiden Inpres 8 2018, pertama tidak boleh ada izin baru, yang kedua bahwa kebun sawit yang ada di dalam hutan itu harus diteliti izinnya kenapa, kalau ada izinnya itu berarti tidak masalah, kalau dia tidak ada izinnya itu harus dilihat apakah dia waktu mendapat dari Bupati cocok apa tidak tata ruangnya, kalau cocok tata ruangnya berarti sebetulnya ada persolana dikebijakan maka tidak sepenuhnya salah dunia usaha misalnya seperti itu, jadi ini sedang kita lakukan. Terus yang sudah ada izinnya di dalam kawasan hutan itu juga kita teliti, kalau ternyata dia belum buka tetapi hutannya masih bagus maka dia engga boleh buka hutan yang bagus, dia boleh buka hanya yang hutan sudah tidak bagusnya. Jadi hal-hal yang seperti ini, nah kalau yang tidak ada izin sama sekali tidak ada keterangan apa sama sekali, ini yang sedang kita teliti bagaimana menyiapkan solusinya, karena di Undang-Undang 18 kan agak kejam langsung ke gakum criminal, tapi Undang-Undang 41-nya bunyinya masih bisa dilihat bagaimana yang terjadi apa sesungguhnya yang terjadi dan lain-lain. Saya juga mencoba berkonsultasi ke KPK tentang hal ini, apakah kita apa-apa langsung ke criminal, jadi ini sekarang sedang di formulasikan moratorium itu planningnya selama tiga tahun jadi proses ini sedang kita tanggani. Ada lagi yang 20%, yang ada izin menurut ketentuannya KLHK kalau dikasih izin harusnya 20% untuk plasma, tapi selama ini belum pernah ada yang terjadi bahwa 20% itu diberikan kepada plasma.

KETUA RAPAT:

Bu Menteri,

Beberapa tahun lalu kalau engga salah 3 tahun saya sama Pak Dirjen Gakum ke Kalimantan Tengah dan clear pada waktu itu Gubernur Kalimantan Tengah dalam wawancara dengan wartawan mengatakan kurang 830.000 hektar kebun sawit di Kalimantan Tengah illegal, bahkan saya tanyakan waktu itu dengan pengusahannya pernah kita panggil disini saya tanyakan, apakah pabrik anda ada izin mendirikan bangunan, ada, apakah anda membayar PBB, ada, saya cuman menanyakan, tolong tunjukkan mana PBB-nya, apa alasannya, apa dasarnya anda membayar PBB sedangkan kawasan tersebut masih kawasan hutan.

Maka teman-teman Komisi IV berkali-kali meminta untuk memanggil kembali Gubernur Kalimantan Tengah, termasuk juga yang di Riau, termasuk juga di Sumatera Utara, ditempat Pak Krissantus itu di Kalimantan Barat, termasuk juga di Papua. Jadi kalau mau mengambil langkah Bu Menteri saran saya jangan terlalu lama, makin lama tidak ada PAD untuk wilayah tersebut.

Iya Bu Menteri ya.

Silahkan Bu lanjutkan.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Bapak.

Iya ini memang Inpresnya dikordinir oleh Pak Menko, jadi yang terlibat itu ada beberapa termasuk LHK, tadi yang kewajiban untuk LHK adalah yang evaluasi di kawasan hutan.

Baik yang selanjutnya berkaitan dengan Limbah Jabar Cianjur untuk sumur yang tercemar bensin kami nanti minta datanya saja, spesifiknya dimana, persisnya dimana karena pada dasarnya di Dirjen Pengendalian Pencemaran juga bisa turun ke lapangan. Kemudian tentang SK hutan social di Cianjur memang sih selalu kelemahan ketika hutan social itu diberikan adalah perencanaan kemampuan kelompok untuk melakukan perencanaan bisnisnya, karena sebetulnya setelah dikasih lahan harusnya ditahu usahanya bagaimana, mau ngapain lalu difasilitasi oleh apa oleh Pemerintah dengan kur misalnya, dengan fasilitas benih, bibit dan lain-lain, bisa Kebundes, bisa ke Koperasi dan lain sebagainya. Maka untuk ini kami bekerjasama dengan Menteri UKM, Menteri Koperasi saya mengatakan kepada Pak Dirjen coba dikomunikasikan semua kelompok usaha perhutanan social ini kepada Menteri Koperasi jadi kita bisa mengatur dan mengelolanya bersama-sama.

Izin Ketua.

Selanjutnya **yang terhormat Ibu Yesi,**

Saya kira ini saran yang sangat baik kami perhatikan dan kami menerima dengan baik, ini juga dalam pemikiran bahwa kita melihat Pasal terkait dengan buka lahan bagi keperluan masyarakat tradisional. Saya juga setuju tadi Kalimantan Tengah Sintang saya minta maaf kalau ada jawaban-jawaban yang tidak pas, sebetulnya si saya periksa tapi yang bagian itu kebetulan lolos, saya termasuk yang tidak pas dengan menyalahkan masyarakat tradisional karena memang pada dasarnya regurasinya mendukung untuk itu, hanya saja memang benar sekali bahwa harus ada penegasannya bagaimana lokalitas situasinya, misalnya boleh saja tapi jangan pas di tengah-tengah puncak musim kering misalnya seperti itu, itu hal-hal seperti itu jadi kami akan catat dan sedang kita rumuskan.

Kemudian untuk **yang terhormat Bapak Sulaiman,**

Saya nanti akan cek yang masyarakat adat itu ya Pak Dirjen ya yang di Papua, memang catatan hutan socialnya Papua masih sedikit.

Kemudian **yang terhormat Bapak Sutrisno,**

Ini pertanyaan dan penjelasannya sangat analiti, saya ini terkait dengan kinerja keuangan belanja kemudian dikaitkan dengan respon kepada rakyat demikian yang di Litbank, demikian juga ya DAS AL saran-sarannya kami perhatikan Bapak tetapi jawaban yang dianalisisnya ini saya minta waktu dan nanti saya akan minta bersama-

sama Dirjen melakukan analisis ini, karena memang pada dasarnya sebetulnya memang setiap uang yang dikeluarkan itu tuh harus ketahuan buat masyarakatnya itu apa begitu, saya sangat setuju Bapak dengan analisis ini. Tapi untuk catatan-catatannya kami minta waktu dan nanti tentang datanya akan kami sampaikan secara tertulis ya Pak Sekjen ya dan nanti dengan Dirjen. Kemudian terkait dengan demikian pula yang konservasi Bapak yang di RAPBN 2020-nya kami perhatikan dari 4,9 triliun itu apakah hanya 700san miliar yang betul-betul dari 2, sekian triliun yang untuk agenda konservasinya. Jadi saya akan cek lagi Bapak satu per satu.

Kemudian tentang Gunung Cermai saya pernah kesana ada dua kali dan belakang memang cukup terkenal karena lokus-lokus untuk wisata yang sangat bagus, tapi saya tau persis juga Gunung Cermai ini sangat sensitive dalam kebakaran karena ketika saya hadir disana pun apinya melompat-lompat Bapak, jadi memang kami berikan perhatian khusus untuk ini.

Kemudian tentang Tambang galian C, pada dasarnya si ini memang di Pemerintah Daerah tapi dalam terjadi pengaduan yang sangat serius, saya juga suka menurunkan team juga dari Gakum, iya Pak Dirjen ya, Pak Roy ya beberapa kali juga kami lakukan dan ini nanti sebetulnya buat KLHK yang penting kalau ada hal yang sangat serius dan harus ditindak lanjuti itu dapat informasi yang spesifik saja, karena pasti akan dilanjutkan dan diturunkan teamnya.

Untuk **yang terhormat Pak Andi**, terima kasih bahwa dukungan kepada Lingkungan Hidup dana untuk sector atau sector Lingkungan terutama memang sangat dibutuhkan. Kemudian ada bagaimana pertanyaan tentang system pengawasan terhadap pabrik yang mengelolah limbah kayu. Di KLH itu ada yang namanya rencana bahan baku, rencana pemenuhan bahan baku industry itu ada sistemnya, nanti akan kami cek aja tadi yang ditanyakan yang di Provinsi Riau, jadi kami akan cek aja karena disistemnya keluar, soalnya sekarang sistemnya sangat baik, jadi kayu ditebang dimana, jalan kemana pakai truck nomor polisi berapa, sampai di pelabuhan mana itu bisa kelihatan datanya bisa diurut. Oleh karena itu memang engga bisa lagi ada perusahaan HTI yang bilang bahwa HTI-nya sulit sehingga tenaga kerjanya dirumahkan, itu tuh engga bisa bohong dia karena datanya sampai di pelabuhan itu bisa kelihatan. Jadi untuk **yang terhormat Pak Andi** ini akan kami cek di sistemnya.

Kemudian untuk **yang terhormat Pak Budi Setiawan**, memang tentang dampak seberapa besar masyarakat mendapatkan dampak dari hutan social ini.

KETUA RAPAT:

Bu Menteri kalau yang tidak ada Anggotanya tidak perlu dijawab Bu, biar cepat dan singkat. Kalau engga nanti Ibu sampai nanti jam 10 malam ini Ibu kalau Ibu jawab semua. Yang engg ada Anggotanya tidak perlu dijawab.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Baik terima kasih Ketua.

Selanjutnya Pak Anselma tentang Komodo, kami sudah beberapa kali rapat dengan Pemda NTT, juga Manggarai Barat dan juga sudah dirapat di kantor Menko Perekonomian sudah ada beberapa keputusan langkah kita buat team bersama dan Pemda NTT, Manggarai Barat, serta Kementerian Pariwisata dan Kemenko Maritim. Memang cara penyelesaiannya adalah intergrasi.

Ketua, dan Ibu dan Bapak yang kami hormati.

Memang masalah utamanya ternyata di Taman Nasional Komodo itu dalam Pariwisata adalah persoalan distribusi income, jadi pendapatan yang masuk di Taman Nasional sebagai kawasan wisata itu, itu hampir tidak ada yang ke Provinsi NTT maupun yang ke Manggarai Barat karena apa, karena seluruh bisnisnya itu berproses diruang bisnis saja. Seperti kapal Kres, dia datangnya dari Bali, dari Bali langsung kesitu, jadi engga ada yang lewat-lewat di Pemda NTT, juga di Manggarai Barat. Kemudian di Kapalnya makanan di Kapal, nginepnya di Kapal seperti itu. Oleh karena itu ini sudah kita bedah dan sudah disiapkan langkah-langkah untuk penyelesaian dengan memperhatikan istilah kami itu distribusi income, jadi yang pajak ke Pemda mau yang mana dan lain sebagainya. Yang terkait dengan Desa yang ada di Pulau Komodo dapat kami laporkan bahwa disitu memang ada Desa yang sekarang jumlahnya 506 KK, semula Pak Gubernur berpikir untuk memindahkan, kami mencoba menjelaskan bahwa pola resettlement sebetulnya dikonvensi internasional itu sebetulnya paling pritif harusnya tidak boleh dilakukan untuk pembangunan, dia hanya bisa nanti folenteri kalau masyarakatnya lebih baik pindah ditempat lain dengan prospek yang lebih baik itu silahkan masyarakat karena apa, karena masyarakat ini ada sejak tahun 1927, dia disitu waktu itu baru 40 KK, sekarang sudah 506 KK. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah kita tata Desanya, kita pola bisnisnya. Karena sekarang bisnisnya dia bikin patung-patung Komodo dijual, jadi bikin patungnya juga ngambil kayu juga, kemudian menjualnya juga kurang rapih dan sebagainya, ini yang ditata. Sekarang ini semua sedang ditata dan kita akan konsetrasikan aktivitasnya dinamika pelayanannya terutama di Pulau Padar, jadi Pulau Komodo-nya kita betul-betul jaga untuk satunya, sebab beberapa kali kami ke lapangan itu saya pernah ketemu turis dari Meksiko hanya datang untuk melihat Komodo dia engga perlu melihat yang lain-lain, dia suami istri cuman mau melihat Komodo udah itu pulang. Kemudia sekarang juga sudah dimulai investasi yang kalau sastanya mau masuk sudah dengan BUMD, jadi kami sudah dorong kesana. Oleh karena itu saya tadi saran dari **yang terhormat Pak Anselma** itu sudah kita lakukan.

Kemudian terkait dengan Desa-Desa penyangga atau Desa-Desa pemukiman dalam kawasan hutan apakah dikonsesi, apakah dikawasan hutan Negara termasuk di

AGU, perintah Bapak Presiden itu harusnya ditangani dan mendapatkan pelayanan public, kalau perlu dikeluarkan dari hutan, dikeluarkan. Tapi istilah kami bahwa ini harus ditata saja menurut ketentuan yang ada sedapat-dapatnya. Jadi kalau secara ketentuan layak untuk keluar dari hutan iya kita keluarkan saja, kalau tidak misalnya nanti kita lihat apakah nanti polanya seperti apa begitu. Jadi kalau dilihat sekarang instrumentnya si memungkinkan untuk kita tata.

Kemudian untuk **yang terhormat Pak Bambang**, tadi saya sudah jawab Pak ya yang terkait dengan yang kawasan pemukiman. Jadi yang di hutan produksi kemungkinan bisa dilepaskan.

Iya silahkan.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Interupsi Ketua,

Bu, ketika masyarakat yang ada di hutan dan hidupnya sudah cukup lama turun temurun kemudian kalau mau kita pindahkan saya yakin dan saya jamin tidak akan berhasil. Pengalaman kami ditransmigrasi paling sulit. Nah harapan kami program Ibu Menteri sudah masuk yaitu program Hutan Sosial, tetapi itu baru sebagian kecil, tentunya Kementerian lain harus bisa masuk untuk menangani Desa tersebut.

Nah ini ada pertanyaan yang mendasar. Ketika ada Kementerian yang mau masuk terbentur dengan kawasan hutan produksi dan ini semua Kementerian takut Bu, oleh karena itu kami mohon Ibu Menteri bisa mengeluarkan dari kawasan hutan produksi. Di Tora tadi utamanya adalah hutan produksi yang dapat dikonversi, sementara masyarakat Kalteng yang dipedalaman itu masuk di kawasan hutan produksi.

Saya kira itu Bu Menteri kami mohon, karena ini akan menjadi persoalan yang sangat rumit dan meledak. Termasuk Kalbar ini sudah mulai protes, karena hidup mereka itu dari jaman dulu juga tebas, terbang, bakar, sementara sekarang dilarang oleh Pemerintah dan Pemerintah sekarang belum melakukan memberikan solusi kepada mereka. Ini persoalan cukup genting menurut saya dan harapan kami dari Komisi IV saya pikir juga akan mendukung terkait dengan program penanganan terhadap masyarakat setempat.

Terima kasih Ibu Menteri,

Terima kasih Pimpinan.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Ketua.

Terima Kasih Pak Bambang **yang terhormat**.

Prinsipnya kalau hutan produksi apalagi hutan produksi yang dapat dikonversi saya kira bisa dikeluarkan dari hutan kawasan pemukiman, tapi ada tapinya, kita harus tata, jadi tidak bisa sekarang kita bilang oke rakyat boleh ini dikeluarkan dan bukan hutan lagi, itu nanti bisa ras kaya tahun 1999. Jadi ini kita siapkan Permennya sudah ada dan tadi catatan **yang terhormat Pak Bambang** ini menginspirasi kami, kalau sudah Permenya sudah ada Permennya. Kalau sudah operasional, pertama kalau belum masuk Tora kita masukan Tora karena pada dasarnya 6 bulan sekali direvisi, saya juga akan berkondinasi dan menyurati Pak Mendagri dan Pak Menteri Pertanian untuk pelayan public ini. Iya Pak ya, baik terima kasih.

Saya kira saya juga usul untuk pipa bawa tanah gambut langsung nyodet masuk kesungai untuk mengatasi kebasahan, saya kira ini akan kami catatan Bapak karena kami akan rapat dengan para Gubernur dan Pak Menkopolkam untuk ini, dan nanti kami catatan bahwa ini secara civil engineering memungkinkan dan cukup baik.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Izin Pimpinan,

Terkait dengan Water Bombing Bu untuk mengatasi Karhula di daerah gambut saya mohon untuk tidak dilakukan, karena dulu saya mengendalikan selama tiga tahun, ketika water bombing masuk ini justru memperparah mempercepat proses kebakaran dan itu kami stop, kanal juga kami stop waktu itu, kanal ini bukan produknya KLH saya tau.

Itu saya kira Bu, terima kasih.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Iya saya catatan Bapak, nanti kami diskusikan juga dengan ahli-ahlinya.

Baik tadi yang Labuhan Bajo dengan sampah kita juga tangani karena Labuhan Bajo itu termasuk empat destinasi wisata yang harus selesai pada tahun 2020 sudah harus bagus begitu ya Danau Toba, Labuhan Bajo, Borobudur, Likupang dan Mandalika itu kita tangani secara khusus sambil juga yang lain-lain menyusul.

Untuk yang terhormat Ibu Vita, betul ya?

Terima kasih Ibu Vita usul yang positif untuk pelibatan lulusan-lulusan SMK, Engga ada, berarti gausah ya baik.

Bapak Halit engga ada juga, baik terima kasih.

Bapak Lisantus tadi, saya tadi minta maaf ya Pak soal gawai itu saya termasuk yang tidak suka juga berita tentang gawai itu. Memang saya periksa sebetulnya ini sebelum diserahkan tapi itu luput dari saya, saya minta maaf. Kita akan koreksi bahwa tidak boleh dalam kebakatan hutan ini menyalahkan persoalan-persoalan pekerjaannya masyarakat tradisional, jadi kami perhatikan.

Bapak kasus Itang Pak Ketua, saya belum dapat informasi tapi akan coba ikuti perkembangan.

Ini dari siapa nih Pak Roy ya, Pak Roy sudah ngikutin ya?

Yang menangani Polisi.

Kalau gitu nanti Pak Ketua kami coba memantau saja ke Bareskrim dan nanti kita lihat.

Ini sudah sampai ke Pengadilan apa masih di Polisi?

KETUA RAPAT:

Pak Krisantus jelaskan, kalau engga salah ini sudah sampai Pengadilan, suda P21, bahkan kalau tidak ada perubahan ya,

Coba jelaskan tanggal 21 atau tanggal berapa sidangnya?

Dijelaskan.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Tanggal 21 Sidang Pak dan kenapa ini perlu kita antisipasi segera, karena dari hari ini sampai besok itu surat organisasi-organisasi Dayak itu sudah menyebar dan seluruh utusan-utusan Dayak di Kabupaten mereka akan datang ke Sintang mendatangi Pengadilan Negeri Sitang. Pak Wamen tau tradisi Dayak ini. Jadi ada memang sejenis undang yang menggunakan isarat-isarat Bu, jadi itu kompak sekali kalau sudah datang, nah ini yang harus kita antisipasi. Kemudian kenapa ini kita di Jakarta tidak tau, karena kami disana media itu kurang sekali tidak ada Metro, tidak ada Tvone tidak seperti disini, iya tidak ada, jadi TV Ruwai itu pun saya tanya TV Ruwai kemarin dia tidak mampu sewa satelit sehingga siaran tidak sebaik daerah. Jadi jangan heran kalaulah bencana besar disana mungkin Pusat juga tidak akan mengetahui. Tidak seperti di Jawa, kalau di Jawa orang dapat ular besar saja sudah disiarkan di TV, tapi kalau di Kalimantan Gunung roboh pun tidak akan disiarkan di Televisi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi Bu Menteri saya minta jawabannya kalau bisa hari ini, karena ini kalau makin kita diamankan semakin ribut saya khawatirkan menjadi suatu keributan yang cukup luas. Karena tadi saya mendapat info juga dari Fraksi, setelah tanggal 21 ini akan ada gelombang demo lebih besar lagi dan kalau tidak salah yang ditahan tersangkanya cuman 6 orang. Jadi kalau kami nanti dengan Pak Dirjen Gakum dengan Eselon I kesana tidak bisa memberikan solusi yang terbaik, kalau gitu saya suruh Pak

Darori saja yang kesana mewakili saya. Tolong kalau bisa satu dua hari ini Pak Dirjen Gakum kami diberikan jawaban supaya kesana bisa menyelesaikan masalah.

Iya Bu Menteri ya, lanjutkan Bu Menteri.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Pak Ketua saran.

Ini saya kira ke Pengadilan minta tahanan luar saja dulu untuk meredam itu Pak Gakum, karena ini sudah masuk pengadilan engga gampang ini.

Tapi sudah tahanan luar sekarang?

Ohiya wajib lapor.

KETUA RAPAT:

Biarkanlah jadi PR Dirjen Gakum dulu satu dua hari ini.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Berdua-berdua, Dirjen Gakum sama Pak Sekjen karena urusannya berarti ke Kejaksaan, ke Pengadilan dan ke Polisi juga. Jadi nanti saya utus tiga orang untuk mencoba menjajaki ke unit-unit seperti apa ya.

Saya sudah minta waktu untuk ketemu Pak Kapolri dan lain-lain.

Jadi kita coba bantu Pak Ketua sebisa mungkin untuk kita lakukan, karena sayang banget sudah masuk di Pengadilan itu memang agak ini sedikit, tapi kita coba saja.

Kemudian **untuk yang terhormat Pak Selamat ada?**

KETUA RAPAT:

Pak Selamat dari jam empat tadi sudah pulang Bu.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Engga ada.

Yang terhormat Pak Suhardi, iya terima kasih Bapak soal ekspor lok dan eskport rotan bahan mentah itu memang menjadi perdebatan yang cukup rumit di Pemerintah Bapak karena masih dibutuhkan untuk keperluan di Dalam Negeri. Saya si sebetulnya dari Kehutanan si sebetulnya memang mendorong yang lok-lok itu, karena memang margine harganya memang jauh banget tapi, tapi dari aspek perindustrian itu

ada kebutuhan untuk industry dalam negeri sehingga ada persoalan kompetisi bahan baku, jadi nanti kita akan coba jajaki saja ke perindustriannya.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Kalau dulu itu Bu kalau industry dalam negeri.

KETUA RAPAT:

Pak Suhardi harus melalui meja depan dulu.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Minta maaf, minta maaf Pak Ketua iya saya konfirmasi sedikit Pak Ketua.

Bahan baku rotan ini cukup besar potensinya, hanya dulu memang kita ingin nilai tambah Bu, kita ingin nilai tambah sehingga yang bisa diekspor itu yang jadi. Persoalannya sekarang ini pengrajin rotan ini tidak mampu menyerap rotan alam yang ada di pasar, akibatnya harga rotan menjadi dwon sekali dan petani rotan tidak mau mengambil lagi. Nah ini dengan demikian kalau kondisi seperti ini barang kali bisa kembali dibuka ekspor lok rotan itu dengan memanfaatkan rotan alam yang ada sekarang yang bertimbun di dalam hutan, karena sudah lama kurang lebih tujuh tahun tidak digoyang rotan di hutan ini.

Itu Bu terima kasih.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Iya terima kasih Pak Ketua.

Saya sih sebetulnya pendukung untuk industry rotan dan bambu Bapak jadi selain kayu, rotan dan bambu malahan kami sedang memikirkan untuk ada kawasan ekonomi khusus untuk itu di Kalimantan, begitu. Tetapi ada challenge, ada tantangannya yaitu katanya mereka masih membutuhkan untuk dalam negeri. Oleh karena itu mungkin yang peluang setengah jadi mungkin akan kami check, saya juga meminta Pak Dirjen untuk melakukan pemetaan tentang rotan ini.

Kemudian soal uranium Bapak nanti kalau dapat tempat spesifiknya kami akan teliti saja, nanti ini juga sebetulnya di Direktorat Jenderal Pencemaran dan Potensi Kerusakan Lingkungan artinya ini memang ganggu manusia ini nanti kita akan lihat, nanit kalau perlu kami joint dengan ESDM.

Kemudian yang soal DAS, saya kira Dirjen DAS sudah mencatatkan ya **yang terhormat Pak Suhardi** ini mengusulkan untuk tambahan bagi dua DAS dibagi keperluan PDAM di DAS Laniang Mamasa.

Kemudian yang untuk Kayu Eboni saya kira baik untuk Tora maupun untuk Hutan Sosial memungkinkan Bapak, jadi nanti saya akan chesk saja, kalau boleh dapat informasinya lokasinya dimana nanti tinggal urusannya apakah sama Dirjen Plano, apakah sama Dirjen Bambang, apakah sama Dirjen Sigit ataupun Dirjen Bambang jadi asal ketahuan. Tapi pada prinsipnya si Pemerintah mendorong kelompok-kelompok masyarakat yang ingin produktif, jadi pada dasarnya ruangnya diberikan.

Kemudian **untuk yang terhormat Pak Muslim** terima kasih Bapak, kita memang sebelum Kabiner kerja berakhir Pak Wapres sudah memberikan atensi soal penanganan paska tambang Bapak, kami sudah juga mengusulkan material untuk waktu itu Pak Wapres Pak JK mengatakan coba disiapkan peraturan Presiden tentang penanganan bekas-bekas areal tambang ini, karena memang ada PP-nya PP 76 dan 78 yang mengatur bahwa areal bekas tambang ini ada dua kegitaanya yang sebetulnya direklamasi dan direhabilitasi. Yang direklamasi itu urusannya ESDM, yang bagian rehabilitasi vegetasi itu di KLHK jadi ini kadang-kadang suka kecampur-campur. Yang reklamasi ada dananya reklamasi di ESDM, kalau yang di rehabilitasi dari KLHK hanya perintahnya bahwa anda pemegang izin harus melakukan rehabilitasi disini-disini-disini.

KETUA RAPAT:

Itu Bu Menteri walaupun di dalam kawasan hutan, misalnya pinjam pakai kawasan hutan dijadikan tambang terus reklamasinya tanggung jawab siapa ini?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Tanggung persuhaan.

KETUA RAPAT:

Uangnya ditiptkan di ESDM atau di KLHK?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Di ESDM, namanya dana reklamasi.

Kehutanann hanya memerintahkan dilokasi mana, gitu.

Jadi kam sedang himpun ini Bapak, memang sebagai contoh saja di Kalimantan Timur doang itu kira-kira lobang tambang bekas itu ada 1351. Nah saya sudah meminta Dirjen Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pak Karliansyah sekarang lagi sakit mohon izin, itu untuk check di lapangan kemudian dipelajari bisa engga yang di Samarinda itu sekarang kita sedang uji coba untuk pemulihan, tapi caranya adalah meminta dukungan dari swasta, karena itukan pekerjaanya bekas pengusaha masa dibayarin APBN kan

engga mungkin. Oleh karena itu dengan bimbingan KPK kita melakukan pemulihan sebagai contoh dulu, tapi dengan dana dukungan dari swasta itu aja dananya perlu 26 miliaran gitu kira-kira, jadi nanti sambil dilihat. Kalau ke Kaltim nanti rencananya ke Kalim Ketua, oh ke Kalbar engga jadi ke Kaltim.

KETUA RAPAT:

Engga, ini saya sambil menunggu jalan keluar dari Dirjen Gakum, kalau tidak ada jalan keluarnya ya kami ke Kalbar jugakan percuma, iyakan. Makanya kami minta nanti Pak Sekjen, Pak Dirjen Gakum mengevaluasi meloby bagaimana caranya walaupun sudah dipegadilan tidak gampang untuk lepas begitu saja, tapi paling tidak kita memberikan kepercayaan kepada keluarga masyarakat tersebut bahwa hukuman kalau bisa seringan-ringannya. Tetapi permasalahannya rakyat tersebut tidak melanggar Undang-Undang, tidak melanggar Perda, kan ini permasalahannya. Undang-Undang mengatakannya boleh, Perda mengatakannya boleh kok ditahan.

Kan begitu ya, ya Bu Menteri ya.

Kalau nanti kami pasti kunjunga spesifik ke Kalimantan Timur untuk melihat objek tambang bekas galian tambang dan calon Ibu Kota Negara.

Itu Bu Menteri.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Ketua.

Ini barusan Pak Sekjen minta waktu Kapolri karena kita juga sudah ada komunikasi yang baik.

Pak Roy ya sama Pak Bambang ya.

Siap Ketua nanti tinggal interaksi saja terus menerus seperti apa jalan keluarnya.

Rasanya sih untuk masyarakat seperti ini bisa diselesaikan, karena kita pengalaman juga di Banyuwangi, di Kendeng ya beberapa kali sudah masuk Pengadilan tapi ada solusinya. Jadi mohon kesabara bersama-sama aja yang penting kita berusaha.

Iya Ketua setuju ya, terima kasih.

Kemudian terkait dengan Tora 4,9 juta, ini memang masih sangat sedikit karena memang kan jadi begini, ada sejarahnya. Ketika Presiden Jokowi mencanangkan Nawacita kita kemudian menyusun, mengartikulasikan istilah saya menyiapkan tidak gampang itu, baru kemudian dapet polanya itu pada Septeber 2016. Ketika bulan Septermber 2016 jadi kemudian keluar Perpresnya, Perpresnya tahun 2017, kemudian Perpres lalu Permenko, kemudian Prosedur-Prosedur-Prosedur sambil data di lapangannya dikolek, sambil penelitian di lapangan diteliti satu per satu antara objek dan subjek, inferentasinya yang tadi saya bilang infer (inferentarisasi dan verifikasi),

maka baru tahun 2018 mereka mengusulkan dan kita formal lah baru proses, maka barulah pada keluar itu SK-nya di 2019 kalau engga salah ya. Jadi ini masih berjalan terus, tapi menurut saya ya ini kesempatan kita menlanjutkan sambil memperbaiki system. Jadi terima kasih saran untuk strategi monitoring dan evaluasi saya juga setuju, jadi jangan sampai seperti Akpir apalagi apa namanya HTI Trans dan lain-lain yang sampai sekarang menjadi rumit begitu.

Kemudian **yang terhormat Bapak Muchtarom**, terima kasih Bapak. Kami akan perhatikan tentang Permen 39 ini Bapak, memang IPHPS yaitu Hutan Sosial di Pulau Jawa ini pendampingannya ramai Pak jadi banyak yang ingin mendampingi dan memang ada dua disitu ada pengakuan perlindungan kerja sama, dan ada yang Perhutanan Sosial. Diantara itu memang ada juga konflik-konfliknya dan yang kita coba bantu selesaikan oleh Pak Dirjen PSKL Pak Bambang Suprianto, misalnya di Kediri, Malang, Banyuwangi, Bondowoso kalau engga salah juga iya. Jadi memang ada beberapa dispute-dispute yang di lapangannya tidak mudah Bapak, kami berterima kasih sekali kalau ada dukungan **yang terhormat Anggota Dewan** pada Dapilnya dengan demikian malahan ini jadi bisa dengan mudah kita selesaikan.

Tadi yang soal Tora kami sudah jawab, memang dengan proses tadi itu kita tahun lalu baru menyelesaikan 333.000 hektar yang sudah siap SK dibagikan untuk yang existing jadi yang sekarang ada orangnya, yang ada pemukimannya dia ada disitu itu kira-kira 333.000 hektar itu sudah jadi SK seperti ini. Kemudian lainnya adalah 938.000 hektar itu baru SK pencadangan belum dibagikan jadi biru kenapa, karena harusnya dari 930.000 hektar itu Pemerintah Daerah mengajukan usul permohonan dia mau apain itu, tadi kaya Aceh bilang kok Aceh masih sedikit atau kok Provinsi lain masih sedikit yang gede-gede baru Kalimantan Tengah dan lain-lain. Itu mohon izin kalau memungkinkan politisi juga mendorong Kepala Daerah di Dapilnya Bapak, jadi kalau sudah ada usulan maka bisa jadi SK ini, maka kalau sudah jadi SK ini maka bisa jadi Sertifikat mau seminggu, mau dua bulan, mau tiga bulan dari Sertifikat ini dari Pak Gubernur atau Bupati dikasih tau ke BPN "hei BPN ini selesaikan jadikan sertifikat itu bisa karena sudah ada namanya, sudah ada luasannya di dalam", nanti oleh BPN diteliti lagi karena sama dia dibikin kavling-kavling, kalau ini di Kehutanan ini masih gelondongan yang kita serahkan. Kira-kira seperti itu Bapak.

Kemudian Waduk saya kira nanti kami komunikasi dengan Kementerian PU, karena pada dasarnya untuk hutan kita rehabilitasi hutan dan lahan kita juga oleh Bapak Presiden diperintahkan kepada saya untuk mengamankan waduk-waduk yang sudah dibangun ataupun waduk-waduk yang dipersiapkan untuk dibangun, jadi memang harus satu system kalau engga nanti ada waduknya engga ada airnya, ada irigrasi engga ada airnya seperti yang disampaikan oleh **yang terhormat Pak Mindo**. Jadi RAL kita sudah diarahkan kesan, satu untuk menunjang Pariwisata. Jadi yang empat tadi Mandalika, Bajo dan Danau Toba dan lain-lain. Kemudian untuk

mengamankan lima danau, lima belas danau prioritas, lima belas daerah aliran sungai prioritas, enam puluh lima lokasi waduk yang sudah dibangun itu harus diamankan.

Jadi pada dasarnya saya juga sependapat bahwa harusnya rempah-rempah diangkat lagi, baru sedikit memang yang di Maluku Pak Dirjen ya, Hutan Sosial yang di Maluku pakai tanaman Pala yang lain belum keangkat misalnya Lada di Bangka, Lampung atau kalau Kopi sudah banyak tapi Kopi itu bukan rempah dia beferijis. Duren secara khusus Kalimantan Barat misalnya seperti itu misalnya. Jadi memang ini pelan-pelan Bapak kami catatan Pak Dirjen ya untuk ke rempah-rempah.

Kemudian kerusakan, Mojokerto tadi saya sudah jawab.

Kemudian **untuk yang terhormat Pak Edward**, saya kira kita masukin saja diagenda Pak Wudoyo bikin embung-embung di NTT. NTT itu kalau sebagai perbandingannya Bogor itu kita sebut Kota Hujan, kalau pakai angka kira-kira 3000mm pertahun, kalau NTT antara 700 maksimum 900, Lampung itu kira-kira 2100 maksimum 2300. Jadi itu di kita ada zona-zona iklim, ada zona-zona curah hujan jadi ada isohyet namanya itu kelihatan. Oleh karena itu kalau kita bikin embung sebetulnya kita panen air-air istilahnya water hypersting kita akan panen air dan kita akan simpan, jadi saya kira itu betul juga, nanti di deisgn ya untuk NTT Bapak. Jadi terima kasih catatan ini kami perhatikan.

Untuk yang hormat Pak Darari, saya akan perhatikan.

F-PG (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Interupsi Bu,

Pak Ketua, inikan pertanyaan dari komunitas Bu, saya kira tolong tertulis nanti sampaikan. Kalau saya tau Ibu jawab apa saya jadi engga perlu jawab Bu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tapi Pak Darari itukan yang ngomong tadikan mantan di LHK, waktu mereka di LHK mereka membuat apa, soalkan begitu ya kalau ketemu ya.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Ketua dan terima kasih **yang terhormat Pak Darari, yang terhormat Pak Ketua**.

Iya saya kira memang yang paling tepat adalah pertanyaan apa yang sudah kita kerjakan juga begitu.

Selanjutnya **untuk yang terhormat Pak Haerudin**, saya kira datanya ada Bapak nanti bisa berikan untuk keperluan Dinas, jadi tentang EPPKH, Kebun Sawit, dan lain-

lain. Kalau LHK si engga ada kepentingan untuk menyembunyikan terus terang, hanya memang ada irama kapan harus dikeluarkan, eh kapan tidak dikeluarkan dan sebagainya. Jadi saya kira ke Komisi IV datanya saya kira bisa diberikan engga ada masalah Bapak. Kemudian yang nunggak PNP dan lain-lain, saya nanti akan check ke Citarum karena kemarin sudah ada evaluasi satu tahun penanganan Citarum yang disampaikan oleh Pak Gubernur juga ya Bu Vivin ya Pak Gubernur dan Kemenko Martim sebagai kordinator. Kalau KLHK memang sangat parsial Bapak, kita paling hipal itu pun sedikit karena dananya engga banyak, sama pusat daur ulang sampah. Jadi memang kalau iya cuman 12 miliar juga engga banyak, sama gakum sedikit tapi gakumnya juga sudah banyak Polda juga jadi gakum udah ada. Nanti yang dari KLHK kami rangkum, kemudian nanti saya akan minta yang hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenko Maritim, iya Pak Haerudin ya.

Kemudian Pak Ketua soal jenis bibit tanaman itu sebetulnya Pak Haerudin dia berkembang dari waktu ke waktu, diwaktu yang lalu memang semua hanya pohon penghijauan, tapi kemudian secara politis ada perkembangan bahwa yang dibutuhkan adalah pohon-pohon produktif multi purpose species is multi-purpose tree species itu istilahnya **yang terhormat Pak Darori** MPTS, sehingga disambunglah menjadi pohon manga, tambah pohon duren dan sebagainya. Saya kira kalau ini pertimbangannya kita campur-campur juga menurut saya sih baik saja, karena memang harusnya dicampur-campur ya Bapak ya. Terima kasih Bapak.

Kemudian yang terhormat Ibu Risky, saya terima kasih atas deskripsinya mengenai ekosistem pagar alam, kita memang sedang menyusun regulasi ya Pak Dirjen KSDAE, kita sedang menyusun regulasi untuk namanya kawasan ekosistem esensial, jadi ekosistem-ekosistem tertentu itu memang harusnya di recognition untuk bagaimana apa lalu pengembangannya bagaimana. Jadi ini pagar alam **yang terhormat Ibu Risky** gunung dempo akan kami perhatikan.

Kemudian TNKS juga kita akan perhatikan, memang ini dia sangat dinamis dia wilayah yang word hardpays pengembangannya apa-apa kita harus minta izin kesana, jaid terima kasih atas catatan-catatan ini kami akan tag note. Memang ada usulan-usulan di tanaman nasional itu sendiri sebetulnya ada zonasi, ada zona inti, ada zona penyangga, ada zona pemanfaatan secara lestari, jadi sebetulnya ada zona-zona yang terrelative aman. Ini tidak bisa dihindari, karena dalam catatan kita itu ada 6.000 desa yang ada di kawasan konservasi, nah itulah yang harus dikelola sebegitu rupa dalam bentuk Hutan Sosial, jadi masyarakatnya ada disitu ditata dia bisa melakukan sesuatu dengan aturan-aturan dengan tetap menjaga fungsi pada hutannya. Jadi memang kelihatannya buat Pemerintah sekarang pilihan engga ada, kecuali menata-menata dari yang sudah terjadi sejak sekian waktu yang cukup panjang.

Tadi yang tentang limbah kami sudah kami sampaikan, memang tambahannya tadi dari penjelasan saya yang tentang **untuk yang terhormat Ibu Farida** tambahannya bahwa konfensi dasarnya memang melarang kirim mengirim sampah dan

limbah antara negara jadi memang engga boleh ada itu, dan Undang-Undang kita sudah benar memang engga boleh, tapi memang secara terori ada perkembangan-perkembangan toleransi misalnya apa satu persen, dua persen dan sebagainya.

Kemudian terakhir **yang terhormat Ibu Nuraini** betul ya namanya, terima kasih. Nanti saya akan perhatikan catatan tentang akuntabilitas ini, kemudian tentang strategi anggaran dan penanganan limbah.

Pak Ketua seperti kami laporkan Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Sebetulnya dari dana 9 triliun itu dana yang untuk lingkungannya rasanya engga sampai 2 triliun, rasa-rasanya yang 9 triliun itu yang untuk sector lingkungannya itu paling 1,3 sekian untuk beberapa program. Jadi memang kalau boleh kedepan kami berharap bahwa bagian ini yang kita dongkrak, sehingga masalah lingkungan yang begitu besar pemulihannya harus kita lakukan itu memang menjadi kurang terdukung. Kaya sekarang misalnya kita sudah keluarkan sudah ajak masyarakat untuk melakukan pemilhan sampah dari rumah, tapi kalau engga dikasih sarananya ya bagaimana mau milah, dia naronya dimana begitu, saya bilang sama Bu Dirjen coba diotak atik pake trailer dulu mungkin nanti di satu, dua, atau tiga kota gitu, engga seluruh kota mungkin sport-sport beberapa itu baru bisa jalan, berapa rumah tangga gitu disuatu kota yang harus difasilitasi. Jadi memang ada kebutuhan dukungan yang cukup besar.

Kemudian tentang piutang memang dalam catatan waktu saya pertama masuk itu ada piutang 3,9 triliun dari PSDH, dana reboisasi, PNT 1,3 triliun, terus piutang penggunaan kawasan 1,9, HTI 426, dan seterusnya, kondisinya 1,4 piutang lama Ketua mungkin sudah lebih dari 20 tahun, 20 sampai 25 tahun, jadi orangnya udah engga ketahuwan dimana alamatnya dokumennya karena apa, karena kantor penerbit dokumennya kaya Dinas Kehutanan Kabupaten kan sudah bubar sejak Undang-Undang 23. Jadi memang ada trabel, oleh karena itu kita terus sedikit demi sedikit menyelesaikan. Jadi ada persoalan itu cara dengan rekonsiliasi KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Kantor KPKN dan lelang, kemudian terhadap yang engga ada alamat, dokumen, sumber dan lain-lain perlu dikomunikasikan dan diterbitkan catatan-catatan oleh Dirjen maupun oleh Keuangan dan sebagainya. Sedangkan kondisi piutang penggunaan kawasan hutan itu umumnya masih lacar dan penagihannya sudah dilakukan secara normal, cicilannya secara bertahap juga mereka berikan, jadi ada situasi-situasi. Ada juga piutang Sea Games tahun 97, jadi memang jaman dulu namanya itu banyak yang aneh-aneh tapi recodnya sampai sekarang masih jadi beban kami yang kami masih terus coba komunikasikan dengan Sekretariat Negara maupun Kementerian Keuangan.

Demikian catatan yang bisa kami laporkan, kurang lebih mohon maaf, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Bu Meneteir saya sangat setuju sekali dan saya mendukung untuk menaikkan pagu anggaran, jadi kalau bisa nanti apabila ada APBNP segera diajukan. Saya untuk kedua kalinya mengingatkan, hampir semua Taman Nasional tidak ada alat Pemadam Kebakaran, tidak ada salahnya apabila nanti ada APBNP belikanlah alat Pemadam semacam Blangwing atau apa. Contohnya kalau seperti Gunung Bromo itu terjadi kebakaran apalagi tempatnya gersang, tandus terjadi kebakaran ya cuman nunggu dari ALLAH SWT aja nunggu hujan, iya kalau engga hujan ya wasalam udah. Kan begitu.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Izin Ketua,
Masih bisa Ketua?
Saya yang awal, saya yang mengakhiri.

KETUA RAPAT:

Satu Menit?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Lebih Ketua.

KETUA RAPAT:

Dua menit.
Jangan lebih dua menit, karena sudah malam.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Belum Ketua,
Maaf Ketua langsung saja.

Ibu Menteri yang kami hormati.

Mungkin Ibu tadi ada tiga yang saya tanya, mungkin kelupaan lagi respon Bu masalah pengaduan dari Anggota Pak Sudin juga nih dari PDIP yang ada di Aceh Tenggara yang sudah saya serahkan tadi Ibu. Saya ingin respon saja Bu, mungkin Ibu sama Pak Sekjen kelupaan. Itu ada pengaduan indikasi adanya kesalahan systematis

dalam praktek kecurangan pada proyek pembuatan tanam RHL, mungkin direspon saja supaya ada jawaban saya nanti dengan adik-adik.

Yang kedua Pak Ketua,

Pak Ketua saya mungkin apresiasi Pak Ketua masalah Kalimantan Barat saudara kita yang dari Dayak, Ibu Menteri juga sudah katakan kalau bisa hukum ringan Bu ini rakyat bisa Bu. Cuman kita jangan salah Ketua, yang besar-besar selalu kita lupa. Mungkin di Ketua tidak ada data, sama saya tapi ada data Ketua. Ini Ketua ada tabel peringkat 8 besar Ketua titik panas terbanyak dalam konversi HTI pada tahun 2019 ini dan juga terjadi pada di lahan gambut, datanya kalau saya tidak salah sampai akhir Oktober ada sama saya Ketua ini ada 8 perusahaan.

Apa izin Ketua saya bacakan?

KETUA RAPAT:

Satu menit cukup bacakannya atau dua menit.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Baik Ketua.

1. PT. Bumi Mekar Hijau di Provinsi Sumatera Utara,
2. PT. Sumatera Lestari di Riau,
3. PT. Rimba Hutan Mas di Jambi,
4. PT. Wira Karya Sakti di Jambi juga,
5. PT. Musi Hutan Persada,
6. PT. Akasia Andalan Utama di Kalimantan Timur,
7. PT. Bumi Andalas Permai di Sumatera Utara,
8. PT. Ruwas Utama Jaya di Provinsi Riau.

Mohon saya Ketua kita berbicara masalah suku daya yang kecil-kecil ini besar Ketua. Apakah siap kita di Komisi IV ini menghadirkan perusahaan ini di Komisi IV, supaya ada nanti Ketua jangan yang kecil-kecil saja yang kita Pak. Kalau bisa Pak Ketua, saya yakin dengan kebijakan, dengan Ketua yang baru arif sangat bijaksana saya yakin Ketua mampu dihadapan Ibu Menteri ini menghadirkan 8 perusahaan ini agar bisa berkordinasi, berkonsultasi atau pun dalam rapat resmi di Komisi IV.

Itu sekedar saran saya Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tambah satu lagi, dan pemberani.

Pak Salim Fakhry kalau saya tidak ada masalah, kalau itu memang permintaan Anggota dan itu untuk kebaikan. Jadi serahkan saja datanya itu nanti ke Sekretariat,

Sekretariat kordinasi dengan Dirjen Gakum atau dengan Dirjen yang lain untuk memanggil. Memanggil, mengundang kita atur waktunya.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Baik Pak Ketua.

Saya kira Pak Ketua tadi saya simak Pak Ketua katakan itu dari Anggota, saya ini Anggota jangan salah ada hak saya. Makanya kalau saya bukan Anggota Komisi IV tidak mungkin saya berbicara dalam forum bersama Ibu Menteri ini.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Engga maksud saya begini loh Pak Salim Fakhry.

Anggota kan ada 49, ya kalau Anggota yang lain menginginkan ya kita panggil, tapi kalau Bapak memaksa sendiri ya juga saya panggil Pak, karena Bapak kan Bos saya Pak.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya kira begini Pak Ketua, kita sepakati saja tapi Ketua bilang demi kebaikan. Dirjen Gakum tadi sudah pandang-pandang saya nampak setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Setuju iya Pak Dirjen Gakum ya.

Ya sudah nanti serahkan ke Sekretariat nanti kita jadwalkan entah di Desember sebelum kita reses, karena reses awalnya tanggal 12 Desember tetapi dimudurin jadi tanggal 17 apabila tidak ada perubahan.

Jadi tolong nanti setelah rapat diserahkan iya.

Terima kasih kepada saudari Menteri yang telah mencapaikan jawabannya.

Bapak, Ibu yang saya hormati.

Dalam dialog diskusi saran dan masukan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelum acara ini kita akhir kami akan bacakan rancangan kesimpulan rapat kerja pada hari ini.

Tampilkan.

Kesimpulan / Keputusan.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2020, serta pagu anggaran tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp.9.319.325.816. Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan pendalaman lebih detail terkait rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama tahun 2019. Selanjut Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menindak lanjut seluruh keputusan dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 sebagai langkah antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun yang akan datang.

Anggota Setuju?

Ibu Menteri?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

(KETOK/DISETUJUI)

Saya jelaskan Bu Menteri pada tanggal 13 November itu permasalahan yang kita tekankan adalah akan datangnya elnino yang cukup dahsyat.

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memenuhi seluruh aspek adminitraasi, aspek legal atas seluruh proses ahli fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk pengembangan wilayah Ibu Kota Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Anggota setuju?

Ibu Menteri?

(KETOK/DISETUJUI)

4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah (Sekeu) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan target penyerahan lebih kurang 4,970 juta hektar tanah objek Reformasi Agraria atau Tora dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Anggota setuju?

Ibu Menteri?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Izin Ketua kalau boleh angkanya dikoreksi kembali kepada target RPJMN 4,1 karena 4,97 ini peta indikatif yang kami dorong, jadi kalau dapat lebih dari 4,1 lebih bagus, tapi target formalnya officialnya 4,1 Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

4,1 juta, cukup setuju?

(KETOK/DISETUJUI)

Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah (Sekeu) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lebih serius melakukan Evaluasi Penilaian Kinerja Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan untuk selanjutnya memberikan akses yang lebih kepada masyarakat di dalam dan di luar Hutan dalam melaksanakan pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial dalam rangka pemanfaatan hasil Hutan, baik hasil Hutan Kayu mau pun hasil Hutan bukan Kayu, serta pemanfaatn jasa lingkungan.

Anggota?

Nampaknya Anggota sudah pada ngantuk nih.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Interupsi Pimpinan,

Kita sedang mencoba menyelami Bahasa yang ini, karena ini hal yang tadi kita kritisi. Bagaimana kita hati-hati dengan izin segala macam itu Ketua.

KETUA RAPAT:

Didalami saja dulu, sudah?

Sudah Pak Haerudin?
Anggota bagaimana setuju?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan,
Untuk selanjutnya memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat itu.
Memberi akses saja, jangan ada memberi akses yang lebih luas mungkin.

KETUA RAPAT:

Memberikan akses, lebih luasnya dihilangkan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Memberikan akses kepada masyarakat ditahun, nah iya.
Kalau luas entar bahaya masalahnya.

KETUA RAPAT:

Kalau luas dia buka jalan seperti di pesisir Barat lagi.
Di Taman Nasional membuka jalan bilang jalan Patroli tapi dibukanya 9 meter.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua,
Dari segi kosa kata saja, keberatan engga Kementerian ini dikata kurang serius?
Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah (Sek-Keu) Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan agar lebih serius melakukan, ada bahas lainkah, tapi kalau
mereka setuju Alhamdulillah.

KETUA RAPAT:

Pak Senior, saya belum tanya kepada Kementerian mengenai nomor 5.
Bu Menteri bagaimana yang nomor 5?
Jadi Bu Menteri jadi ikut Pak Haerudin ini jadinya ini.

MENTERI LHK:

Terima kasih Ketua, dan terima kasih **yang terhormat Pak Mindo, Haerudin, dan Ibu Riezky yang terhormat.**

Kalau boleh Ketua kami mohon izin koreksi pertama, tadi kami menerima usulan **yang terhormat Ibu Riezky** tetapi kemudian ditambah dengan kata-kata memberikan akses legal, akses legal, kemudian tambahannya lagi kepada masyarakat di dalam dan di luar tambah di depan hutannya ada kata kawasan hutan. Akses legal di dalam dan di luar kawasan hutan.

KETUA RAPAT:

Nomor 5.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Kawasannya di depan hutannya.

KETUA RAPAT:

Sudah diperbaiki.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Kemudian catatan dari **yang terhormat Pak Mindo** memang menjadi minor ini kepada LHK kalau seperti tidak serius, kalau boleh Ketua disesuaikan, sudah, oh baik.

Terima kasih banyak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya bacakan kembali,
Semua ini gara-gara Pak Haerudin sih.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah (Sekeu) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan Evaluasi dan Penilaian Kinerja pemegang izin usaha pemanfaatan hasil Hutan, untuk selanjutnya memberikan akses legal kepada masyarakat di dalam dan di luar kawasan Hutan dalam melaksanakan pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial dalam rangka pemanfaatan hasil Hutan, baik hasil Hutan Kayu mau pun hasil Hutan bukan Kayu, serta pemanfaatan jasa lingkungan.

Anggota?
Bu Menteri?

(KETOK/DISETUJUI)

6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah (Sekeu) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mulai tahun 2020 dapat menyediakan anggaran untuk program atau kegiatan sosialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan melibatkan atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Anggota, Anggota setuju?
Pemerintah?
Setuju.

(KETOK/DISETUJUI)

Pak Bambang senyum-senyum karena sudah di WA sama istrinya dia.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Ini sudah selesai ya?
Ada satu ya mungkin tadi yang kurang.
Izin Ketua.
Komisi IV mendesak yang terkait tadi rekan-rekan di Kalimantan Barat itulah.

KETUA RAPAT:

Tadi ada nomor 7 itu, ini ada nomor 7 ini.
Mana nomor 7-nya?
Iya ini nomor 7 saya tau.

7. Komisi IV DP RI meminta setiap Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengembangan setral atau zonasi program unggulan di setiap Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mencapai kemandirian masyarakat baik di dalam dan di luar kawasan hutan.

Mungkin zonasinya seperti ini Bu, ini permintaannya Pimpinan sebelah saya. Misalnya, di wilayah Sumatera Barat lebih banyak bibitnya diberikan bibit tanaman jengkol atau pete. Ini hanya zonasi untuk pengembangan penghijauan maksudnya.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Ketua izin, saya hanya agak khawatir dengan kata-kata katakana Kabupaten dan Kota. Kalau 34 Provinsi saya kira manageable.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Cukup 54 dulu Bu sebagai percontohan, sesuai dengan Anggota Komisi IV.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Tapi itu jangan disebut, karena kalau disebut disetiap Kabupaten Kota berarti ada 500 lebih iya. Jadi kalau disebut setiap Provinsi enggak ada masalah, tinggal nanti Kabupaten Kota-nya kan kita tinggal bisa atur.

Terima kasih Ketua.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Contoh 54 dulu.

KETUA RAPAT:

Jadi begini Anggota kalau pendapat saya, kalau Kabupaten Kota-nya dihapus nantikan bisa diatur, misalnya di Jawa Tengah tinggal Kabupaten-Kabupatennya aja.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua, ini kelihatannya yang merumuskan ini senang memakai kata-kata setiap-setiap, setiap Eselon I lah Irjen bagaimana, Kesekjenan bagaimana, Eselon I juga. Jadi harus dijelaskan Direktorat Jenderal yang mana dari Eselon I ini, kira-kira begitu ya supaya enggak semua, bingung nanti Kesekjenan ini mana yang harus dikerjakannya setiap Eselon I.

KETUA RAPAT:

Bukan, maksudnya setiap Eselon I yang Bidanganya. Enggak juga Pak Dirjen Gakum suruh nanam penghijauan kan enggak mungkinlah.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Ini begitu masuk disitu diketok dalam lembaran, semua orang yang baca salah satu kelemahan Undang-Undang di Indonesia karena ayat itu sering kali bisa ditafsirkan lebih dari satu kacau balau dia. Nah ini juga kita membuat kalimatnya tafsirnya hanya tunggal, jangan beda membacanya beda artinya, itu kita hindari.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi tolong yang ahli Bahasa diperbaiki redaksinya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan ya.

Berarti kalau boleh ditambah, Komisi IV DPR RI meminta setiap Eselon I teknis di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan bla-bla-bla-bla-bla itu, itu masukan Ketua.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Ketua.

Kalau ini konteksnya adalah program unggulan jadi bisa tanam pohon, bisa soal sampah, bisa yang lain-lain.

KETUA RAPAT:

Bisa Pak Dirjen Gakum nangkap orang lagi Bu.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Bisa Ekoriparian, jangan yang kejam-kejam dulu Ketua yang manis-manis saja dulu. Berarti kita bisa bunyikan Komisi IV DPR RI memintan Eselon I LHK yang really fun, jadi yang really fun dengan program unggulan jadinya. Satu, LHK yang really fun untuk melakukan pengembangan program unggulannya. Jadi beberapa Dirjen, jadi tergantung nanti mainnya diprogram apa, begitu.

Demikian Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi redaksinya sudah cukup Bu Menteri?
Anggota setuju?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Tambahin saja yang really fun dan teknis.

KETUA RAPAT:

Engga usah lah.

(KETOK/DISETUJUI)

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

Untuk nasib yang masyarakat dalam kawasan hutan belum masuk rekomendasi ini Pimpinan. Kalau tadi Tora itu hanya dikawasan hutan produk yang dapat dikonversi, nah ini saya makanya.

KETUA RAPAT:

Coba dituruin,
Di dalam dan di luar.

Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah (Sekeu) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan evaluasi dan penilaian kinerja pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan untuk selanjutnya memberikan akses legal kepada masyarakat di dalam dan di luar kawasan.

Iya Pak Bambang.

Bu Menteri saya barusan dapat info satu ekor Gajah mati di Riau, wilayahnya di Bengkalis PT. Arara Abadi Sinarmas Grup. Saya lihat tadi juga nampaknya Sinarmas banyak masalah, kenapa sih kita harus takut kalau dengan yang salah. Ini dikawasan Pak Dirjen, Pak KSDAE, Pak Dirjen dikawasan. Kalau memang perusahaan tersebut terlibat, saya minta Dirken Gakum mengambil tindakan yang tegas.

Dan juga tadi menanggapi masalah Pak Salim, Pak Hari tadi saya minta difasilitasi juga oleh Pak Dirjen Gakum untuk mengundang disini.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Pak Ketua kalau bisa dimasukan juga kedalam kesimpulan Pak Ketua, supaya nanti untuk ditindak lanjuti secepatnya.

Pak Ketua tolong jawaban.

KETUA RAPAT:

Apakah perlu dimasuki?

Kalau dimasukikan nantikan hanya 8 PT saja, yang lain gimana iyakan?

Bapak kayanya ngomong semenjak dilantik Bapak ngomong banyak tapi hari ini datang engga ada. Engga waktu Bapak dilantik sudah ketemu saya, jadi kalau ada serahkan segera biar kita jangan omong saja.

Jadi Pak Salim Fakhry saya mohon maaf, kalau tadi 8 perusahaan tadi yang ada sebutkan saya masukan, berarti yang lain nanti bagaimana. Berarti kalau sudah ada 8, nanti kalau ada 50, 50 dimasukan juga. Jadi seolah-olah Bapak ini engga percaya dengan Pimpinan Komisi IV.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya percaya Ketua karena ketegasan Ketua, keberania Ketua, cuman betul juga kalau 8 dimasukan yang lain bagaimana. Cuman pertama ini 8 yang saya lapor resmi ini dulu yang dipanggil Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, Bu Menteri sudah denger tadi Bu ya, tadi permintaan Anggota Komisi IV seperti itu.

Kesimpulannya juga sudah selesai ya?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ketua interupsi Ketua,

Itu tambahan pagu untuk Kementerian Lingkungan Hidup supaya dimasukan ke dalam kesimpulan.

KETUA RAPAT:

Kenapa Pak?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Tambahan pagu untuk Kementerian Lingkungan Hidup supaya disiapkan programnya.

KETUA RAPAT:

Memang pagunya Lingkungan Hidup dan Kehutanan satu Pak?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Iya.

Oh sudah masuk?

KETUA RAPAT:

Jadi pagu anggarannya Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Saudari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kami hormati

Sebelum kami menutup rapat kerja ini, kami persilakan saudari Menteri untuk menyampaikan kata penutup dalam rapat kerja hari ini.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan,

Yang tadi terkait tambahan kesimpulan bagi kawan-kawan yang dari Kalimantan untuk mendesak terkait masyarakat adat disitu tolong dimasukkan di dalam kesimpulan.

KETUA RAPAT:

Tadi kita sudah rumuskan, saya sudah sampaikan. Kita minta waktu 2 sampai 3 hari Pak Sekjen, Pak Dirjen Gakum untuk meloby aparat hukum, setelah itu kita tindak lanjuti dengan kunjungan spesifik ke Kalimantan Barat.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Iya maksudnya kesimpulannya dimasukkan saja dalam waktu 2 sampai 3 hari itu Ketua, tinggal tata Bahasa saja yang kita sampaikan.

KETUA RAPAT:

Saya rasa tidak perlu ditambahkan, kita semua punya komitmen bersama disini.

Anggota bagaimana?

Bukan masalah patuh, inikan komitmen bersama antara Ibu Menteri dengan Pimpinan dan Anggota. Percayalah LHK ini salah satu mitra yang baik dibandingkan dengan KKP yang periode yang lalu.

Silahkan Bu Menteri tanggapannya.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.**

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas berbagai cacatan dan saran, serta berbagai pandangan yang menurut kami sangat penting perbaikan dan peningkatan kinerja, serta langkah-langkah bagi Kementerian LHK dalam menyelesaikan persoalan dan dalam membantu atau membangun bidang LHK bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak tepat.

Pak Ketua, Wakil Ketua, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Terima kasih.

***Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kehilafan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* Rapat Kerja Kami Tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(KETOK 3X/RAPAT KERJA DITUTUP)

Jakarta, 19 November 2019

a.n. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat

Ttd.

**Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001**

